



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH FAKTOR AKSES, ROA, RENTABILITAS DAN
TABUNGAN KOPERASI TERHADAP PINJAMAN YANG
DIBERIKAN PADA USAHA KECIL MENENGAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains**

**INTAN DWI RAHMIANTI
7105092032**

I
25552

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
DESEMBER 2008**

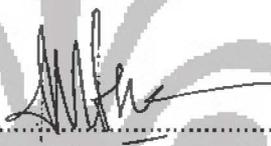


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Intan Dwi Rahmianti

NPM : 7105092032

Tanda tangan : 

Tanggal : 31 Desember 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Intan Dwi Rahmianti

NPM : 7105092032

Program Studi : Timur Tengah dan Islam

Judul Tesis : Pengaruh faktor Akses, ROA, Rentabilitas dan Tabungan Koperasi terhadap Pinjaman yang diberikan pada Usaha Kecil Menengah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Nurul Huda, SE., MM., M.Si

Nurul Huda
(.....)

Pembimbing : Dr. Muhammad Muslich, MBA

Dr. Muhammad Muslich
(.....)

Penguji : Drs. Agustianto, M.Ag

Drs. Agustianto
(.....)

Penguji : Ir. Hardius Usman, M.Si.

Ir. Hardius Usman
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Mustafa Edwin Nasution Ph.D, selaku ketua jurusan PSTTI-UI.
- (2) Bapak Nurul Huda SE, MM, MSi, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis saat penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dr. M. Muslich, Bapak Drs.Agustianto M.Ag dan Bapak Ir. Hardius Usman, Msi yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan tesis ini.
- (4) Para dosen dan staff di PSTTI UI yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu saya sejak belajar hingga saat ini.
- (5) Bapak dan ibu Budiono, Bapak dan Ibu Bustaman Rahim, Herawan dan Hafidz yang selalu memberikan doa dan dorongan semangat hingga hari ini.
- (6) Semua sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang selalu siap memberikan dukungan moril, tenaga dan waktu hingga tesis ini selesai.
- (7) Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya yang telah membantu selesainya tesis ini

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 31 Desember 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Dwi Rahmianti
NPM : 7105092032
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Kajian Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh faktor akses, ROA, Rentabilitas, dan tabungan Koperasi terhadap Pinjaman yang diberikan pada Usaha Kecil Menengah.

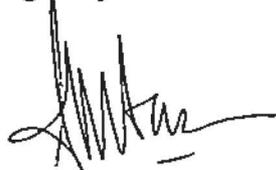
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2008

Yang menyatakan



(Intan Dwi Rahmianti)

ABSTRAK

Nama : Intan Dwi Rahmianti
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul : Pengaruh Faktor Akses, ROA, Rentabilitas dan Tabungan Koperasi terhadap Pinjaman yang diberikan pada Usaha Kecil Menengah

Pertumbuhan jumlah UKM tiap tahunnya makin tinggi, kontribusi usaha kecil menengah cukup menjanjikan dalam hal penyerapan tenaga kerja, menaikkan nilai PDB (Produk Domestik Bruto) serta salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sehingga pemerintah terus berupaya memberikan berbagai macam dorongan untuk meningkatkan kualitas dan pertumbuhan UKM. Salah satu kendala bagi UKM adalah masalah akses ke permodalan, karena banyak UKM yang dianggap tidak *bankable* sehingga UKM mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya. Disinilah peran penting lembaga keuangan mikro yang menjembatani antara UKM dengan perbankan.

Koperasi merupakan lembaga keuangan mikro yang sudah lama berdiri dan sesuai dengan UUD 1945. Namun pertumbuhan dan perkembangan koperasi belum dapat mengimbangi permintaan akan modal dari para nasabahnya. Kondisi lembaga keuangan mikro termasuk koperasi banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi penyaluran pinjaman dari lembaga keuangan mikro seperti faktor akses dan faktor kesehatannya (ROA, rentabilitas, tabungan). Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi secara signifikan kemampuan dan perkembangan koperasi karena segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan lembaga keuangan mikro akan berimbas pada perkembangan usaha kecil.

Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square pengujian data koperasi yang berupa data panel dilakukan. Dari hasil penelitian ini setelah diketahui faktor yang signifikan mempengaruhi penyaluran pinjaman koperasi pada UKM, maka dapat dilanjutkan dengan perencanaan kedepan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi dalam mendukung peningkatan UKM.

Kata Kunci: koperasi, akses, ROA, Rentabilitas, tabungan, pinjaman.

ABSTRACT

Name : Intan Dwi Rahmianti
Study Program: Middle East and Islam
Title : Influence of Access, ROA, Rentability and Saving factors for
Cooperation Loan Distribution To Small and Medium Enterprises

The growth of Small and Medium Enterprises (SME) is increasing each year – its contribution seems to be promising in terms of full employment, the increasing number of GDP (Gross Domestic Product) and as an effort to diminish poverty. As a result the Government has persistently put much effort in providing support to increase the quality and the growth of SME. One-known obstacle for SME is access to financial capital because many SME are considered bankable, resulting in difficulties in developing their enterprises. This is where the micro finance institution plays an important role in building a bridge between SME and banking.

Cooperation has long been founded as a micro financial institution, based on UUD 1945. However, the growth and development of cooperation is not equivalent with the capital demand from its clients. The condition of micro financial institution including co-operation is mostly influenced by many factors such as access and healthiness (ROA, rentability and savings) – known to affect the loan distribution from the micro-financial distribution. Therefore factors that significantly affect the ability and development of co-operation need to be recognized first due to its effect on the development of small enterprises.

By using Ordinary Least Square method examination of cooperation data in the form of panel data can be performed. The result may reveal significant factors that affect co-operation loan distribution to SME, followed with future planning in order to increase the performance of cooperation in supporting the growth of SME.

Keywords: cooperation, access, ROA, rent ability, savings, loans

اختصار

الاسم	: إنتان دوي رحمي ينتي
الدراسات	: الشرق الأوسط والعلوم الإسلامية
موضوع الرسالة	: تأثير مؤثرات العمليات, القوات, الاستعاريات والادخاريات على اعطاء الاعارات المالية في مهنتي الصغرى والمتوسطة.

نمو عدد مهنتي الصغرى والمتوسطة في كل سنة كانت متزايدة, وذلك لأنها تأخذ عدد العمال أكثر من غيرها من المهن, وترقية درجة الانتاج المنطقي هي من إحدى المحاولات لارهاب مستوى الفقر في إندونيسيا. ومن ثم كانت الدولة تعطي ترغيبات متنوعة لترقية الكيفية ونمو مهنتي الصغرى والمتوسطة. ومن عوائق نمو مهنتي الصغرى والمتوسطة هي عدم توافر الرأس المالي الكافي, هناك مهنتي الصغرى والمتوسطة لم تكن لديها الرأس المالي الكافي حتى يتباطئ النمو. ومن هنا يأتي دور هام للمؤسسات المالية الجزئية في البلد التي توصل البنوك ولتعامل التعاون مع مهنتي الصغرى والمتوسطة.

المؤسسات المالية التعاونية التي تعتبر من المؤسسات المالية الجزئية قامت منذ سنوات ماضية ومتماشية مع الدستور الأساسي عام 1945 م. إلا أن نمو وتطور المؤسسات المالية التعاونية لم تناسب طلب الرأس المالي المناسب الكافي لمدخريها. وأحوال المؤسسات المالية الجزئية منها المؤسسات المالية التعاونية تتأثر كثيرا بالمؤثرات وهي تؤثر في اعطاء الاعارات المالية من المؤسسات المالية الجزئية كتأثير مؤثرات العمليات, القوات, الاستعاريات والادخاريات. ولذلك من المهم معرفة المؤثرات التي تؤثر نمو المؤسسات المالية التعاونية لأن وجود العوائق عليها سوف تجعل المؤسسات المالية الجزئية بطيئة وبالتالي ستنبأ نمو مهنتي الصغرى والمتوسطة.

مع استخدام نظرية سعة الرجاء الأدنى فيعمل اختبار مراجع المؤسسات المالية التعاونية. من خلال نتيجة هذا البحث وبعد معرفة المؤثرات القوية على اعطاء الاعارات المالية في مهنتي الصغرى والمتوسطة, سوف يستمر العمل في التخطيط المقبل وذلك لترقية العمل والانتاج في المؤسسات المالية التعاونية من أجل ترقية وتشجيع تقدم مهنتي الصغرى والمتوسطة.

الكلمات المفتاحية : المؤسسات المالية التعاونية, العمليات, القوات, الاستعاريات والادخاريات.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah UKM diseluruh Indonesia hingga 2006 berkisar \pm 44 juta unit UKM. Menurut Badan Pusat statistik (BPS) tahun 2006 dikemukakan bahwa jumlah perusahaan seluruhnya di Indonesia adalah 44,69 juta. Dari jumlah ini yang tergolong Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 99,9%. Jumlah perusahaan-perusahaan besar hanya 4.469 buah atau 0,01%, tetapi andilnya dalam pembentukan PDB sebesar \pm 43%-46% sedangkan jumlah UKM yang 99,99% dari total jumlah perusahaan di Indonesia hanya mampu menghasilkan 54%-57% dari PDB. Sehingga meskipun jumlah UKM sangat besar namun output yang disumbangkan sangat tidak optimal.

Ditinjau dari sudut penyerapan angkatan kerja, UKM menampung 99,44% dari angkatan kerja yang ada. Dengan pertumbuhan rata-rata dalam penyerapan tenaga kerja per tahun yaitu 2,91%. Sedangkan usaha besar malah sebaliknya dimana penyerapan tenaga kerjanya makin lama makin berkurang tiap tahunnya. Ditinjau dari sudut output dan penyerapan tenaga kerja dan efeknya terhadap pengentasan kemiskinan, maka pengembangan UKM menjadi salah satu agenda yang digalakkan oleh pemerintah.

Masalah utama yang dihadapi oleh UKM adalah kurangnya modal untuk berkembang karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum dan manajemen yang sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal. Sedangkan kendala bagi LKM yang mampu menjangkau sebagian besar UKM yang belum bankable yaitu adanya keterbatasan modal sehingga besar kredit yang diberikanpun terbatas.

Aktivitas keuangan mikro hanya akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rakyat miskin manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat berlanjut (Ismawan, 2002). Menurut Riza Primahendra dari Bina swadaya performance dari LKM akan berpengaruh terhadap performance bisnis sektor riil, sehingga jika suatu LKM mempunyai performa yang baik dan sehat maka akan mendorong pertumbuhan bisnis sektor riil dari UKM binaanya. Kesehatan internal LKM dan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada UKM akan sangat

mempengaruhi pelayanan dan kesehatan dari LKM disamping prosedur peminjaman dan jumlah LKM yang tersedia.

Dengan meningkatnya jumlah UKM maka dibutuhkan jumlah bantuan modal yang makin tinggi yang bisa disediakan oleh lembaga keuangan mikro (koperasi). Kenyataannya jumlah dana yang dikucurkan koperasi ke UKM pada masing-masing propinsi di Indonesia umumnya konstan dan hanya di propinsi di pulau Jawa yang besarannya mengalami kenaikan. Oleh sebab itu perlu diteliti bagaimanakah pengaruh faktor akses pelayan dan kesehatan LKM khususnya koperasi terhadap penyaluran kredit yang siap diberikan. Apabila faktor akses dan kesehatan LKM berpengaruh terhadap tingkat pinjaman yang diberikan kepada UKM artinya kinerja LKM saat ini belum memadai dalam melayani dan memaksimalkan potensi UKM.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah faktor akses dan kesehatan Koperasi (ROA, rentabilitas, tabungan) berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan pada UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia ? Dan besar pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap pinjaman yang diberikan pada UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia? Bagaimana pandangan Islam terhadap koperasi.

Penelitian ini hanya dilakukan pada koperasi simpan pinjam diseluruh propinsi di Indonesia yang berasal dari Kementrian Koperasi dan UKM. dengan menggunakan data tahun 2003-2005. Hipotesis yang dibuat adalah Diduga faktor rasio aksesibilitas dan kesehatan (return on asset, rentabilitas dan tabungan) koperasi berpengaruh terhadap penyaluran pinjaman ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia (H1).

Dalam hadist Rasulullah pernah berkata, "*Kalian mendapat kemenangan dan kecukupan berkat orang-orang lemah di antara kalian.*" (Hadist Riwayat Abu Daud melalui Abu Ad-Darda). Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya UKM yang notabene dilakukan oleh masyarakat miskin dapat memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya semua itu akan berimbas pada perekonomian negara. Menurut Ismawan (2003) Kelompok usaha mikro sangat strategis karena: (1)

mempunyai kegiatan ekonomi produktif (2) secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil (3) efektif untuk mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri.

Dalam pelaksanaannya selain sebagai perantara keuangan beberapa LKM juga menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri dan pelatihan pengetahuan keuangan dan kemampuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki berpenghasilan rendah (Bennet, 1998; Ledgerwood, 1999). Salah satu alasan adalah karena orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan yang berat dalam usahanya memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan konvensional (Ledgerwood, 1999).

Hal ini berarti bahwa selain memberikan akses kepada orang-orang berpenghasilan rendah terhadap pengadaan pinjaman, ketrampilan dan kepercayaan diri mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu pendekatan keuangan mikro bukan hanya pendekatan minimalis yang hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja, akan tetapi merupakan pendekatan terpadu yang juga menawarkan jasa-jasa lain (Ledgerwood, 1999). Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, mengembangkan dan memperkuat kapasitas institusional system keuangan lokal dengan menemukan cara yang terbaik untuk dapat meminjamkan uang kepada keluarga miskin dengan biaya minimum (Ledgerwood, 1999, Morduch, 1999, Morduch, 2000, Otero, 1999, Snow, 1999).

Data yang dikumpulkan dan diolah merupakan data panel dan metode yang digunakan adalah metode Ordinary Least Square (OLS) yang gunanya untuk melihat pengaruh dari variable bebas terhadap variable terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor akses dan tabungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pinjaman yang diberikan pada usaha kecil, sedangkan faktor roa, rentabilitas dan dummy propinsi memberikan pengaruh yang kecil atau dikatakan tidak signifikan.

Bagaimana perspektif koperasi dalam syariah Islam ? Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*, koperasi tipe kemitraan modern Barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan, telah dipraktikkan oleh umat Islam hingga

abad 18. Baik bentuk syirkah Islam dan syirkah modern, sama dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual berdasarkan hukum negara.

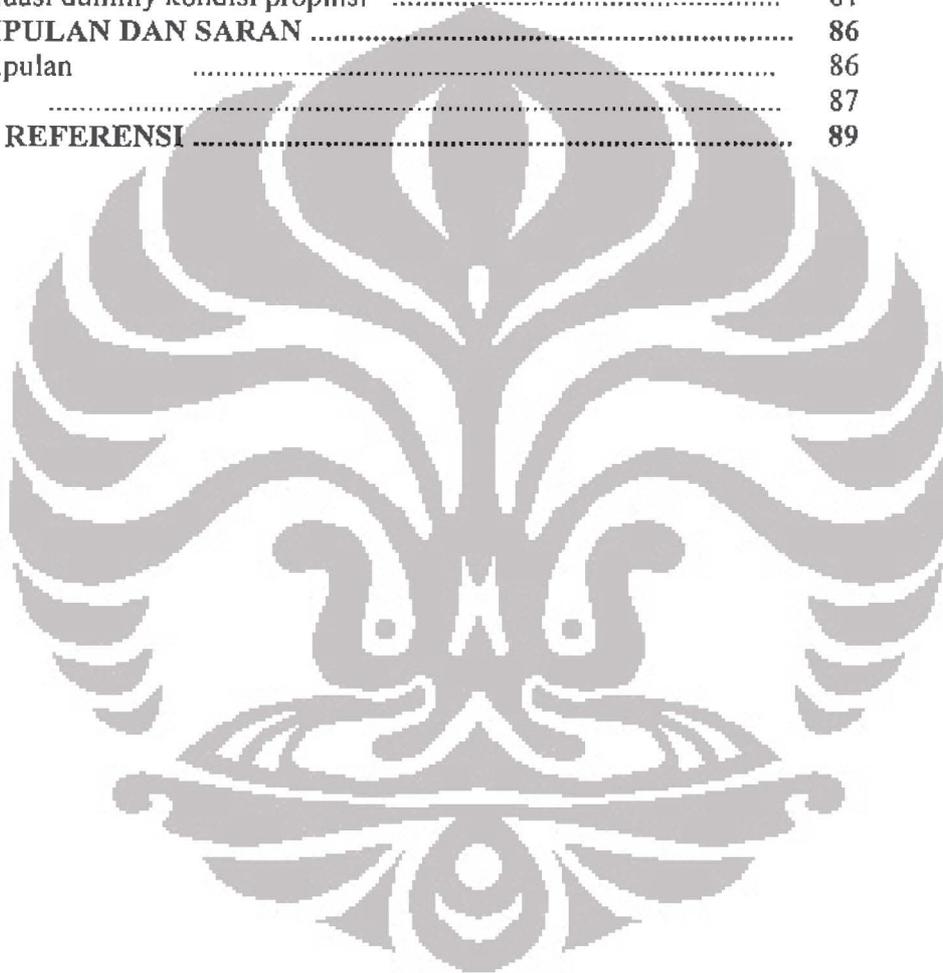
Menurut Rahman, persyaratan kemitraan kedua tipe koperasi tersebut sama, kecuali pada praktik riba (sistem bunga), karena unsur penetapan tingkat pengembalian (riba) yang ada pada koperasi konvensional sangat tidak dibenarkan dan hukumnya haram, sehingga koperasi yang menggunakan bunga tidak dibenarkan dalam Islam.

Koperasi syar'iah (syirkah Islam) terbebas sama sekali dari unsur itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai koperasi –yang tampak dalam jatidirinya (Co-operative Identity) sebagaimana dirumuskan kongres International Co-operative Alliance (ICA) ke-100 di Manchester, Inggris, September 1995 dan disusun kembali Prof. Dr. Ian Mac Pherson berupa 7 nilai: menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan dan kejujuran; dan 7 prinsip operasional, yaitu keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemerdekaan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerja sama antar koperasi, dan kepedulian terhadap lingkungan– secara umum selaras dan serasi dengan nilai-nilai syari'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian	5
1.4 Pembatasan Masalah.....	6
1.5 Kerangka Pemikiran	6
1.6 Hipotesis Penelitian	7
1.7 Metode Penelitian.....	8
1.8 sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Mikro kredit	11
2.2 UKM dan kontribusinya	14
2.3 Beberapa penelitian mengenai Lembaga Keuangan Mikro.....	16
2.3.1 Lembaga Keuangan Mikro Indonesia	22
2.3.2 Koperasi dalam perpektif syariah	23
2.4. Pengukuran kesehatan Lembaga Keuangan Mikro.....	27
3. METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Tehnik Pengumpulan Data	34
3.1.1 Data dan sumber data	34
3.1.2 Tahapan pengolahan data	34
3.2 Deskripsi variabel operasional penelitian	35
3.2.1 Variabel aksesibilitas pelayanan terhadap UKM	36
3.2.2 Variabel internal performance LKM (IP_LKM)	36
3.2.3 Variabel Dummy propinsi	38
3.2.4 Variabel pinjaman yang diberika pada UK	39
3.3 Deskripsi sistematika dan analisis pembahasan	39
3.3.1 Deskripsi statistik data	39
3.3.1.2 Deskripsi statistik untuk kelompok propinsi kaya SDA	40
3.3.1.3 Deskripsi statistik untuk kelompok propinsi kaya SDM	42
3.3.1.4 Deskripsi statistik untuk kelompok propinsi terisolasi	43
3.3.1.5 Deskripsi statistik untuk kelompok propinsi lain-lain	45
3.3.1.6 Deskripsi statistik antar kelompok	46
3.4 Pemodelan data	47
3.4.1 Teknik Ekonometrika	48
3.4.1.1 Regresi Linier berganda	48
3.4.1.2 Estimasi parameter Model Penelitian	50
3.4.1.3 Pengujian heteroskedastisitas	52
3.4.1.4 Pengujian Multikolinieritas	54
3.4.1.5 Koefisien determinasi	56

3.3.1.6 Koefisien Korelasi	57
3.5 alur tahap penyelesaian	58
4. PEMBAHASAN.....	59
4.1 Pemodelan data	59
4.2 Pengujian model dengan metode OLS	60
4.2.1 Analisis Regresi data panel	60
4.3 Evaluasi akses koperasi terhadap usaha kecil	74
4.3.1 Aksesibilitas	74
4.3.2 Return on Asset	76
4.3.3 Persentasi Rentabilitas	77
4.3.4 Rasio tabungan	78
4.3.5 Evaluasi dummy kondisi propinsi	81
5. KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR REFERENSI	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikiran Penelitian	7
Gambar 3.1. Alur tahap penyelesaian	58
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot model awal	62
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot model awal	63
Gambar 4.3 Grafik Normal P-plot dengan variabel Ln	64
Gambar 4.4 Grafik Scatterplot data Ln	66
Gambar 4.5 Grafik Normal P- plot model 2 (a)	67
Gambar 4.6 Grafik Scatter plot model 2 (a)	69
Gambar 4.7 Grafik Normal P- plot model 2 (b)	70
Gambar 4.8 Grafik scatter plot model 2 (b)	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Data KSP/USP Seluruh Indonesia	92
Lampiran 2	: Hasil Regresi Model Awal	95
Lampiran 3	: Hasil Regresi Model Di Ln	96
Lampiran 4	: Hasil Regresi Model 2a	97
Lampiran 5	: Hasil Regresi Model 2b	98



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Perkembangan Usaha Kecil Menengah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar, berdasarkan data Menekop dan ukm pertumbuhan UKM sepanjang tahun 2003- 2005 tercatat rata-rata mencapai 12% per tahun. Jumlah UKM diseluruh Indonesia hingga 2006 berkisar \pm 44 juta unit UKM. Menurut Badan Pusat statistik (BPS) tahun 2006 dikemukakan bahwa jumlah perusahaan seluruhnya di Indonesia adalah 44,69 juta. Dari jumlah ini yang tergolong Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 99,9%. Jumlah perusahaan-perusahaan besar hanya 4.469 buah atau 0,01%, tetapi andilnya dalam pembentukan PDB sebesar \pm 43%- 46% sedangkan jumlah UKM yang 99,99% dari total jumlah perusahaan di Indonesia hanya mampu menghasilkan 54% - 57% dari PDB. Sehingga meskipun jumlah UKM sangat besar namun output yang disumbangkan sangat tidak optimal.

Ditinjau dari sudut penyerapan angkatan kerja, UKM menampung 99,44% dari angkatan kerja yang ada. Dengan pertumbuhan rata-rata dalam penyerapan tenaga kerja per tahun yaitu 2,91%. Sedangkan usaha besar malah sebaliknya dimana penyerapan tenaga kerjanya makin lama makin berkurang tiap tahunnya. Ditinjau dari sudut output dan penyerapan tenaga kerja dan efeknya terhadap pengentasan kemiskinan, maka pengembangan UKM menjadi salah satu agenda yang digalakkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data BPS tahun 2002 masalah utama yang dihadapi oleh UKM adalah kurangnya modal untuk berkembang karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum dan manajemen yang sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutus kredit) disamping kesulitan akan bahan baku serta faktor manajemen dan pemasaran. Menurut Robinson (2002) dalam bukunya *The vicious cycle of poverty* salah satu kunci untuk lepas dari kemiskinan terletak pada peningkatan produktivitas usaha melalui Usaha Kecil Menengah dengan cara perbaikan peningkatan pelayanan

LKM yaitu kemampuan pembiayaan dan memperkuat LKM dalam pendampingan usaha pada para nasabah.

Salah satu kendala bagi LKM yang mampu menjangkau sebagian besar UKM yang belum bankable yaitu adanya keterbatasan modal sehingga besar kredit yang diberikanpun terbatas. Menurut Djoko Retnadi, Senior Economist from The Indonesia Economic Intelligence porsi kredit UKM per Desember 2006 telah mencapai porsi 51,60% dari total kredit perbankan yang telah berjumlah Rp792,2 triliun dan meskipun jumlah UMKM di tahun 2005 mencapai sekitar 44 juta unit usaha, namun hanya sekitar 12% saja yang baru mendapatkan kredit bank, sedangkan sisanya dianggap belum bankable.

Akhir tahun 1990-an Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah berkembang, hingga tahun 2006 tercatat jumlah LKM yang tumbuh sebesar ± 138.000 unit. Ledgerwood (1999) menegaskan bahwa tujuan LKM sebagai organisasi pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang tidak terlayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha yang ada, memberdayakan kelompok masyarakat miskin serta mendorong pengembangan usaha baru.

LKM memiliki karakter pendampingan yang memadai sebagai salah satu cara pengamanan kredit, sehingga lebih dekat dengan nasabah di banding bank komersial biasa. Lembaga Keuangan Mikro mempunyai karakter khusus yang sesuai dengan konstituennya seperti : 1) terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama simpanan dan pinjaman; 2) diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah; dan 3) menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana (Chotim dan Handayani, 2001). Jenis LKM sendiri lebih banyak didominasi oleh Unit Simpan Pinjam (USP), namun dari aspek besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh perbankan yaitu BRI Unit dan BPR. Hal ini terjadi karena skim kredit yang ditawarkan oleh BRI Unit dan BPR lebih besar daripada USP.

Kondisi eksternal yang dihadapi oleh LKM adalah aspek kelembagaan yang antara lain mengakibatkan bentuk LKM beraneka ragam. BRI Unit dan BPR sebagai bagian dari LKM secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada

ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia, sehingga LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjamin kepercayaannya karena merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sedangkan pada LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam dan Baitul mall tanwil segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan bagi LKM lainnya yang berbentuk Bank Kredit Desa, LDKP maupun lembaga non-pemerintah lainnya tidak jelas kelembagaan dan pembinaannya.

Padahal, fungsi LKM tidak berbeda dengan lembaga perbankan formal dalam hal sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang didalamnya juga mengemban kepercayaan dari nasabah atau anggota yang menempatkan dananya. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. Padahal secara fakta LKM mempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan UKM.

Aktivitas keuangan mikro hanya akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rakyat miskin manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat berlanjut (Ismawan, 2002). Menurut Riza Primahendra dari Bina swadaya performance dari LKM akan berpengaruh terhadap performance bisnis sektor riil, sehingga jika suatu LKM mempunyai performa yang baik dan sehat maka akan mendorong pertumbuhan bisnis sektor riil dari UKM binaanya. Kesehatan internal LKM dan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada UKM akan sangat mempengaruhi pelayanan dan kesehatan dari LKM disamping prosedur peminjaman dan jumlah LKM yang tersedia.

Kebanyakan LKM seperti LKM milik pemerintah, LKM proyek, maupun LKM-LSM menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan aktivitas mereka. Sebab ketidakmampuan menjaga keberlanjutan aktivitas organisasi mereka dapat bermacam-macam mulai dari ketergantungan terhadap support baik dari pemerintah dan donor, hanya merupakan proyek yang memang didesain untuk sementara waktu saja, ketiadaan sistem keuangan mikro yang memadai serta ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar keuangan mikro yang ada.

Di Indonesia Lembaga keuangan mikro yang sudah mengakar dan menjadi andalan adalah koperasi yang dianggap sebagai lembaga yang oleh banyak kalangan diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia bahkan menjadi bagian dari Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 33 ayat 2. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2001 dilihat dari besarnya kredit yang disalurkan maka koperasi (KSP dan USP) masing-masing menyumbang sebesar 46 % dan 31 % terhadap total kredit mikro. Ditinjau dari jangkauan pelayanan memang koperasi yang paling dominan baik dari segi titik pelayanan (unit lembaga) maupun nasabah (peminjam), kemudian BRI menempati urutan kedua dalam jumlah nasabah dan BKD dalam titik pelayanan.

Jika diamati lebih lanjut segmen kredit mikro papan atas memang sebagian terbesar ditangani BRI meskipun rata-rata Koperasi dan lembaga per Kreditan lain nampaknya benar-benar melayani lapisan paling bawah dari pelaku kegiatan produktif karena secara rata-rata menangani peminjam dibawah Rp. 1 juta. Berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Wahyudi Sutopo (2004) dimana dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa faktor akses, kredit, nasabah, roa, rentabilitas dan tabungan mempunyai pengaruh yang positif pada kontribusi UKM yang merupakan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.2 Perumusan masalah

Salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah mendapatkan akses permodalan sehingga LKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan kontribusi UKM, namun perkembangan LKM sendiri masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti kemandirian dan sustanabilitas sehingga berpengaruh pada kesanggupan penyediaan modal.

Aktivitas keuangan mikro sendiri hanya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap UKM manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat terus berkelanjutan (Ismawan, 2002). Suatu LKM mempunyai performa

yang baik dan sehat maka akan mendorong pertumbuhan bisnis sektor riil dari UKM binaanya. Kesehatan internal LKM dan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada UKM akan sangat mempengaruhi pelayanan dan kesehatan dari LKM.

Dengan meningkatnya jumlah UKM maka dibutuhkan jumlah bantuan modal yang makin tinggi yang bisa disediakan oleh lembaga keuangan mikro (koperasi). Kenyataannya jumlah dana yang dikucurkan ke UKM pada masing-masing propinsi di Indonesia umumnya konstan dan hanya di propinsi di pulau Jawa yang besarnya mengalami kenaikan. Oleh sebab itu perlu diteliti bagaimanakah pengaruh faktor akses pelayan dan kesehatan LKM khususnya koperasi terhadap penyaluran kredit yang siap diberikan. Apabila faktor akses dan kesehatan LKM berpengaruh terhadap tingkat pinjaman yang diberikan kepada UKM artinya kinerja LKM saat ini belum memadai dalam melayani dan memaksimalkan potensi UKM.

Berdasarkan masalah diatas pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Apakah faktor pelayanan dan kesehatan Koperasi berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan koperasi ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia ?
2. Seberapa besarkah faktor pelayanan dan kesehatan Koperasi berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan koperasi ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia ?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap koperasi

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah faktor akses dan kesehatan Koperasi (ROA, rentabilitas, tabungan) berpengaruh terhadap pinjaman yang diberikan koperasi ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia ?
2. Mengetahui besar pengaruh faktor akses dan kesehatan Koperasi (ROA, rentabilitas, tabungan) terhadap pinjaman yang diberikan koperasi ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia ?

3. Mengetahui kaitan antara koperasi dengan nilai-nilai ekonomi syariah

1.4 Pembatasan masalah

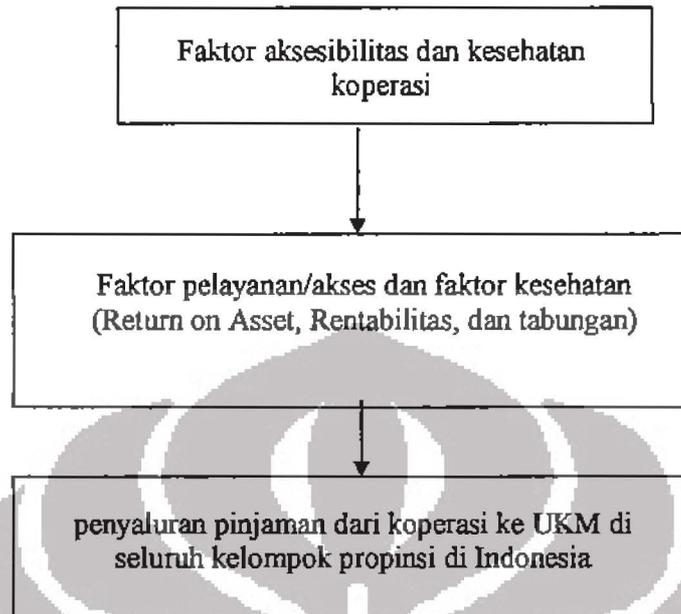
Dikarenakan masih banyaknya lembaga keuangan mikro (LKM) yang tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum menyebabkan sulitnya penghitungan secara pasti dan akurat jumlah LKM yang tersebar di seluruh Indonesia dan pendataannya, sehingga penelitian ini dilakukan hanya kepada koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam (KSP/USP) yang tersebar diseluruh Indonesia yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang tercatat dan berbadan hukum. Data KSP/USP yang digunakan meliputi periode Januari 2003 sampai dengan Maret 2005.

Pengukuran efektivitas eksternal lembaga keuangan mikro dilakukan dengan mengukur kemudahan akses, rasio kredit, dan rasio nasabah. Sedangkan untuk kinerja internal dilihat dari kemandirian usaha dengan indikator ROA, rentabilitas dan rasio tabungan yang dihimpun oleh masyarakat berdasarkan kriteria penilaian koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian koperasi dan UKM nomor: 129/KEP/M.KUKM/XI/2002.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis tentang aksesibilitas dan kesehatan koperasi yang akan mempengaruhi penyaluran pinjaman dari koperasi ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia. Faktor rasio aksesibilitas dan faktor kesehatan koperasi seperti Return on asset, persentase kredit dan rasio tabungan terhadap besarnya penyaluran pinjaman dari koperasi ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia.

Besarnya penyaluran pinjaman merupakan variable yang dipengaruhi oleh factor aksesibilitas dan kesehatan koperasi. Besarnya penyaluran pinjaman mencerminkan kemampuan koperasi dalam melayani nasabahnya. Faktor pelayanan/aksesibilitas koperasi menggambarkan kemudahan masyarakat dalam menjangkau koperasi dan mengakses fasilitas yang diberikan oleh koperasi tersebut.

Gambar 1.1**Kerangka pemikiran penelitian**

Berdasarkan penilaian tentang "Otonomi dan Kemandirian Koperasi" yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 yang memberikan pedoman dalam rangka penilaian terhadap kesehatan suatu koperasi digunakan penilai kriteria kualitas kesehatan koperasi yang dianalisis meliputi Return on asset (ROA), rentabilitas koperasi dan rasio tabungan yang semuanya menggambarkan kemampuan koperasi dalam mempertahankan kestabilan keuangannya dalam rangka kesinambungan operasional dan kehidupan koperasi itu sendiri.

Faktor akses dan kualitas kesehatan dari koperasi ini diharapkan akan mampu mempengaruhi aktivitas koperasi keseluruhan dalam menunjang produktivitas UKM ditiap propinsi, dikarenakan umumnya para pekerja UKM adalah penduduk miskin maka peningkatan kuantitas dan pengembangan UKM-UKM ini akan mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat miskin terutama yang melakukan wirausaha.

1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H0: Diduga faktor rasio aksesibilitas dan kesehatan (return on asset, rentabilitas dan tabungan) koperasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pinjaman ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia ?
- H1: Diduga faktor pelayanan rasio aksesibilitas dan kesehatan (return on asset, rentabilitas dan tabungan) berpengaruh terhadap penyaluran pinjaman ke UKM di seluruh kelompok propinsi di Indonesia ?

1.7 Metode Penelitian

Untuk menganalisa pengaruh faktor akses dan kesehatan Koperasi terhadap tingkat pinjaman yang diberikan pada ukm, penelitian ini menggunakan teknik ekonometrika yaitu analisis regresi, khususnya dengan metode metode kuadrat terkecil biasa atau OLS (*Ordinary Least Square*). Dengan model ini dapat dianalisa hubungan antar variable yakni diasumsikan ada hubungan linier yang terbentuk antara faktor-faktor fundamental yang diteliti dengan besar kredit yang diberikan oleh koperasi terhadap UKM. Variabel-variabel tersebut meliputi aksesibilitas (akses), return on asset (roa), rentabilitas (rent), tabungan (tab) dan pengaruhnya terhadap besarnya pinjaman yang siap diberikan pada tiap propinsi dan selanjutnya perlu diketahui juga seberapa besar keterkaitan variable akses dan kesehatan Koperasi tersebut terhadap besarnya penyaluran pinjaman tersebut ke ukm.

Sebagaimana diketahui, penelitian ini menitik beratkan pada penelitian data sekunder gabungan data *time series* dan data *cross section* atau sering disebut juga data panel (*pooled data*). Data yang telah terbentuk menjadi *pooled data* kemudian diregresikan secara linier atau disebut juga *pooled regression* (Gujarati, 2003).

Seluruh data yang diambil merupakan data sekunder baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Sumber data berasal dari aspek urusan pengendalian dan pengembangan simpan pinjam kementerian koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan dari beberapa situs ekonomi. Data penelitian ini terdiri atas data jumlah KSP (koperasi simpan pinjam)/USP (unit simpan pinjam),

simpanan/tabungan yang diterima, pemberian pinjaman, sisa hasil usaha dan total asset. Sedangkan indikator dummy berguna untuk mengklasifikasikan kondisi propinsi-propinsi di Indonesia agar dapat dibedakan pengaruhnya terhadap kinerja LKM.

1.8 Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini diuraikan berbagai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai lembaga keuangan mikro, hal-hal yang menghambat dan mempengaruhi pertumbuhannya, hubungan dan kontribusinya terhadap usaha kecil.

BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan, data dan sumber data yang digunakan, rancangan model penelitian, penjelasan variable penelitian, metode analisi pengujian data dan pada bagian akhir disajikan serta diagram alur penelitian untuk menggambarkan proses tahapan pengujian data penelitian sampai dengan menentukan hubungan dari masing-masing variabel penelitian dalam membentuk model estimasi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil pengolahan data dengan menggunakan dasar teori yang ada di BAB II dan menggunakan metode pengolahan sesuai dengan alur yang diuraikan. Kemudian dilakukan analisis terhadap hasil pengujian data statistik dengan mengaitkannya kepada teori yang mendasarinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya kemudian dibuat kesimpulan penelitian dan saran untuk studi diwaktu yang akan datang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mikro kredit

Surat Al Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

" ... *kaylaa yakuuna duulatan bainal aghniyaa i minkum ...*"
"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". Alquran sendiri telah memperingatkan dan menyatakan bahwa 'harta' yang dikiaskan sebagai uang atau modal bukan hanya berputar dikalangan pengusaha besar saja namun juga harus dapat dimanfaatkan oleh kalangan lain dalam hal ini pengusaha kecil. Hal ini akan mempengaruhi dan membuat struktur perekonomian suatu negara jauh lebih kuat dan stabil. "Kalian mendapat kemenangan dan kecukupan berkat orang-orang lemah di antara kalian," demikian Rasulullah Saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Abu Ad-Darda'.

Robinson (2000) menyatakan pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program termasuk dalam penyediaan pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, KB dan melalui pinjaman mikro. Menurut World Bank Pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu cara yang ampuh dalam pengentasan kemiskinan, namun pinjaman ini hanya bermanfaat jika ditujukan untuk masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat berpenghasilan rendah (*lower income*) yang memiliki penghasilan namun tidak banyak.

In low-income countries, borrowers at that level tend to be among the "better off" poor or are even slightly above the poverty line. Expanding financial services in this way can foster economic efficiency—and, perhaps, economic growth along the lines (Bencivenga and Smith, 1991) but it will do little directly to affect the vast majority of poor households.

Selanjutnya Robinson (2002) menyatakan, "*Financial services that are widely available in rural areas and in low income urban neighborhood helps the*

poor improve their financial security and allow them to take advantage of business opportunities and facilitate the growth of their enterprises."

Hasil penelitian dari Gulli H (1998) didapatkan, "*impact of micro credit programs in general: positif Impact on welfare indicators such as client income level, asset accumulation and consumption.*" Berdasarkan penelitian Khandker (2005), "*Microfinance programs were able to reduce poverty through increasing individual and household income levels as well as improving healthcare, nutrition, education, and helping to empower women. For example, standard of living increases, which help to eradicate extreme poverty and hunger, have occurred at both the individual and household levels as a result of microfinance programs.*

Sebagaimana diketahui bahwa pinjaman mikro dapat digunakan membantu UKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dan karakteristik UKM jika dilihat dari aspek pendapatan lebih mendekati kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pasar kredit dikatakan sebagai suatu pasar yang tidak sempurna secara struktural dikarenakan terdapat informasi yang tidak sempurna (Besley, 1994). Ketidakefektifan itu tumbuh dari sifat dasar yang diperjual belikan di pasar kredit. Kredit merupakan suatu barang yang istimewa karena kredit mensyaratkan pembayaran dalam jangka waktu yang lebih lama dengan pelunasan yang tidak selalu dilakukan oleh peminjam sehingga diperlukan sanksi eksternal untuk menegakkan klaim.

Besley berpendapat bahwa kemauan pemberi pinjaman untuk meminjamkan uang kepada peminjam tertentu bergantung sepenuhnya pada ketersediaan informasi yang cukup tentang keandalan peminjam dan pada keyakinan bahwa si peminjam akan dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut dengan bijaksana (Besley, 1994). Pemberi pinjaman dan peminjam dalam pasar seperti ini tidak memiliki informasi yang sama sehingga tercipta ketidakseimbangan antar kedua pelaku tersebut.

Secara praktis dapat dikatakan keberadaan informasi yang tidak sempurna semacam ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa para pemberi pinjaman memilih untuk tidak melayani orang-orang tertentu. Konsep utama paradigma informasi yang tidak sempurna (*asymmetric information*) meliputi moral hazard, kesalahan pemilihan (*adverse selection*) dan pencatutan kredit (*credit rationing*).

Penelitian Braverman dan Guasch menunjukkan bahwa masalah kesalahan pemilihan dan moral hazard jauh lebih banyak dialami oleh bank komersial dibandingkan LKM, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa tingkat kegagalan pelunasan pada bank komersial jauh lebih tinggi daripada LKM. (Braverman & Guasch, 1986, Braverman & Guasch, 1989). Menurut mereka hal ini dikarenakan informasi yang tersedia untuk LKM lebih ekstensif, akurat dan mudah diperoleh dibandingkan bank komersial. Herath (1996) menyatakan masalah informasi yang tidak simetris tidak terlalu serius pada pasar kredit pedesaan dikarenakan sifat dasar pasar yang kedaerahan dan ketersediaan informasi yang lebih luas memiliki efek mengurangi resiko.

Berdasarkan data Bank Indonesia, meski di awal kuartal I 2006 kredit perbankan secara total mengalami penurunan, namun kredit ke sektor UMKM justru mengalami pertumbuhan positif. Per Februari 2006, porsi kredit UMKM oleh perbankan nasional mencapai 52,2 % atau naik 28,1% dibanding bulan yang sama tahun 2005.

Disamping itu BI juga mendorong lembaga keuangan mikro (LKM) dan BPR untuk mengambil peran yang sulit dimainkan oleh bank umum. Keberadaan LKM yang relatif mampu menjawab kesulitan tersebut ternyata selaras dengan perkembangan UKM. Walaupun kontribusi dalam pembiayaan dalam skala nasional masih kecil dibandingkan dengan peran lembaga perbankan formal, namun terdapat potensi yang besar yang dapat dimanfaatkan LKM untuk memperbesar perannya dalam pembiayaan UKM yang ditunjukkan dengan masih banyak jumlah UKM yang belum memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan serta masih sulitnya akses pembiayaan dari lembaga perbankan, sehingga tumpuan terbesar adalah LKM.

2.2 UKM dan kontribusinya dalam perekonomian

Meninjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia tahun 2006 dilihat dari pelaku ekonomi berdasarkan skala usaha secara keseluruhan dari 44,69 juta unit usaha yang ada sebesar 43 juta (96,21%) merupakan usaha mikro, 1,62 juta (3,63%) merupakan usaha kecil dan 68 ribu (0,15%) adalah usaha menengah (sumber BPS 2006). Dan bila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah lebih dari 98% dari total unit usaha (Tambunan, 2002). Peranan Ekspor UKM terhadap ekspor non migas tercatat 19,9 persen di tahun 2003 (BPS, Maret 2004). Menyadari realitas ini memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity*.

Menteri Negara Koperasi dan UKM (Menekop & UKM) mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai hasil perkembangan Indikator Makro UKM tahun 2007 UKM menyumbang 53,3 persen atau sebesar Rp1.778,7 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2006 yang mencapai Rp3.338,2 triliun. Bila dirinci berdasarkan skala usaha, sumber pertumbuhan PDB nasional tahun 2006 sebesar 5,5 persen berasal dari kontribusi UKM sebesar 3,1 persen dan UB sebesar 2,4 persen. Sedangkan jumlah populasi UKM pada 2006 mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang atau 96,18 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah usaha kecil sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. UKM mempunyai peran penting sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan di negara-negara berkembang (Daniels, 1999, Mead, 1999, Mead dan Liedholm, 1998) selain itu UKM mampu menyerap tenaga kerja relatif besar, yang mana penyerapan tenaga kerja tersebut selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (supratino dan Yuwono, 1994, Andadari dan Sulandjari, 2000).

Dalam hadist Rasulullah pernah berkata, "*Kalian mendapat kemenangan dan kecukupan berkat orang-orang lemah di antara kalian.*" (Hadist Riwayat Abu Daud melalui Abu Ad-Darda). Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya UKM

yang notabene dilakukan oleh masyarakat miskin dapat memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya semua itu akan berimbas pada perekonomian negara. Menurut Ismawan (2003) Kelompok usaha mikro sangat strategis karena: (1) mempunyai kegiatan ekonomi produktif (2) secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil (3) efektif untuk mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri.

Pemerintah melalui kementerian koperasi dan UKM memberikan perhatian yang besar terhadap sektor ini dengan tujuan agar UKM bisa lebih berdaya. Lebih dari itu UKM di Indonesia dianggap memiliki peran penting karena merupakan sarana untuk mempromosikan usaha pribumi dan karenanya merupakan sarana untuk mendistribusikan kembali aset kepada etnis-etnis yang ada (Berry, Rodriguez & Sandee, 2001 hal: 377).

Penelitian Pitt dan Khanker (1998) di Bangladesh dengan program yang dilaksanakan oleh Grameen Bank menunjukkan beberapa penemuan seperti: adanya dampak positif dalam total pengeluaran perkapita perminggu bagi para peserta program (tenaga kerja perempuan dan perempuan yang tidak memiliki modal). Dampak yang sangat positif bagi peserta program yaitu meningkatnya jumlah anak perempuan yang bersekolah. Selain itu dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa program kredit dapat mengubah perilaku dan karakteristik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah double different antara rumah tangga eligible dan non eligible yang mengikuti dan yang tidak mengikuti program microfinance. Pengukurannya dibedakan antara peminjam laki-laki dan perempuan

Disamping itu Wie (1992) menyatakan dengan adanya UKM diseluruh pelosok negeri, maka promosi UKM ini akan mendorong terciptanya pendistribusian kegiatan industri secara geografis akan lebih merata. Dengan demikian, penumbuhan usaha kecil menjadi suatu kebijakan strategis dan efektif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk Indonesia, UKM yang secara geografis terkluster diperkirakan telah menjadi tempat persemaian untuk berkembangnya industri (Weijland, 1992).

Dibeberapa daerah kebijakan kluster telah menunjukkan keberhasilan dengan berkurangnya kemiskinan dan berkembangnya industri. Melalui metode pengembangan jejaring perdagangan dan kluster berbagai masalah pemasaran dan teknologi akan dapat diselesaikan.

2.3 Beberapa Penelitian mengenai Lembaga Keuangan Mikro

Pada Microcredit Summit 1997 in Washington, ada 4 prinsip dalam menjalankan *microfinance institution*. Prinsip ini adalah mencapai masyarakat miskin, mencapai dan memberdayakan perempuan, membangun institusi keuangan yang berkelanjutan dan pengukuran dampak nyata dari microfinance. Definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, *“programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families”* (Kompas, 15 Maret 2005).

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro adalah kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*).

Kemudahan akses kepada lembaga keuangan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh UKM. Menurut Tambunan (2002:74) terdapat hubungan yang positif antara (1) lokasi bank (2) persyaratan terlalu berat (3) urusan administrasi yang bertele-tele dan (4) kurangnya informasi mengenai skim-skim perkreditan, sehingga dengan adanya keempat faktor ini membuat makin sulitnya para

pengusaha kecil mendapatkan bantuan permodalan dalam pengembangan usaha mereka.

Ghate (1992b) meneliti mengenai hubungan antara LKM dengan bank komersial berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing. Dia menekankan bahwa ketika bank komersial hanya melayani satu tujuan (investasi tetap) permintaan akan kredit mikro akan meningkat untuk memenuhi tujuan pelengkap (modal kerja). Apabila sub-pasar keuangan dirangkai berdasarkan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan formal (bank komersial) secara menurun dari satu ujung ke ujung yang lain, maka salah satu ujung rangkaian itu akan penuh oleh lembaga keuangan formal (bank-bank komersial) sementara ujung satunya akan penuh oleh lembaga keuangan informal (lembaga keuangan mikro). Dia berpendapat pada bagian tengah rangkaian tersebut biasanya kedua lembaga itu saling bersaing meski kadang keduanya juga saling melengkapi sehingga keduanya dapat tumbuh bersama secara penuh.

Bank komersial lebih mampu memenuhi kebutuhan pinjaman dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama karena mereka lebih bergantung pada pengumpulan deposito dan mereka memiliki skala lingkup ekonomi yang lebih luas, namun bank komersial juga harus mematuhi berbagai peraturan ketat yang ditetapkan yang berhubungan dengan ketentuan likuiditas, pagu pinjaman, tingkat bunga, serta prosedur-prosedur yang birokratis. Sedangkan LKM mempunyai kelenturan prosedur kredit penyediaan pinjaman dalam jumlah kecil dalam jangka pendek sehingga disimpulkan kedua sektor tersebut saling melengkapi (Ghate 1992b).

Studi kasus di Korea selatan oleh (Cole & Park, 1983) menjelaskan hubungan yang saling melengkapi dimana industri skala besar dapat memenuhi kebutuhan investasi tetapnya seperti mesin, peralatan dan pabrik melalui bantuan bank-bank komersial, namun sebagian modalnya dipenuhi melalui bantuan LKM .

Dalam pelaksanaannya selain sebagai perantara keuangan beberapa LKM juga menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri dan pelatihan pengetahuan keuangan dan kemampuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki berpenghasilan rendah

(Bennet, 1998, Ledgerwood, 1999). Salah satu alasan adalah karena orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan yang berat dalam usahanya memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan konvensional (Ledgerwood, 1999).

Hal ini berarti bahwa selain memberikan akses kepada orang-orang berpenghasilan rendah terhadap pengadaan pinjaman, ketrampilan dan kepercayaan diri mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu pendekatan keuangan mikro bukan hanya pendekatan minimalis yang hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja, akan tetapi merupakan pendekatan terpadu yang juga menawarkan jasa-jasa lain (Ledgerwood, 1999). Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, mengembangkan dan memperkuat kapasitas institusional system keuangan lokal dengan menemukan cara yang terbaik untuk dapat meminjamkan uang kepada keluarga miskin dengan biaya minimum (Ledgerwood, 1999, Morduch, 1999, Morduch, 2000, Otero, 1999, Snow, 1999).

Adam dan Fitchett (1992) menekankan bahwa LKM pada umumnya merupakan sebuah kesatuan dari tata kelola yang dinamis, inovatif dan lentur sesuai dengan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal. Kelenturan dapat tercapai karena jumlah aturan yang tidak banyak, berukuran kecil, dan beroperasi diwilayah yang terbatas seperti ceruk pasar (market niche) tertentu dimana dimungkinkan untuk mengenal peminjam secara pribadi (Ghate, 1988).

Tingkat bunga yang dibebankan oleh LKM berorientasi pasar dan bertujuan memenuhi biaya operasional maupun keuangan yang didasarkan atas asumsi bahwa orang-orang miskin bersedia mengeluarkan biaya untuk memperoleh akses dan kenyamanan. Kesimpulan dari Wai (1992) tata kelola LKM lentur, adaptif terhadap perubahan ekonomi, inovatif, memerlukan biaya transaksi yang rendah baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman dan menghasilkan tingkat pengembalian pinjaman (repayment rate) yang tinggi.

Ada empat karakteristik yang menjelaskan mengapa biaya transaksi LKM lebih rendah dari bank-bank komersial (Ghate, 1992b, Timberg and Aiyar, 1984). Pertama, LKM memiliki informasi yang lebih baik tentang para nasabahnya dibandingkan dengan bank komersial, sehingga biaya informasi relatif lebih sedikit. Kedua, biaya administrasi yang dikeluarkan LKM lebih sedikit karena

pegawai LKM dibayar relatif lebih rendah (karena tidak berpendidikan tinggi) dibandingkan dengan bank-bank komersial, skala usaha yang tidak besar, serta pekerjaan administrative yang sederhana. Ketiga, tingkat bunga LKM tidak diatur secara khusus sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan pasar. Akibatnya kompetisi non harga dapat dapat ditekan hingga tingkat yang optimal. Keempat, LKM tidak memiliki kewajiban pencadangan modal (reserve requirements) seperti bank komersial.

Bentuk LKM sendiri dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang. Menurut Ismawan, Bambang (2003) dalam otonomi daerah LKM berperan untuk (1) mendukung pemerataan pertumbuhan (2) mengatasi kesenjangan kota dan desa (3) mengatasi kesenjangan usaha besar dan kecil (4) mengurangi capital flow dari desa ke kota maupun dari daerah ke pusat (5) meningkatkan kemandirian masyarakat daerah.

Siamat juga menjelaskan peningkatan peran dalam LKM dalam perekonomian modern dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan dikalangan menengah menaikkan kemampuan masyarakat untuk menabung.
2. Perkembangan industri dan teknologi. Semakin banyak industri yang berdiri dan semakin canggih teknologi yang digunakan akan meningkatkan kebutuhan dana investasi disektor industri dimana peningkatannya sejalan dengan perkembangan teknologi dan industri.
3. Dominasi instrument keuangan. Lembaga keuangan memiliki karakteristik tersendiri guna menjangkau konsumennya melalui instrument keuangan yang beraneka ragam.
4. Skala ekonomi produk dan jasa-jasa. Dengan kombinasi sumber-sumber untuk menciptakan berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya produksi perunit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan menjadi rendah.

5. Jasa-jasa likuiditas. Lembaga keuangan menciptakan dan menjual produk / jasa-jasa likuiditas.
6. Keuntungan jangka panjang. Lembaga keuangan mendapat spread antara biaya dana lembaga keuangan dengan tingkat bunga pinjaman.
7. Resiko lebih kecil. Pengawasan dan peraturan yang ketat terhadap lembaga keuangan membuat resiko menjadi kecil.

Sumodiningrat (2003) Pemberdayaan LKM merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan UKM yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Selain itu Gunawan juga menyatakan keberadaan lembaga keuangan mikro diharapkan mampu mencakup 2 profile antara institusi sosial yang berpihak pada masyarakat miskin tanpa memandang bankable atau tidak dengan institusi komersial yang memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran dana keuangan. Singkatnya LKM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang dianggap sebagai tujuan pembangunan yang paling penting (World Bank, 2000)

Rudjito (2003) LKM harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (1) mempunyai jaringan kerja yang kuat (2) Fungsi sebagai *payment gateway* berjalan baik (3) memahami kebutuhan pemerintah daerah dalam bisnis masyarakat setempat. Berbagai fenomena di atas menyebabkan LKM menjadi pilihan bagi masyarakat bawah karena memang mempunyai karakteristik yang “merakyat” yaitu sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari dan menggunakan prosedur yang sederhana, tidak sarat aturan dan cepat. Jadi adalah tepat dan wajar apabila untuk masa sekarang LKM mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka pemulihan ekonomi karena sudah terbukti LKM mendukung sustainabilitas dan pengembangan UKM.

Arif mulyadi (2006) dalam penelitiannya dengan menggunakan t-test menyatakan bahwa keberadaan dan dukungan LKM dapat meningkatkan kapasitas usaha UKM yang meliputi peningkatan pendapatan, penambahan jumlah pekerja, dimana akhirnya semua itu akan berimbas pada meningkatnya ketahanan daerah.

Menurut Sumodiningrat (2003) pemberdayaan LKM merupakan syarat mutlak dalam upaya mengembangkan ukm karena menurut Asian Development Bank dan worldbank LKM mempunyai 3 elemen kunci: (1) menyediakan berbagai jenis pelayanan keuangan yang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat yang dilayani. (2) Melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. (3) Prosedur dan mekanisme yang digunakan kontekstual dan fleksibel untuk dijangkau masyarakat miskin.

Berdasarkan study tentang LKM yang difokuskan pada penilaian kerja dan sustainabilitas LKM dengan mengevaluasi indikator-indikator keuangannya (seperti profitabilitas, tingkat pengembalian pinjaman) yang secara langsung mempengaruhi tingkat kemandirian, jangkauan dan mekanisme pemberian kredit. Seperti study yang dilakukan Christen (1998) menunjukkan bahwa dua kunci utama untuk menuju kemandirian (*full self sufficiency*) adalah efisiensi dan kebijakan penentuan harga yang tepat. Namun hal penting yang perlu diketahui adalah pengaruh positif LKM terhadap kesejahteraan social ekonomi orang-orang miskin hanya akan dapat dipertahankan apabila LKM tersebut memiliki kinerja keuangan dan jangkauan (*outreach*) yang baik.

Yaron (1994) menemukan bahwa ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi agar LKM memiliki sustainabilitas yang tinggi. Pertama, LKM tersebut harus memiliki suku bunga pinjaman positif yang cukup tinggi sehingga mampu menutup biaya-biaya keuangan yang tidak tersubsidi untuk mempertahankan nilai riil ekuitasnya. Kedua, LKM tersebut harus dapat mencapai tingkat pengembalian yang tinggi dan ketiga, LKM tersebut harus dapat menawarkan suku bunga deposito yang cukup tinggi untuk menjamin agar tabungan sukarela meningkat secara signifikan sehingga mampu membiayai portofolio pinjaman. Keempat, LKM harus efisien dalam biaya transaksi dan administrasi yang rendah dalam mekanisme pemberian kreditnya.

Sustainabilitas LKM sendiri tidak dapat tercapai apabila LKM tidak sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang seharusnya mereka bantu. Snow (1999) menegaskan bahwa LKM yang sustainabel selalu menyatu dan terkait dengan jaringan institusi lokal yang ada.

2.3.1 Lembaga Keuangan Mikro Indonesia

Berdasarkan tingkat formalitasnya, LKM dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk (Ledgerwood, 1999) yaitu institusi formal terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan terikat oleh peraturan dan pengawasan pemerintah (bank sentral) contoh BRI unit desa, Bank Perkreditan Rakyat, serta lembaga keuangan nonbank. Institusi informal terdiri perantara yang beroperasi diluar kerangka peraturan dan pengawasan pemerintah contoh: arisan, penjualan eceran, pinjaman individu. Diantara kedua bentuk tersebut ada lagi institusi semi informal yang terdiri dari lembaga lembaga yang tidak diatur oleh otoritas perbankan tetapi memperoleh ijin dari otoritas atau pemerintah daerah seperti Koperasi (Koperasi simpan pinjam, Unit Simpan Pinjam), Baitul Mall Tamwil dan proyek mikro kredit.

Suryati Rizal (2000) membagi LKM dalam 2 kategori menjadi bank dan nonbank LKM katagori bank LKM kategori bank diatur oleh undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang terdiri dari Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS, BRI unit serta Bank Kredit Desa (BKD). Sedangkan untuk LKM non bank terbagi 2 yaitu formal dan informal. Untuk yang formal diatur oleh Undang-undang koperasi No.25 tahun 1992 terdiri dari koperasi simpan pinjam (KSP) dan lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). LKM nonformal biasanya merupakan lembaga swadaya masyarakat didirikan oleh masyarakat itu sendiri seperti BMT, credit union dan kelompok usaha bersama.

Peta lembaga keuangan mikro di Indonesia ini membenarkan pernyataan Robinson (2002) bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem perbankan finansial mandiri terbesar di dunia dan memiliki banyak lembaga keuangan komersial yang lebih kecil, yang dalam hal ukuran, ragam, volume, penetrasi pasar dan keuntungan merupakan yang paling berkembang didunia (Berenbach, 1997).

Menurut Rudjito (2003) dalam papernya menyarankan untuk beberapa pengembangan LKM perlu menerapkan prinsip-prinsip komersial/bisnis yang dianut BRI seperti: simplicity, accessibility, demand driven, transparency, best recovery, sustainability, continous training serta supervision.

Chaves dan Gonzales-vega (1996) mengungkapkan bahwa keberhasilan LKM di Indonesia khususnya lembaga Perkreditan Desa di Bali akibat dari rancangan organisasi yang menjadi perantara layanan keuangan karena akan mempengaruhi kinerja LKM dan pada akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Disamping itu dasar pemberian pinjaman melalui karakter dan pengawasan lokal sangat membantu tercapainya keberhasilan.

Menurut Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar

Peterson (2005), mengatakan bahwa koperasi harus memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi-organisasi bisnis lainnya untuk bisa menang dalam persaingan di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Loyd (2001) menegaskan bahwa koperasi-koperasi perlu memahami apa yang bisa membuat mereka menjadi unggul di pasar yang mengalami perubahan yang semakin cepat akibat banyak faktor multi termasuk kemajuan teknologi, peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat perubahan selera pembeli, penemuan-penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, ringan, baik kualitasnya, tahan lama, tampilan dan sebagainya dalam menghadapi banyaknya pesaing-pesaing baru dalam skala yang lebih besar.

2.3.2 Koperasi dalam perspektif syariah

Dalam surah As-Shad (38: 24) Allah berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

”Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu.” Di dalam As-Sunnah, Rasulullah

SAW bersabda, yang artinya: "Allah berfirman: Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka" (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).

Hendar dan Kusnadi (2005), kegiatan koperasi secara ekonomis harus mengacu pada prinsip identitas (hakikat ganda) yaitu anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan. Organisasi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individu para anggotanya. Definisi ini menyerupai definisi syirkah yang artinya ikhtilath (percampuran). Mahmud Syaltut dalam bukunya Al Fatawa menyatakan bahwa Syirkah ta'awunyah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang secara sukarela memenuhi kepentingan bersama dalam berbagai bidang dalam suatu badan hukum yang dimiliki bersama dan dikontrol secara demokratis. Kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dibangun berdasarkan nilai keswadayaan, tanggungjawab bersama, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan kesetiakawanan.

Kerjasama dan gotong-royong ini tercermin dari modal awal koperasi dikumpulkan dari semua anggota-anggotanya. Besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota lain dan sisa hasil usaha koperasi dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi.

Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dengan banyak manfaat seperti memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja kerja, dan memberi bantuan keuangan pada anggotanya. Dengan demikian dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya yang

demokratis, pembagian keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

Penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*, koperasi tipe kemitraan modern Barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan, telah dipraktikkan oleh umat Islam hingga abad 18. Baik bentuk syirkah Islam dan syirkah modern, sama dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual berdasarkan hukum negara.

Menurut Rahman, persyaratan kemitraan kedua tipe koperasi tersebut sama, kecuali pada praktik riba (sistem bunga), karena unsur penetapan tingkat pengembalian (riba) yang ada pada koperasi konvensional sangat tidak dibenarkan dan hukumnya haram, sehingga koperasi yang menggunakan bunga tidak dibenarkan dalam Islam. Sebuah hadits riwayat Bukhari Muslim meriwayatkan tentang riba bahwa Nabi SAW bersabda, "Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasul?. Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika peperangan berkecamuk, menuduh wanita suci berzina". (HR. dari Abu Hurairah).

Koperasi syariah (syirkah Islam) terbebas sama sekali dari unsur itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai koperasi –yang tampak dalam jati dirinya (Co-operative Identity) sebagaimana dirumuskan kongres International Co-operative Alliance (ICA) ke-100 di Manchester, Inggris, September 1995 dan disusun kembali Prof. Dr. Ian Mac Pherson berupa 7 nilai: menolong diri sendiri, swa tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kesetiakawanan dan kejujuran; dan 7 prinsip operasional, yaitu keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian oleh anggota secara demokrasi, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemerdekaan, pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerja sama antar koperasi, dan kepedulian terhadap lingkungan– secara umum selaras dan serasi dengan nilai-nilai syaria'ah.

Disamping koperasi syariah terdapat juga lembaga keuangan mikro lainnya yaitu Baitul mall Tamwil yang juga merupakan lembaga mikro yang juga berbasis

syariah. Konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu desa. Kemampuan ini memang sangat diharapkan mengingat UKM memiliki potensi dalam mengembangkan perekonomian bangsa, namun adanya kesulitan dalam memperoleh modal dan pembiayaan dalam meningkatkan usaha mereka hal ini dapat mengakibatkan perekonomian UKM yang bergerak pada perekonomian sektor riil akan mengalami pertumbuhan yang stagnan.

Widyaningrum (2002) menyebutkan empat karakter BMT yang menjadikan praktik lembaga ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya dan lebih berimplikasi pada masyarakat kecil. Pertama, BMT menawarkan berbagai kemudahan dalam prosedurnya. Kedua, BMT hanya menuntut persyaratan yang ringan. Ketiga, BMT memberikan pelayanan yang cepat. Dan keempat, BMT bahkan menerapkan sistem "jemput bola" dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya.

Firmansyah (2006) menganalisis pengaruh BMT terhadap perkembangan usaha 295 nasabah yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan statistik deskriptif, ia menunjukkan bahwa sejak menjadi nasabah BMT, sebagian besar responden telah merasakan dampak positif atas perkembangan usaha mereka. Perkembangan ini berupa peningkatan omzet penjualan, peningkatan keuntungan rata-rata dan peningkatan aset usaha setelah sebagian keuntungan digunakan untuk memperbesar modal usaha yang dimiliki. Kesimpulan ini konsisten dengan temuan Ali (2006) yang melakukan riset dengan pendekatan serupa untuk kasus nasabah BMT Ben Taqwa, Grobogan, Jawa Tengah.

Dengan pendekatan yang sedikit berbeda, Saridu (2007) menganalisis pengaruh pembiayaan *qardhul-hasan* bagi nasabah BMT Bina Umat Beringharjo. Menurut Saridu (2007), meskipun secara nominal pemberian pembiayaan tersebut tersebut membawa peningkatan usaha nasabah, tetapi secara riil tidak. Sebab, ternyata peningkatan jumlah keuntungan dan nilai aset usaha yang dialami nasabah masih belum mampu melampaui nilai inflasi pada saat itu.

Lahirnya suatu BMT yang berdaya dan profesional, akan memungkinkan terwujudnya BMT sebagai *agent of community development* (agen pembangunan masyarakat) dan *agent of asset distribution* ((agen distribusi asset dari yang punya kepada yang tidak punya). BMT tumbuh sebagai institusi yang mampu memberdayakan umat, utamanya mengangkat derajat kaum dhuafa, menciptakan kesempatan kerja yang luas, membangun jaringan bisnis dan media pemerataan hasil pembangunan dan mampu menyediakan jasa keuangan yang efektif dan efisien bagi nasabah dan masyarakat

2.4 Pengukuran kesehatan lembaga keuangan

Pengukuran kesehatan LKM harus didasarkan pada tujuan LKM, meskipun tujuan utama LKM kebanyakan adalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan itu yaitu pendekatan kesejahteraan (*welfarist*) yang mengukur keberhasilan terutama dari kemampuan institusi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang paling miskin dalam waktu singkat. Yang kedua pendekatan institusional yang mengukur keberhasilan berdasarkan sustainabilitas LKM dengan asumsi bahwa LKM yang memiliki sustainabilitas akan mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Karena LKM dianggap sebagai perantara keuangan yang bertujuan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh kredit bagi orang-orang dengan penghasilan rendah, LKM diharapkan mempunyai kemampuan financial (*financial viable*) untuk mencapai kemandirian (*self sustainability*). Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja salah satunya harus didasarkan pada kemampuan keuangannya. Efisiensi biaya harus menjadi perhatian utama untuk mencapai kemandirian LKM (Khandker, 1998).

Menurut Romano (1989) pengukuran kinerja (*performance*) merupakan salah satu proses dalam system pengendalian management dengan membandingkan serta mengevaluasi antara rencana yang dibuat dengan hasil yang dicapai, menganalisa penyimpangan yang terjadi dan melakukan perbaikan.

Namun secara teoritis pengukuran kinerja tidak hanya didasarkan pada kemandirian tetapi juga jangkauan LKM tersebut, diukur dari luasnya cakupan

keluarga yang menjadi target dan besar jasa yang mereka terima. Indikator jangkauan merupakan proxy dari peranan LKM dalam pembangunan (Yaron, Benjamin, & Pimprek, 1997). Kemandirian dan jangkauan yang saling melengkapi telah menjadi alat pembanding dalam evaluasi kinerja LKM (chavez & Gonzales-Vega, 1996, Christen, Rhyne & Vogel, 1995, Ledgerwood 1999, Yaron, benjamin & Charitonenko, 1998).

Kriteria penilaian kinerja LKM menurut Yaron mencakup kemandirian yang akan dapat dicapai jika tingkat pengembalian ekuitas (return on equity), jumlah bersih subsidi yang diterima sama dengan atau lebih dari biaya oportunitas dan ekuitas. Kebergantungan pada subsidi adalah kebalikan dari kemandirian (Yaron, Benjamin, Piprek, 1997). Kriteria kedua adalah jumlah klien yang dilayani dan ragam jasa keuangan yang diberikan, ini merupakan tujuan jangkauan yang meliputi skala dan kedalaman jangkauan. Skala jangkauan merupakan jumlah klien yang dilayani dengan berbagai jenis instrumen dan kedalaman jangkauan merupakan jenis klien yang terjangkau serta tingkat kemiskinan mereka.

Beberapa pendekatan teknik penilaian kinerja telah dikembangkan tahun 1990 an (CGAP 2001) yaitu:

- Pendekatan ACCION yang mengadopsi metode CAMEL. CAMEL merupakan akronim dari kecukupan modal, kualitas asset, Manajemen, penerimaan dan Likuiditas. ACCION CAMEL menampilkan skor gabungan hampir sama dengan ranking. Tujuan instrumen ini adalah memeperkuat manajemen dan menghasilkan kerangka kerja umum untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja afiliasi ACCION diseluruh negara.
- WOCCU menggunakan metode PEARLS yang terdiri dari satu set rasio mencakup 45 rasio untuk mengevaluasi dan memonitor stabilitas keuangan serikat kredit. PEARLS dikelompokkan dalam 6 wilayah kerja keuangan yaitu perlindungan, struktur keuangan yang efektif, kualitas asset, tingkat pendapatan dan biaya, likuiditas dan tanda-tanda pertumbuhan.

- PlaNet Rating menggunakan metode GIRAFE dengan 26 indikator, doigolongkan dalam 6 resiko yaitu proses pengambilan keputusan dan tata kelola, instrumen manajemen dan informasi, analisis dan kendali resiko, aset-aset termasuk portofolio pinjaman, pembiayaan (ekuitas dan kelayakan), efisiensi dan tingkat keuntungan. GIRAFE lebih menaruh perhatian pada resiko 'fidusiari', bagaimana suatu lembaga dikelola dan apakah lembaga itu akan gagal memenuhi harapan para investor dan pemilik saham karena ketidakcakapan dalam sistem, proses dan pengorganisasian.
- Pendekatan MicroRate berfokus pada bagaimana berbagai macam resiko pada operasional lembaga-lembaga keuangan mempengaruhi kelayakan kredit suatu lembaga. Faktor-faktor utama yang menjadi fokus penilaian adalah efisiensi, kualitas aset, pertumbuhan dan tingkat keuntungan.

Namun dalam memilih teknik penilaian faktor kontekstual harus dipertimbangkan seperti geografis (standar yang berbeda untuk Amerika, Asia dan Afrika), kematangan lembaga (lembaga yang baru berdiri tidak seharusnya dibandingkan dengan lembaga yang matang), serta pendekatan pemberian pinjaman yang beragam (Ledgerwood,1999). Indikator kinerja harus diletakkan dalam dimana dan bagaimana LKM tersebut beroperasi.

Khotimah (2004) dalam penelitiannya menggunakan metode statistic non parametric dengan uji wilcoxon Signed Rank Test (uji dua sample berpasangan), lalu dilanjutkan dengan uji korelasi Pearson, uji ini untuk melihat hubungan antara variable skim dan jumlah modal terhadap variable peningkatan pendapatan kelompok dan peningkatan pendapatan keluarga. Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variable skim dan jumlah modal yang diberikan Dompot Dhuafa terhadap peningkatan pendapatan usaha kelompok dan peningkatan pendapatan usaha keluarga.

Ginanjari (2003:hal 87) dalam penelitiannya menggunakan metode analisis logaritma natural dengan model log-log menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asset LKM diantaranya asset, pembiayaan, tabungan, modal dan sisa hasil usaha. Yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan asset

LKM adalah asset, pembiayaan dan tabungan. Alasan penggunaan model log-log yang dilakukan dalam penelitian lebih disebabkan banyaknya kelemahan-kelemahan dalam menginterpretasikan data yang diperoleh jika menggunakan model regresi linier biasa.

Duong dan Izumida (2002) dalam penelitiannya dengan menggunakan variable estimasi sebagai berikut (i) keikutsertaan dalam kredit desa (ii) perilaku pemberi pinjaman pada kredit rumah tangga (iii) metode least square untuk mengestimasi dampak pada penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat miskin kesulitan dalam mengakses fasilitas kredit, para pengakses kredit umumnya adalah peternak dan petani, reputasi dan jumlah yang diberikan oleh MFI (lembaga keuangan mikro) merupakan determinan dari rasio kredit yang diberikan. Dampak yang ada menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kredit dan output.

Ledgerwood (1999) memberikan teknik penilaian yang diambil dari sejumlah LKM formal dan informal diseluruh dunia. Indikator kinerja tersebut adalah kualitas portofolio, produktivitas dan efisiensi, kelayakan keuangan, tingkat keuntungan, kecukupan modal dan pembiayaan dengan utang, serta ukuran, jangkauan dan pertumbuhan LKM. Indikator ini dipilih karena mereka bermanfaat dalam mengelola LKM (manajemen internal) seperti produktivitas dan efisiensi. Kelayakan keuangan, tingkat keuntungan, kecukupan modal dan pembiayaan dengan utang, serta ukuran, jangkauan dan pertumbuhan bermanfaat untuk pihak eksternal seperti investor atau donor.

Kualitas portofolio, khususnya tingkat pengembalian pinjaman (repayment rate) adalah indikator kinerja yang paling penting bagi LKM karena indikator tersebut merupakan prasyarat utama agar sebuah LKM mampu mandiri dan sustanabel dalam jangka panjang (Christen, 1998, Sharma & Zeller, 1997, Woolcock, 1999, Yaron 1994). Woolcock (1995) menekankan bahwa indikator kinerja yang paling penting dari sebuah LKM adalah tingkat pengembalian pinjaman karena hal itu merupakan penentu utama apakah sebuah program mampu sustanabel.

Yaron (1994) berpendapat bahwa laba besar yang diperoleh LKM tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator sustanabilitas suatu LKM karena laba

yang besar dapat saja diperoleh hanya dalam waktu yang singkat. Sedangkan Ledgerwood (1999) menunjukkan bahwa profitabilitas dan efisiensi merupakan faktor kunci yang menentukan kemampuan keuangan suatu LKM, hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi sustainabilitas LKM

Pencapaian tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi merupakan prasyarat utama bagi sebuah LKM untuk sustainabel dalam jangka waktu yang panjang. Kerugian pinjaman seringkali menjadi biaya yang terbesar yang harus ditanggung oleh LKM tersebut dan menjadi penyebab utama kebangkrutan dan ketidaklikuiditasannya. Pentingnya indikator kualitas portofolio ini juga ditunjukkan oleh kriteria kesehatan lembaga perbankan yang dibuat oleh bank sentral yang disebut kriteria CAMEL yang memberikan bobot tinggi tiga puluh persen untuk indikator ini (Bank Indonesia, 1997).

Berdasarkan Mulyadi (1993) pengukuran kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional dari organisasi berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dibawah ini adalah standar pengukuran berdasarkan Pedoman perhitungan kinerja otonomi dan kemandirian koperasi yang dikeluarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002:

1. Rentabilitas: yaitu perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dengan modal sendiri pada waktu yang bersangkutan.
2. ROA: Perbandingan antara sisa hasil usaha dengan jumlah asset pada waktu yang bersangkutan.
3. ATO (Asset turn over): Perbandingan antara volume usaha dengan total asset yang dimiliki.
4. Profitabilitas: Perbandingan antara sisa hasil usaha dengan pendapatan kotor.
5. Likuiditas: merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan pasiva lancar (kemampuan perusahaan menyediakan dana yang akan diambil oleh penabung)
6. Solvabilitas: merupakan perbandingan antara aktiva dengan total kewajiban.

Menurut Riza Primahendra dari Bina swadaya performance dimana LKM akan berpengaruh terhadap performance bisnis sektor riil dari usaha kecil karena LKM sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, sehingga jika suatu LKM mempunyai performa yang baik dan sehat maka akan mendorong pertumbuhan bisnis sektor riil dari UKM binaanya. Kesehatan internal LKM dan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada UKM akan sangat mempengaruhi kinerja dari LKM disamping prosedur peminjaman dan jumlah LKM yang tersedia.

Contoh LKM yang menunjukkan kinerja pelunasan yang tinggi adalah BRI unit desa yaitu sebesar 97% hingga Maret 2000 (Patten, Rosengard, Johnston, 2001). Patten menunjuk beberapa hal sebagai penyebab tingkat pelunasan. Pertama, produk-produk pinjaman sangat cocok dengan aliran dana usaha mikro dalam hal pelunasan pinjaman. Kedua, system pemberian pinjaman disesuaikan dengan kondisi pasar lokal dan klien. Ketiga, hubungan perbankan jangka panjang telah berkembang dengan para peminjam ditandai sikap saling menghormati dan ketaatan terhadap syarat-syarat dan ketentuan pinjaman yang telah disepakati sebelumnya. Keempat, tersedia jatah kredit yang tidak terbatas dimasa mendatang bagi peminjam saat ini yang meunasi pinjaman tepat waktu dan bagi orang baru yang mengajukan pinjaman yang dianggap layak memperoleh kredit.

Publikasi dari the consultative Group to assist the Poorest (CGAP) merangkum faktor-faktor yang yang sering disebut dapat menjelaskan mengapa kinerja BRI unit desa baik (CGAP, 1997). Faktor tersebut adalah lingkungan makro ekonomi yang stabil, kepemimpinan yang kuat dalam BRI, otonomi operasional yang penuh bagi unit desa tanpa campur tangan pemerintah terutama mengenai target pemberian pinjaman, atau kelompok penduduk yang harus dicapai serta pelaporan keuangan dan akuntabilitas yang transparan dan jelas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metodologi yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibangun di bab sebelumnya. Sebelum dilakukan penjabaran mengenai metodologi, dijelaskan lebih dulu tentang teknik analisis statistika dan ekonometrika, variable dan model analisis, teknik pengumpulan dan transformasi data, serta tahapan pengolahan data. Selanjutnya menguji kelayakan model dan signifikansi koefisien korelasi dan membuat flowchart penelitian sebagai ilustrasi rangkaian penelitian.

3.1 Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survey analisis dokumen dan data historis atau data sekunder dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder mengenai kondisi koperasi bukan hanya dalam hal keuangan tetapi menyangkut juga jumlah dan kondisi propinsi di masing-masing wilayah Indonesia.
2. Pengumpulan data sekunder mengenai kondisi keuangan dan perkembangan koperasi secara detail diperoleh dari departemen Koperasi dan UKM.
3. Data sekunder pendukung seperti jumlah penduduk miskin perpropinsi diseluruh Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2003 hingga 2005 diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya.
4. *Data cross section* dan *time series* digabungkan secara manual untuk membentuk data panel berdasarkan waktu dan individu.
5. Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan/*literature* yang berkaitan dengan penelitian baik melalui koran, artikel/jurnal yang berkaitan dengan penelitian secara *online* maupun *textbook*.

UKM dalam mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan program Eviews dan SPSS.

4. Melakukan berbagai uji seperti multikolinieritas, heteroskedastisitas guna mengetahui dan mendapatkan model yang terbaik.
5. Melakukan uji hipotesis untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, pengujian ini meliputi: pengujian model fit (koefisien determinasi), uji F (uji simultan) dan uji t (uji parsial).

3.2 Deskripsi variabel operasional penelitian

Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (multiple regression). Model ini merupakan model regresi yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara satu variable terikat dengan beberapa variable bebas (Levin dan Rubin, 1998:718). Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari kemudahan aksesibilitas ke lembaga mikro keuangan, ROA, rentabilitas dan tabungan masyarakat. Sedangkan untuk variable terikatnya menggunakan indikator pinjaman yang disalurkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas ini akan dapat memberikan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap variable terikat dan seberapa besarnya pengaruh tersebut.

Model penelitian yang digunakan untuk mengukur akses terhadap usaha kecil (EPUK) dan kesehatan internal dari lembaga keuangan mikro adalah:

$$\text{Pinjaman yang disalurkan} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ akses thd UKM} + \alpha_2 \text{ internal performance LKM (IP_LKM)} + \text{dummy pengaruh propinsi} + e \quad (3.1)$$

Dimana:

$$\text{IP_LKM} = f_2(\text{ROA}, \text{P_rent}, \text{R_tab})$$

Tabel dummy variabel kriteria propinsi

Pembagian propinsi	kode	D _{SDA}	D _{SDM}	D _{iso}
Kelompok I : kaya SDA NAD, Riau, Bengkulu, Kalbar, kalteng, kaltim, Irian Jaya, Bangka Belitung	0	0	0	0

Kelompok II : kaya SDM DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali	1	1	0	0
Kelompok III: Terisolasi NTB, NTT, sultra, Sulteng, Jambi	2	0	1	0
Kelompok IV: Lainnya Sumut, Sumbar, Sumsel, lampung, Sulut, Sulsel kalsel, maluku, maluku utara, Banten	3	0	0	1

Sumber Tambunan (2002)

Setelah persamaan diatas dijabarkan didapati persamaan (ii) yang kemudian disebut sebagai model awal adalah sebagai berikut:

$$\text{Kredit} = a_0 + a_1 \text{akses} + (a_2 \text{ROA} + a_3 \text{rent} + a_4 \text{tab}) + (a_5 D_{\text{sdm}} + a_6 D_{\text{sdm}} + a_7 \text{Diso}) + e \quad (3.2)$$

3.2.1 Variabel Aksesibilitas pelayanan terhadap UKM

Menurut Tambunan (2002) terdapat hubungan positif antara lokasi bank, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi yang bertele-tele dan kurangnya informasi mengenai skim-skim perkreditan dengan banyaknya usaha kecil yang mengalami kesulitan permodalan. Dengan asumsi semakin banyak unit Koperasi akan mempermudah UKM dalam mengakses keuangan mikro.

Aksesibilitas (*accessibility*) merupakan pengukuran ketersediaan koperasi dalam suatu wilayah propinsi. Variabel ini menjelaskan kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau koperasi akan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi pada usaha mikro dengan asumsi semakin banyak unit koperasi akan memudahkan masyarakat untuk mengakses keuangan mikro.

$$\text{Aksesibilitas} = \text{jumlah unit koperasi per propinsi}$$

3.2.2 Variabel Internal Performance LKM (IP_LKM)

IP_LKM merupakan kumpulan variable yang digunakan untuk mengukur seberapa baik dan sehat kondisi internal dari LKM yang tentunya akan mempengaruhi pelayanannya terhadap usaha kecil. Kinerja internal yang diteliti

dilihat dari kemandirian usaha dengan indikator ROA, rentabilitas dan tabungan yang dapat dihimpun dari masyarakat.

Dikarenakan data lembaga keuangan mikro yang digunakan adalah koperasi, maka dalam menilai kinerja internal dari LKM digunakan kriteria penilaian dari koperasi yang disebut juga sebagai “otonomi dan kemandirian koperasi” yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan usaha kecil menengah nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002. Dua komponen yang ada dalam juklak tersebut digunakan sebagai faktor yang dianalisis pada penelitian ini untuk mengukur internal performance Koperasi. Komponen tersebut yaitu komponen rentabilitas modal sendiri dan *Return on asset* (ROA).

Berdasarkan indikator penilaian “otonomi dan kemandirian koperasi” suatu UKM akan diberikan penilaian baik dengan skor 100 jika nilai ROA > 10%, sementara jika nilai ROA adalah 6 – 9% maka skornya adalah 75. Sedangkan untuk penilaian rentabilitas suatu UKM dikatakan baik dengan skor 100 jika nilai rentabilitas >21%, sementara jika nilai rentabilitas antara 10% - 20% maka skornya adalah 75. Rasio tabungan minimum Rp 0,35 juta dan maksimum Rp. 73,11 juta. Dari teori diatas dipilihlah beberapa variabel yang dianggap mewakili Efektivitas pelayanan seperti:

- a) *Return on Asset* (ROA): merupakan perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dengan asset yang dimiliki dalam tahun yang bersangkutan. (Return on Assets). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset yang dimiliki. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai. Rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.

$$ROA = \frac{\text{hasil usaha LKM}}{\text{Asset}}$$

Asset

- b) Rentabilitas : merupakan perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dengan modal sendiri pada waktu yang bersangkutan. Dapat diartikan sebagai kemampuan koperasi dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba.

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{laba /hasil usaha}}{\text{Modal sendiri}}$$

Modal sendiri

- c) Tabungan: merupakan dana masyarakat yang dapat dihimpun dalam satu propinsi. Dapat diartikan bahwa makin banyak jumlah tabungan artinya koperasi tersebut dipercaya masyarakat dalam pengelolaan dananya dan dapat menyalurkan kredit lebih banyak lagi.

Tabungan = Jumlah tabungan yang dihimpun per propinsi

3.2.3 Variabel Dummy Propinsi (Dsda – Dsdm- Diso)

Untuk dummy kriteria propinsi dibagi menjadi 3 dengan tujuan untuk mendapatkan perbedaan nyata antara propinsi-propinsi yang ada di Indonesia. Dimana perbedaan atas daerah ini terbagi atas daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam terdiri dari propinsi NAD, Riau, Bengkulu, Kalbar, kaltim, Bangka belitung dan Irian Jaya, daerah yang memiliki banyak sumber daya manusia terdiri dari propinsi DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, serta daerah yang letak geografisnya relatif terisolasi seperti NTB, NTT, Sultra, Sulteng, Jambi. Sisa propinsi lainnya dimasukkan dalam kriteria lain-lain.

Metode pengelompokan ini diterapkan di Hill (1989) dalam *economic diversity in Indonesia* dan Tambunan (2002) tentang *UKM di Indonesia*. Dari variable dummy ini diharapkan dapat diketahui apakah kondisi propinsi-propinsi di Indonesia ikut mempengaruhi faktor akses dan kesehatan Koperasi terhadap pinjaman yang diberikan pada usaha kecil.

Variabel boneka untuk mengukur apakah kondisi propinsi dimasing-masing kelompok mempengaruhi hubungan antara akses dan kesehatan koperasi terhadap pinjaman yang diberikan pada usaha kecil. Untuk mendapatkan suatu perbedaan yang nyata antara propinsi-propinsi tersebut, maka dikelompokkan menjadi 4 katagori dengan 3 dummy sebagai berikut:

Sumber Daya Alam (SDA)	0
Sumber Daya Manusia (SDM)	1
Propinsi terisolasi	2
Propinsi lainnya	3

3.2.4 Variabel Pinjaman yang diberikan pada UK

Kekurangan modal usaha merupakan permasalahan klasik dari UKM. Dalam Ismawan (2003) keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya yaitu melalui berbagai macam penawaran skim kredit. Skim-skim kredit ini disesuaikan dengan kebutuhan para nasabahnya. Pemerintahpun tiap tahun berusaha meningkatkan jumlah kredit yang bisa disalurkan kepada pengusaha UKM.

Besar jumlah kredit dilihat dari jumlah kredit yang dikucurkan per propinsi dan dilihat hubungan antara kredit yang disalurkan dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Kredit = Besar pinjaman yang disalurkan kepada UKM per propinsi

3.3 Deskripsi sistematika dan analisis pembahasan

3.3.1 Deskripsi statistik data

Setelah data digabungkan dari tahun 2003 hingga 2005 berdasarkan komponen faktor akses dan kesehatan masing-masing kemudian dilakukan penghitungan nilai minimum, nilai rata-rata, nilai maksimum dan standar deviasi yang akan digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi LKM di masing-masing propinsi di Indonesia.

3.3.1.1 Deskripsi statistik untuk seluruh propinsi

Deskripsi statistik seluruh sample penelitian ini mengambil sampel seluruh Koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit simpan pinjam (USP) diseluruh propinsi di Indonesia pada tahun 2003 – 2005 pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Deskripsi statistik seluruh propinsi

	R_Akses	R_Kredit	ROA	Rentabilitas	R_Tab
Nilai Min	0.0499	1.5872	0.0094	0.0132	0.1263
Nilai Rata-rata	0.1968	51.2745	0.5215	2.1367	6.9873
Nilai Max	0.4430	944.8448	9.8913	53.6883	70.7850
Standar Deviasi	0.0819	155.6496	1.8109	9.4896	15.5997
Jumlah Sampel	87	87	87	87	87

Nilai rasio akses rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia hanya 0.1968 unit per 1000 penduduk yang artinya bahwa rata-rata sekitar 5081 penduduk harus bersaing untuk mengakses 1 unit LKM yang tersedia. Rasio akses terendah dari keseluruhan propinsi adalah 0.0499 unit dan tertinggi adalah 0.443 unit.

Nilai rasio kredit rata-rata seluruh propinsi di Indonesia Rp 51.2745 juta yang berarti bahwa pinjaman kredit mikro yang disalurkan kepada 1000 penduduk rata-rata adalah Rp 51.2745 juta per tahun dengan nilai rasio kredit terendah yaitu Rp. 1.587 juta dan nilai rasio kredit tertinggi Rp. 944.8448 juta yang disalurkan kepada penduduk pertahun.

Internal performance dari Koperasi yang diambil dari nilai ROA, rentabilitas dan rasio tabungan disesuaikan dengan indikator penilaian "Otonomi dan Kemandirian" yang dikeluarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan penilaian kesehatan dan kemandirian koperasi. Standar nilai baik adalah dengan pemberian nilai 100 jika nilai suatu koperasi memiliki ROA > 10%, sementara jika ROA antara 6% - 9% maka diberi skor 75. Nilai ROA rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia sangat baik berkisar 52,15% sehingga termasuk dalam kelompok berkriteria baik dengan skor 100. Nilai rasio ROA terendah yaitu 0.94% dan tertinggi 989,13%. Semakin tinggi ROA suatu koperasi, maka makin besar tingkat keuntungan koperasi yang artinya koperasi tersebut dapat mengefektifkan penggunaan assetnya.

Indikator penilaian ekonomi dan kemandirian yang dikeluarkan kementerian Koperasi dan UKM memberikan penilaian baik dengan skor 100 jika nilai Rentabilitas > 21% sementara jika nilainya antara 10 -20%, maka skornya adalah 75. Nilai rentabilitas rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia sebesar 213% sehingga masuk dalam dalam kriteria baik dengan nilai 100. Rasio rentabilitas terendah 1,32% dan yang tertinggi 536,8%.

Untuk jumlah tabungan yang dapat dihimpun oleh koperasi simpan pinjam rata-rata di seluruh Indonesia mencapai Rp 6,98 juta. Dengan nilai rasio dana tabungan yang dapat terhimpun minimum Rp. 126 ribu dan maksimum mencapai Rp 70,78 juta.

3.3.1.2 Deskripsi statistik untuk propinsi kelompok kaya SDA

Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi statistik untuk propinsi keompok SDA yang terdiri dari propinsi yang kaya akan Sumber Daya Alam terutama minyak dan gas bumi (hasil tambang) seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan barat, kalimantan tengah, kalimantan timur dan Papua. Deskripsi statistik untuk kelompok SDA (*pooled section*) terdiri dari 8 propinsi dengan hasil tabel 3.2

Tabel 3.2 deskripsi statistik propinsi kelompok SDA

	R_Akses	R_Kredit	ROA	Rentabilitas	R_Tab
Nilai Min	0.0580	4.9758	0.0375	0.0849	0.1263
Nilai Rata-rata	0.2070	15.6944	1.5928	7.1861	3.2209
Nilai Max	0.2970	40.3456	9.8913	53.6883	18.0462
Standar Deviasi	0.0668	9.3524	3.2489	17.3173	4.4780
Jumlah Sampel	24	24	24	24	24

Propinsi: NAD, riau, bengkulu, Bangka belitung, kalbar, kalteng, kaltim, papua

Nilai rasio akses rata-rata dari propinsi kelompok 1 di Indonesia hanya 0.2070 unit per 1000 penduduk yang artinya bahwa rata-rata sekitar 4831 penduduk harus bersaing untuk mengakses 1 unit Koperasi yang tersedia, jumlah ini lebih baik dari nilai rata-rata nasional. Rasio akses terendah dari kelompok propinsi ini adalah 0.0580 unit dan tertinggi adalah 0.297 unit per 1000 penduduk.

Nilai rasio kredit rata-rata seluruh propinsi di Indonesia Rp 15.69 juta yang berarti bahwa pinjaman kredit mikro yang disalurkan kepada 1000 penduduk rata-rata adalah Rp 15.69 juta per tahun dikelompok propinsi ini, dan jumlah ini lebih kecil dari rasio kredit rata-rata nasional. Nilai rasio kredit terendah yaitu Rp. 4.97 juta dan nilai rasio kredit tertinggi Rp. 40.35 juta.

Internal performance dari Koperasi yang diambil dari nilai ROA, rentabilitas dan rasio tabungan disesuaikan dengan indikator penilaian "Otonomi dan Kemandirian" yang dikeluarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan penilaian kesehatan dan kemandirian koperasi. Standar nilai baik adalah dengan pemberian nilai 100 jika nilai suatu koperasi memiliki ROA > 10%, sementara jika ROA antara 6% - 9% maka diberi skor 75. Nilai ROA rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia sangat baik berkisar 159,28 % sehingga termasuk dalam kelompok berkriteria baik dengan skor 100. Nilai rasio ROA terendah yaitu 0.0375 % dan tertinggi 9.89 %.

Semakin tinggi ROA suatu koperasi, maka makin besar tingkat keuntungan koperasi yang artinya koperasi tersebut dapat mengefektifkan penggunaan assetnya.

Indikator penilaian ekonomi dan kemandirian yang dikeluarkan kementerian Koperasi dan UKM memberikan penilaian baik dengan skor 100 jika nilai Rentabilitas > 21% sementara jika nilainya antara 10-20%, maka skornya adalah 75. Nilai rentabilitas rata-rata dari kelompok propinsi 1 ini sebesar 7.186% dengan nilai rentabilitas terendah 8.49% dan yang tertinggi 5368,8%. Terdapat gap yang sangat tinggi antara nilai minimum dan maksimum dari kelompok propinsi ini.

Untuk jumlah tabungan yang dapat dihimpun rasio rata-rata penghimpunan dana koperasi di seluruh Indonesia mencapai Rp 3,22 juta. Dengan nilai rasio dana tabungan yang dapat terhimpun rata-rata minimum Rp. 126 ribu dan maksimum mencapai Rp 18 juta untuk kelompok propinsi yang kaya akan sumber daya alam.

3.3.1.3 Deskripsi statistik untuk propinsi kelompok kaya SDM

Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi statistik untuk propinsi kelompok SDM yang terdiri dari propinsi yang kaya akan Sumber Daya Manusia seperti DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa tengah, Yogyakarta, Jawa timur dan Bali. Deskripsi statistik untuk kelompok 2 (pooled section) terdiri dari 6 propinsi dengan hasil di tabel 3.3

Tabel 3.3. deskripsi statistik propinsi kelompok SDM

Kelompok 2					
	R_Akses	R_Kredit	ROA	Rentabilitas	R_Tab
Nilai Min	0.1210	13.4686	0.0184	0.0435	2.3282
Nilai Rata-rata	0.2418	93.7320	0.1545	0.1806	23.9399
Nilai Max	0.4430	504.7832	0.6217	0.6901	70.7850
Standar Deviasi	0.1106	150.7029	0.2243	0.1938	28.5053
Jumlah Sampel	18	18	18	18	18

propinsi: DKI, jabar, jateng, DIY, jatim, bali

Nilai rasio akses rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia hanya 0.2418 unit per 1000 penduduk yang artinya bahwa rata-rata sekitar 4136 penduduk harus bersaing untuk mengakses 1 unit Koperasi yang tersedia, jumlah ini lebih kecil dari nilai rata-rata nasional. Rasio akses terendah dari keseluruhan propinsi adalah 0.121 unit dan tertinggi adalah 0.4430 unit.

Nilai rasio kredit rata-rata seluruh propinsi di Indonesia Rp 93.73 juta yang berarti bahwa pinjaman kredit mikro yang disalurkan kepada 1000 penduduk rata-rata adalah Rp 93.73 juta per tahun dikelompok propinsi ini, dan jumlah ini lebih tinggi dari rasio kredit rata-rata nasional. Nilai rasio kredit terendah yaitu Rp. 13.47 juta dan nilai rasio kredit tertinggi Rp. 504.78 juta pertahun.

Berdasarkan indikator penilaian "Otonomi dan Kemandirian" yang dikeluarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM, standar nilai baik adalah jika suatu koperasi memiliki ROA > 10%, sementara jika ROA antara 6% - 9% maka diberi skor 75. Nilai ROA rata-rata dari kelompok propinsi SDM di Indonesia sangat baik berkisar 15,45 % sehingga termasuk dalam kelompok berkriteria baik dengan skor 100. Nilai rasio ROA terendah yaitu 1.84 % dan tertinggi 62.17 %. Semakin tinggi ROA suatu koperasi, maka makin besar tingkat keuntungan koperasi yang artinya koperasi tersebut dapat mengefektifkan penggunaan assetnya.

Indikator penilaian ekonomi dan kemandirian yang dikeluarkan kementerian Koperasi dan UKM memberikan penilaian baik dengan skor 100 jika nilai Rentabilitas > 21% sementara jika nilainya antara 10-20%, maka skornya adalah 75. Nilai rentabilitas rata-rata dari kelompok propinsi SDM di Indonesia sebesar 18.06% sehingga masuk dalam dalam kriteria baik dengan nilai 100. Rasio rentabilitas terendah 4,35% dan yang tertinggi 69%.

Untuk jumlah tabungan yang dapat dihimpun rasio rata-rata penghimpunan dana koperasi di kelompok propinsi 2 mencapai Rp 23,94 juta pertahun. Dengan nilai rasio dana tabungan yang dapat terhimpun rata-rata minimum Rp. 2,33 juta dan maksimum mencapai Rp 70,78juta per 1000 penduduk pertahun.

3.3.1.4 Deskripsi statistik untuk propinsi kelompok terisolasi

Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi statistik untuk propinsi kelompok terisolasi yang terdiri dari propinsi dengan kriteria yang dianggap terisolasi seperti daerah yang belum mempunyai infrastruktur yang memadai seperti Nusa tenggara barat, Nusa tenggara timur, Sulawesi tenggara, Sulawesi tengah dan Jambi. Deskripsi statistik untuk kelompok 3 (pooled section) terdiri dari 5 propinsi dengan hasil:

Tabel 3.4 Deskripsi statistik propinsi kelompok terisolasi

	R_Akses	R_Kredit	ROA	Rentabilitas	R_Tab
Nilai Min	0.1410	6.1231	0.0317	0.0569	1.1325
Nilai Rata-rata	0.1951	14.9141	0.1280	0.2213	2.5357
Nilai Max	0.2777	23.0644	0.4045	0.6136	3.6499
Standar Deviasi	0.0488	4.6089	0.1312	0.1971	0.7874
Jumlah Sampel	15	15	15	15	15

Prop: NTB, NTT, Sul tenggara, Sul tengah, Jambi

Nilai rasio akses rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia hanya 0.1951 unit per 1000 penduduk yang artinya bahwa rata-rata sekitar 5126 penduduk harus bersaing untuk mengakses 1 unit LKM yang tersedia, jumlah ini lebih kecil dari nilai rata-rata nasional. Rasio akses terendah dari kelompok propinsi SDM adalah 0.1410 unit dan tertinggi adalah 0.2777 unit per 1000 penduduk

Nilai rasio kredit rata-rata seluruh propinsi di Indonesia Rp 14.9 juta yang berarti bahwa pinjaman kredit mikro yang disalurkan kepada 1000 penduduk rata-rata adalah Rp 14.9 juta per tahun dikelompok propinsi ini, dan jumlah ini lebih kecil dari rasio kredit rata-rata nasional. Nilai rasio kredit terendah yaitu Rp. 6.123 juta dan nilai rasio kredit tertinggi Rp. 23.07 juta 1000 penduduk.

Standar nilai baik jika koperasi memiliki ROA > 10%, sementara jika ROA antara 6% - 9% maka diberi skor 75. Nilai ROA rata-rata dari kelompok terisolasi sangat baik berkisar 12,78 % sehingga termasuk dalam kelompok berkriteria baik dengan skor 100. Nilai rasio ROA terendah yaitu 3,17 % dan tertinggi 61,35 %. Semakin tinggi ROA suatu koperasi, maka makin besar tingkat keuntungan koperasi yang artinya koperasi tersebut dapat mengefektifkan penggunaan assetnya.

Nilai rentabilitas rata-rata dari kelompok propinsi terisolasi di Indonesia sebesar 22,13% sehingga masuk dalam dalam kriteria baik dengan nilai 100. Rasio rentabilitas terendah 5,69% dan yang tertinggi 61,35%. Untuk jumlah tabungan yang dapat dihimpun rasio rata-rata penghimpunan dana koperasi di kelompok ini mencapai Rp 2,536 juta pertahun. Dengan nilai rasio dana tabungan yang dapat terhimpun rata-rata minimum Rp. 1,133 juta dan maksimum mencapai Rp 3,65 juta.

3.3.1.5 Deskripsi statistik untuk propinsi kelompok lain-lain

Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi statistik untuk propinsi lainnya yang terdiri dari propinsi dengan kriteria lainnya seperti Sumatera utara, Sumatera barat, Sumatera selatan, Lampung, Banten, Sulawesi selatan, Sulawesi utara, Kalimantan selatan, Maluku, Maluku utara. Deskripsi statistik untuk kelompok 4 (*pooled section*) terdiri dari 11 propinsi dengan hasil:

Tabel 3.5 Deskripsi statistik propinsi kelompok lain-lain

	R Akses	R Kredit	ROA	Rentabililas	R Tab
Nilai Min	0.0499	1.5872	0.0094	0.0132	0.3547
Nilai Rata-rata	0.1625	72.4443	0.0815	0.2284	2.0546
Nilai Max	0.2973	944.8448	0.1897	0.6932	6.3997
Standar Deviasi	0.0740	234.8143	0.0433	0.1689	1.8966
Jumlah Sampel	30	30	30	30	30

Prop : Sumut, Sumbar, Sumsel, lampung, sultsel,sulut, kalsel, maluku, maluku utara, banten

Nilai rasio akses rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia hanya 0.1625 unit per 1000 penduduk yang artinya bahwa sekitar 6154 penduduk harus bersaing untuk mengakses 1 unit LKM yang tersedia. Nilai r_{akses} terendah adalah 0.0499 unit dan tertinggi adalah 0.2973 unit.

Nilai rasio kredit rata-rata dikelompok propinsi ini adalah Rp 72,44 juta yang berarti bahwa pinjaman kredit mikro yang disalurkan kepada 1000 penduduk adalah Rp 72,44 juta per tahun. Nilai rasio kredit terendah yaitu Rp. 1,59 juta dan nilai rasio tertinggi Rp. 944,844 juta per 1000 penduduk.

Nilai ROA rata-rata dari kelompok terisolasi berkisar 8.15 % sehingga termasuk dalam kelompok berkriteria baik. Nilai rasio ROA terendah yaitu 0,94% dan tertinggi 18,97 %. Semakin tinggi ROA suatu koperasi, maka makin besar tingkat keuntungan koperasi yang artinya koperasi tersebut dapat mengefektifkan penggunaan assetnya.

Nilai rentabilitas rata-rata dari kelompok propinsi 4 lain-lain di Indonesia sebesar 22,84% sehingga masuk dalam dalam kriteria baik dengan nilai 100. Rasio rentabilitas terendah 1,32% dan yang tertinggi 69,3%.

Untuk jumlah tabungan yang dapat dihimpun rasio rata-rata penghimpunan dana koperasi di kelompok ini mencapai Rp 2,054 juta pertahun. Dengan nilai rasio dana tabungan yang dapat terhimpun rata-rata minimum Rp. 354,7 ribu dan maksimum mencapai Rp 6,4 juta per 1000 penduduk.

3.3.1.6 Deskripsi statistik antar kelompok

Pada bagian ini akan diuraikan deskripsi statistik perbandingan antar kelompok yang mengacu pada angka rata-rata. Perbandingan nilai rata-rata antar kelompok propinsi serta variabel dependen dan variabel yang diteliti sebagai berikut:

Tabel 3.6 Deskripsi statistik propinsi antar kelompok

	R_Akses	R_Kredit	ROA	Rentabilitas	R_Tab
Total (n= 87)	0.1968	51.2745	0.5215	2.1367	6.9873
Kel1 (n=24)	0.2070	15.6944	1.5928	7.1861	3.2209
Kel 2 (n=18)	0.2418	93.7320	0.1545	0.1806	23.9399
Kel 3 (n=15)	0.1951	14.9141	0.1280	0.2213	2.5357
Kel 4 (n=30)	0.1625	72.4443	0.0815	0.2284	2.0546

Nilai rasio akses rata-rata dari seluruh propinsi di Indonesia hanya 0.1968 unit per 1000 penduduk. Nilai rasio akses terendah ada dikelompok propinsi 4 (propinsi lain-lain) yaitu 0.1625 unit dan tertinggi ada dikelompok propinsi 2 yaitu 0.2418 unit.

Nilai rasio kredit rata-rata seluruh propinsi di Indonesia Rp 51,275 juta yang berarti bahwa pinjaman kredit mikro yang disalurkan kepada 1000 penduduk adalah Rp 51,275 juta per tahun. Nilai rasio kredit terendah yaitu Rp. 14,9 di propinsi kelompok 3 (propinsi terisolasi) dan nilai rasio kredit tertinggi Rp. 93,7 juta dikelompok propinsi 2 (propinsi kaya SDM).

Nilai rasio ROA terendah di kelompok propinsi lain-lain sebesar 8,15% dan tertinggi dikelompok propinsi SDA sebesar 159,28 %. Semakin tinggi ROA suatu koperasi, maka makin besar tingkat keuntungan koperasi yang artinya koperasi tersebut dapat mengefektifkan penggunaan assetnya.

Nilai rentabilitas rata-rata dari kelompok propinsi di Indonesia sebesar 2213,66% sehingga masuk dalam kriteria baik dengan nilai 100. Rasio rentabilitas

terendah 18,06% dikelompok propinsi SDM dan yang tertinggi 718, 611% dikelompok propinsi SDA.

Untuk jumlah tabungan yang dapat dihimpun rasio rata-rata penghimpunan dana koperasi di kelompok ini mencapai Rp 6,98 juta pertahun. Dengan nilai rasio dana tabungan yang dapat terhimpun rata-rata minimum Rp. 2,05 juta dikelompok propinsi lain-lain dan maksimum mencapai Rp 23,94 juta per 100 penduduk dikelompok propinsi SDM yang kaya akan sumber daya manusia.

3.4 Pemodelan data

Dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pentingnya variable-variabel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Uma sekaran 2006:164). Metode korelational ini berusaha menjawab keterkaitan faktor aksesibilitas, faktor kesehatan koperasi (return on asset (roa), persentase rentabilitas (rent), tabungan (tab)) dan pengaruhnya terhadap penyaluran pinjaman kepada UKM.

Untuk menganalisa pengaruhnya, penelitian ini menggunakan teknik ekonometrika analisis regresi, khususnya dengan permodelan regresi linier berganda. Dengan teknik ini maka dapat dianalisa hubungan antar variable yakni diasumsikan adanya hubungan linier yang terbentuk antara faktor-faktor fundamental yang diteliti dengan jumlah pinjaman yang disalurkan pada UKM.

Mengingat dalam penelitian ini data dikumpulkan secara time series selama 3 tahun dari tahun 2003 hingga 2005 dan diikuti dengan sejumlah data yang mempengaruhi kualitas kerja LKM yang berada pada periode tersebut (*cross section*), maka landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pemodelan teknik ekonometrika dengan data panel (*pooled data*).

Sebagaimana diketahui bahwa data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan satu waktu terhadap banyak variabel sedangkan data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Gabungan antara data *cross section* dengan *time series* ini merupakan *pooled data* (Nachrowi dan Usman, 2006).

3.4.1 Teknik Ekonometrika

3.4.1.1 Regresi Linier Berganda

Regresi linier adalah suatu alat analisis statistika untuk menjelaskan hubungan statistik antara variabel terikat (*dependent variabel*) terhadap lebih dari satu variabel bebas (*independent variabel*) melalui analisis regresi berganda dapat diramalkan nilai rata-rata populasi variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Data yang diuji dapat terdiri dari berbagai macam bentuk.

Diketahui bahwa data *time series* merupakan data yang terdiri dari beberapa periode dan menunjukkan pergerakan variabel dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data *cross sectional* adalah data yang diamati dalam suatu periode waktu yang sama. Sebagaimana diketahui, penelitian ini menitik beratkan pada penelitian data sekunder gabungan data *time series* dan data *cross section* atau sering disebut juga data panel (*pooled data*). Data yang telah terbentuk menjadi *pooled data* tetap dapat diregresikan secara linier atau disebut juga *pooled regression* (Gujarati, 2003).

Untuk estimasi yang sering digunakan dalam analisis regresi pada data *time series* maupun *cross section* adalah metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square*) sedangkan untuk pada *pooled data* digunakan metode kuadrat terkecil dengan sebutan *Pooled Least Square* (PLS). Pada dasarnya kedua metode itu sama yaitu metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Oleh Gujarati (2003:hal 91) dikatakan alasan digunakan OLS dan PLS biasanya sebagai berikut:

- a) Estimasi parameter metode OLS memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - i. Tidak bias
 - ii. Mempunyai varians yang kecil
 - iii. Efisien
 - iv. linier
- b) Prosedur OLS relatif sederhana
- c) Metode OLS cukup populer atau telah banyak digunakan secara luas dan hasilnya memuaskan.
- d) Mekanisme OLS mudah dimengerti
- e) OLS merupakan komponen terpenting dalam ekonometrika .

Dalam analisis regresi akan dikembangkan sebuah persamaan regresi yaitu suatu formula matematika untuk mencari nilai variabel dependen dari nilai variabel independen yang diketahui.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa metode OLS dapat memberikan penduga koefisien regresi yang baik atau bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimate*). Akan tetapi sifat tersebut didasarkan pada berbagai asumsi yang tidak boleh dilanggar agar penduga tetap BLUE, dengan kata lain model yang dihasilkan harus dapat lolos dari berbagai uji statistik (uji BLUE), estimasi model yang dihasilkan tidak boleh bias.

Untuk menghasilkan model yang baik persamaan linier regresi harus memenuhi beberapa asumsi, antara lain (Nachrowi dan Usman, 2005):

a) Homoskedastis (Homoscedasticity)

Untuk mengetahui pola data bersifat homoskedastis atau heteroskedastis, maka dilakukan dengan grafik scatterplot dengan melihat pola sebaran residualnya.

b) Tidak terdapat multikolinieritas (*multicollinearity*).

Persamaan regresi terbebas dari multikolinieritas diwakilkan oleh indikator VIF dibawah 5 dan Eigen Value dibawah 1.

Untuk memenuhi bentuk model regresi yang dapat dipertanggungjawabkan terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu:

1. terdapatnya hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Bersifat homoskedastis atau memiliki varians error yang konstan untuk tiap-tiap variabel bebas.
3. Bebas dari gangguan otokorelasi (variens error dari suatu model tidak tergantung kepada varians error lainnya)
4. Berdistribusi normal.
5. Antar variabel bebas tidak berkorelasi tinggi

Setelah model yang diajukan blue, maka untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan tes statistik meliputi *goodness of fit test*, *F-test*, *t-test* setelah itu melakukan perhitungan koefisien korelasi parsial. Langkah awal yaitu melakukan regresi data dengan model regresi berganda antara pinjaman yang diberikan pada UKM dengan aksesibilitas ukm kepada LKM, ROA, rentabilitas, dan jumlah tabungan dan perbedaan provinsi sebagai *dummy (variable independent)* sehingga diperoleh persamaan regresi sesuai model.

Persamaan regresi kemudian diuji dengan *t-test* untuk mengetahui signifikansi koefisien regresi secara parsial dan *F-test* untuk menguji koefisien regresi secara keseluruhan. Pengujian *F-test* untuk mengetahui apakah secara bersama-sama *variable independen* mempunyai hubungan yang berarti terhadap *variable dependen*. Selanjutnya *R-square* digunakan untuk menjelaskan mengenai kekuatan *variable independen* dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dari model tersebut. Dengan mengetahui besar kecilnya *R-square* dapat diketahui seberapa besar *variable independent* dalam model dapat menjelaskan pengaruh akses dan kesehatan koperasi pada pinjaman yang diberikan.

3.4.1.2 Estimasi parameter Model Penelitian

Berdasarkan teknik ekonometrika (Nachrowi dan Usman, 2006) untuk mengestimasi parameter model regresi linier berganda (majemuk) dengan data panel (*pooled data*) terdapat 3 teknik yang ditawarkan yaitu metode *Ordinary Least Square (OLS)* dan *Pooled Least Square (PLS)* termasuk didalamnya *Fixed effect Methode (FEM)* dan *Random effect Method (REM)*.

Metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Merupakan teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series* sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Akan tetapi untuk data panel ini sebelum membuat regresi data *cross section* atau *time series*, data ini harus diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang berarti telah digabungkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengestimasi model dengan metode OLS.

Dengan demikian, ketika data *cross section* dan *time series* digabungkan menjadi *pooled data* guna membuat regresi, maka hasilnya cenderung akan lebih baik dibandingkan regresi yang hanya menggunakan data *cross section* atau *time series* saja. Dengan OLS, maka diasumsikan bahwa β_0 akan sama (konstan) untuk setiap data *time series* dan *cross section* atau diasumsikan bahwa intersep maupun slope (koefisien pengaruh variable bebas terhadap variable terikat) tidak berubah baik antar individu maupun antar waktu.

Baltagi (1995:9) menjelaskan dalam analisa data panel ada tiga jenis pendekatan yang bisa dipilih untuk digunakan yaitu:

- a.. *Pooled Least Square* atau model kuadrat terkecil. Merupakan model yang paling sederhana dalam pengolahan data panel yaitu dengan melakukan regresi dengan metode kuadrat kecil biasa (OLS) pada data yang telah digabungkan. Model ini mengasumsikan parameter-parameter intersep dan koefisien sama lintas individu dan lintas waktu.
- b. *Fixed effect model* (FEM) atau model efek tetap. Model ini mengasumsikan parameter-parameter intersep dan koefisien berbeda antar daerah dan antar waktu dengan mengekspresikan perbedaan itu dalam variabel dummy bagi masing-masing daerah dan masing-masing waktu. Penambahan variabel boneka pada *fixed effect* dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan yang pada akhirnya mempengaruhi kekoefisienan dari parameter yang diestimasi. Dalam hal adanya gangguan (*error*) model ini mengasumsikan bahwa gangguan tidak bersifat acak untuk seluruh populasi, artinya efek dari gangguan diasumsikan memiliki pengaruh yang tetap. Oleh karenanya efek tersebut dianggap sebagai bagian dari konstanta intersep model persamaan.
- c. *Random effect model* (REM) atau model efek acak. Model ini mengasumsikan parameter-parameter intersep dan koefisien berbeda antar daerah dan antar waktu namun diekspresikan dalam *error term*. Disini gangguan diasumsikan bersifat acak untuk seluruh populasi, *error*

secara individual maupun kombinasi tidak saling berkorelasi. Dengan menggunakan REM kita dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dengan tidak mengurangi jumlahnya seperti pada *fixed effect model*.

Selanjutnya terkait dengan penggunaan model yang akan dipilih untuk diestimasi perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- b. Jika uji Chow (Chow test) menunjukkan penerimaan H_0 , maka estimasi dilakukan dengan menggunakan model *Pooled least Square*.
- c. Jika uji Chow menunjukkan penolakan H_0 , maka estimasi dilakukan dengan menggunakan *fixed effect model*.

Uji chow merupakan pengujian untuk memilih model yang hendak digunakan, PLS atau FE. Uji Chow ini menghitung F-statistik yang diperoleh dengan membandingkan nilai residual sum square antara kedua model tersebut dengan mempertimbangkan derajat kebebasannya sehingga diperoleh nilai Chow yang kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel.

Hasil yang diperoleh akan dijadikan dasar untuk menerima atau menolak H_0 bahwa pembatasan nilai intersep antar individu adalah benar. Jika nilai Chow lebih besar dari F tabel maka cukup alasan untuk menolak H_0 sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect* dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini kan mengestimasi sebuah model yang secara ringkas faktor-faktor dalam desain penelitian, variabel-variabel penelitian, jenis variabel, dan singkatan nama variabel ditampilkan dalam model.

3.4.1.3 Pengujian heteroskedastisitas

Gejala heteroscedastisitas banyak dijumpai pada data *cross sectional* karena data *cross section* sangat heterogen terutama untuk melihat perbedaan dari suatu kelompok atau kelas suatu sample dimana pengamatan dilakukan pada individu yang berbeda pada saat yang sama, maka dapat diduga bahwa akan ada masalah heteroscedastisitas. Sifat heteroskedastisitas adalah varian masih tidak bias dan linier tetapi tidak mempunyai variasi minimum terbaik.

Selain pengujian formal seperti Uji Park dan Goldfeld-Quandt, secara prinsip pengujian heteroskedastisitas dapat pula digunakan dengan analisa grafik scatterplot yang pada prinsipnya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada grafik scatterplot tersebut. Artinya adalah heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana $\text{var}(\mu_i^2)$ tidak konstan. Dengan demikian pada suatu nilai variabel bebas X atau sekelompok nilai $\text{var}(\mu_i^2)$ yang berbeda dengan variabel bebas X atau sekelompok nilai X lainnya, sehingga heteroskedastisitas dinyatakan ada bila nilai-nilai (μ_i^2) diplot dengan nilai-nilai variabel bebas menemui suatu pola atau bentuk yang tidak random (acak). Dasar pengambilan keputusan (Nachrowi dan Usman, 2005) dalam menggunakan grafik scatterplot:

- a. jika data (titik) menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol dan tidak berpola, maka model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.
- b. Jika data (titik) menyebar tidak secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol dan berpola (melebar kemudian menyempit, melengkung, membentuk garis lurus), maka dapat mengindikasikan bahwa model regresi terdapat heteroskedastisitas.

Gangguan heteroskedastisitas juga dapat terjadi pada sampel *time series*, *cross section* maupun *pooled data*. Gangguan ini timbul akibat adanya *error variance* yang berbeda dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Selain dengan metode grafik ada metode lainnya dengan mendeteksi maupun mengantisipasi masalah heteroskedastisitas ini. Dampak dari heteroskedastisitas:

- a) akibat tidak konstan variasi maka salah satu dampak yang ditimbulkan adalah lebih besar variansi dari taksiran.
- b) Lebih besar variansi taksiran akan mempengaruhi uji hipotesis (uji t dan uji F) karena kedua uji tersebut menggunakan besaran variasi taksiran, akibatnya kedua uji hipotesis tersebut kurang akurat.

- c) Lebih besar variasi taksiran akan mengakibatkan standar error taksiran yang lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi sangat besar.

Akibat dari semua dampak tersebut mengakibatkan kesimpulan yang diambil akan menyesatkan.

Langkah pertama untuk mengetahui apakah varian residual dari model tersebut konstan atau mengandung heteroskedastisitas yaitu melihat angka yang ditunjukkan oleh nilai F-stat, obs *R square, dan hasil uji white. Apabila dari hasil pengujian ternyata varian yang dihasilkan tidak konstan maka dilanjutkan dengan langkah pengujian berikutnya. Dengan adanya heteroskedastisitas estimator *ordinary least square* (OLS) tidak menghasilkan estimator yang BLUE dimana $\text{var}(V_i) = r^2$ (konstan), sehingga hasil perhitungan standart error metode OLS tidak bias dipercaya kebenarannya dan interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Jika terjadi heteroskedastisitas, maka salah satu langkah penanggulangannya adalah dengan melakukan transformasi dengan logaritma. Transformasi ini gunanya untuk memperkecil skala antar variabel bebas. Dengan makin sempitnya range nilai observasi diharapkan variasi error juga tidak akan berbeda besar antara kelompok observasi adapun model yang digunakan adalah:

$$\ln Y_j = \beta_0 + \beta_1 \ln X_j + U_j$$

3.4.1.4 Pengujian multikolinieritas

Sekalipun secara substansi tidak berkorelasi, multikolinieritas berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya informasi yang mubazir dari persamaan yang dibuat dalam penelitian. Asumsi yang terjadi dalam regresi linear berganda adalah tiap variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi. Koefisien regresi biasanya diinterpretasikan sebagai ukuran perubahan variabel terikat jika salah satu variabel besar meningkat sebesar 1 unit dan seluruh variabel lain tetap.

Dalam prakteknya, umumnya multikolinieritas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara sistematis tidak berkorelasi (korelasi

= 0) sekalipun secara substansi tidak berkorelasi. Akan tetapi ada multikolinieritas yang signifikan (harus mendapat perhatian khusus) dan tidak signifikan (mendekati nol dan dapat diabaikan). Bila ditemukan kolinieritas sempurna, maka salah satu dampak yang ditimbulkan adalah tidak dapat dihitungnya koefisien regresi.

Terjadinya multikolinieritas biasanya diketahui dengan memperhatikan *variance inflation factor* (VIF) yang dihasilkan dari kegiatan estimasi persamaan regresi. Jika nilai VIF lebih dari 5 ($VIF > 5$), maka model yang dihasilkan mengandung gangguan multikolinieritas. Multikolinieritas menimbulkan beberapa akibat seperti variable besar, interval kepercayaan lebar, uji-t tidak significant, R² tinggi tapi tidak banyak yang signifikan dalam uji-t terkadang taksiran koefisien yang didapat memiliki nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat memberikan informasi yang menyesatkan.

Akibat terjadinya gangguan ini R-square (R^2) sebagai parameter penjelas terhadap variabel terikat akan mengalami peningkatan secara persentase akibat sedikit taksiran koefisien regresi yang signifikan secara statistik dan taksiran parameter akan semakin sensitif dengan perubahan dalam data. Petunjuk dari multikol:

- a) Uji F dan R² significant diikuti dengan stat-t yang tidak significant.
- b) Apabila persamaan regresi tidak significant sedangkan dalam uji F significant.
- c) Dengan melihat Variance Inflation Faktor (VIF) dimana $0 \leq VIF \leq 1$ jika VIF mendekati 1 maka tidak ada kolinieritas berganda.

Terdapat beberapa cara dan uraian langkah-langkah untuk mengatasi gangguan multikol ini yaitu (Bakri, 2004):

- a. Dengan mengurangi variabel bebas yang mempunyai hubungan linier dengan variabel lainnya atau mengubah bentuk model.
- b. Dengan memilih sampel baru, karena gangguan ini pada hakekatnya adalah fenomena sampel.
- c. Dengan mentransformasi pengubah pada tiap-tiap variabel.

Langkah-langkah untuk mengetahui adanya korelasi diantara variable-variabel independent sehingga dikatakan terjadi multikolinieritas bisa dilihat melalui hasil penghitungan regresi dipersamaan berikutnya dibandingkan dengan dengan regresi sederhana untuk masing-masing variable, jika hasil yang didapatkan berbeda kemungkinan ada korelasi diantara variable bebas.

Untuk meyakinkan adanya gejala multikolinieritas digunakan uji formal dengan VIF dan Tolerance. Jika VIF kecil atau < 1 , maka dapat diduga tidak ada multikolinieritas dan sebaliknya jika $VIF > 1$ diduga ada korelasi antara variable bebas. Demikian juga dengan nilai Tolerance (Tol). Jika nilai TOL kecil atau < 1 , maka dapat diduga tidak ada multikolinieritas dan sebaliknya jika $TOL > 1$ diduga ada korelasi antara variable bebas.

3.4.1.5 Koefisien Determinasi

Koefisien daterminasi (Goodness of fit) merupakan cara lain dalam mengukur hubungan antara variable terikat dengan variable bebas. Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Nachrowi dan Usman, 2006).

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variable terikat Y, dalam hal ini adalah $Y = \%PBPL$, dapat diterangkan oleh variable bebas X, dalam hal ini adalah ke 6 faktor yang diteliti. Bila koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$) artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. dengan kata lian jika $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

Bila tidak ada penyimpangan tentunya tidak akan ada error. Bila hal tersebut terjadi, maka $SSE = 0$, yang berarti $SSR = SST$ atau $R^2 = 1$. Dengan kata lain semua titik observasi berada tepat digaris regresi. Jadi SST sesungguhnya adalah variasi dari data, sedangkan SSR adalah varians dari garis regresi yang dibuat. Oleh karena itu R^2 dapat dihubungkan langsung dengan F-statistik (hasil uji F). Dengan demikian baik

atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. R^2 didefinisikan atau dirumuskan berdasarkan langkah-langkah sebagaimana yang dilakukan pada tabel ANOVA.

Adapun rumusannya adalah:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(n-k-1)F}{(n-k-1)F + k}$$

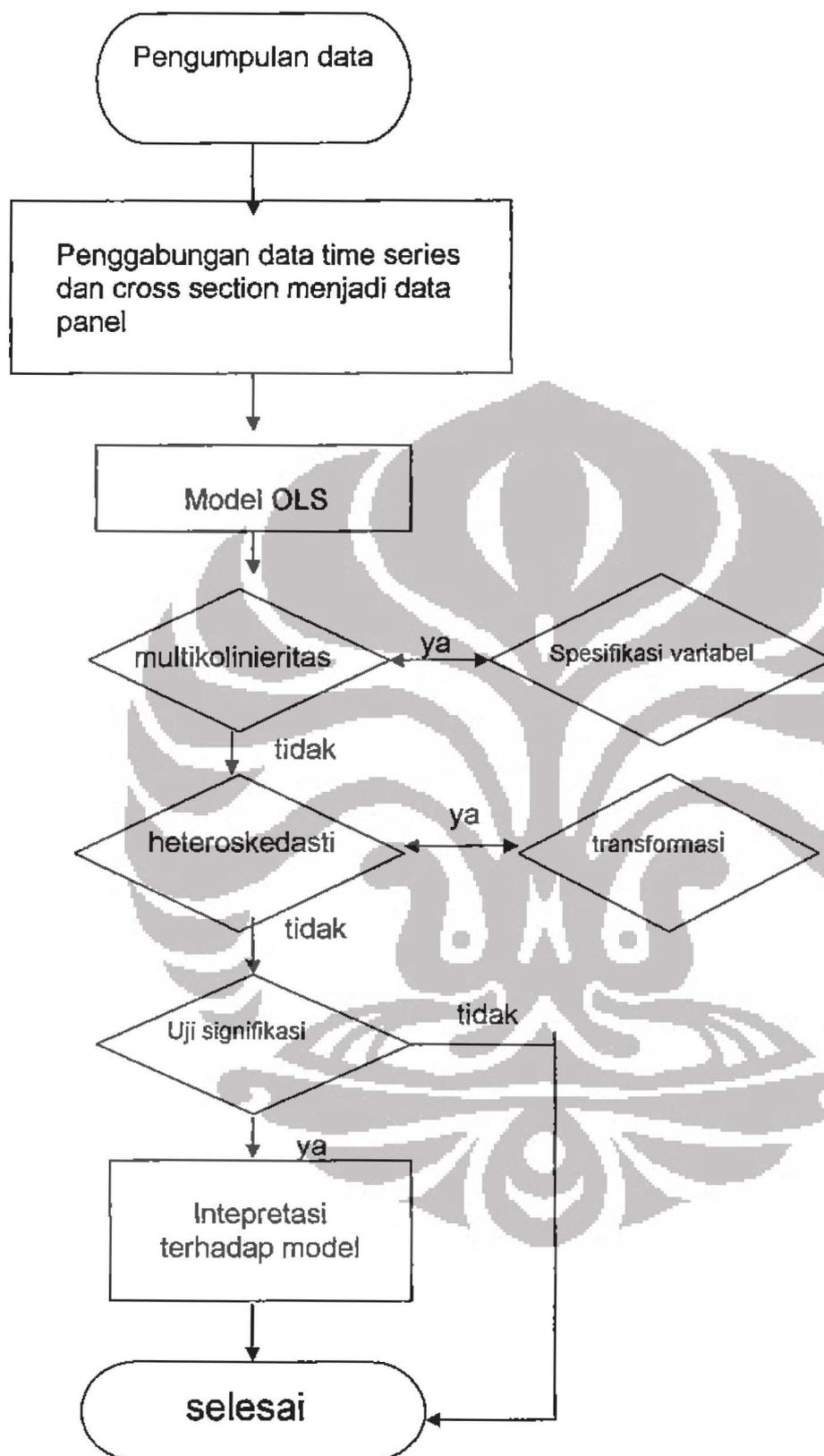
3.3.1.6 Koefisien korelasi

Apabila nilai koefisien korelasi sudah terestimasi, langkah selanjutnya adalah menguji signifikansi dari koefisien korelasi tersebut melalui interval keyakinan (*confidence interval*). Signifikansi korelasi berhubungan dengan hipotesa yang diajukan pada saat model dipergunakan. Interval keyakinan merupakan interval nilai yang diyakini dimana parameter regresi yang sebenarnya terletak.

Uji statistik untuk menerima ataupun menolak hipotesa melalui koefisien regresi pada umumnya menggunakan uji t dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Apabila uji t-statistik lebih besar dari nilai t pada tabel kritikal value, maka hipotesa ditolak dan sebagai konsekwensinya hipotesa alternatif diterima. Nilai kritis untuk sampel yang besar dengan tingkat signifikansi 5% adalah $t_c = 1,96$. Dimana pada umumnya apabila nilai uji t statistic ≥ 2 , maka tidak ada alasan untuk menerima hipotesa (Nachrowi, 2002 hal: 25).

3.5 Alur tahap penyelesaian

Gambar 3.1 Alur penyelesaian



BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemodelan data

Sebagaimana diketahui dalam bab sebelumnya bahwa fungsi penduduk dibawah garis kemiskinan dalam penelitian ini yaitu: Pinjaman yang diberikan = f(akses, ROA, Rentabilitas, tabungan), maka secara sederhana pemodelan awal yang terbentuk adalah:

$$\text{Kredit} = a_0 + (a_1 \text{ Akses} + a_2 \text{ ROA} + a_3 \text{ Rent} + a_4 \text{ Tab}) + (a_5 \text{ D}_{sda} + a_6 \text{ D}_{sdm} + a_7 \text{ D}_{iso}) + e \quad (4.1)$$

Dimana :

- Kredit = besar pinjaman yang diberikan perpropinsi
- $a_0 = \text{intercept}$
- $a_1 - a_9 = \text{slope}$
- $e = \text{error}$
- Akses = jumlah koperasi ditiap propinsi
- ROA (*Return On Asset*) = perbandingan sisa hasil usaha dengan asset
- Rentabilitas = persentase keuntungan Koperasi berbanding modal
- Tabungan = jumlah tabungan masyarakat per propinsi
- $\text{D}_{sda}, \text{D}_{sdm}, \text{D}_{iso} = \text{dummy kriteria propinsi}$

Pengujian data panel dalam penelitian ini menggunakan metode pemodelan dalam *Common ordinary Least Squares (OLS)*. Yang mendasari metode OLS adalah asumsi yang mengatakan bahwa semua koefisien (*slope* atau *intercept*) adalah konstan antar individu maupun waktu, jika hasil metode OLS untuk pooling data penelitian adalah tidak sah maka digunakan metode FEM (*Fixed Effect Methods*). Regresi dengan metode OLS menggunakan bantuan program SPSS versi 16 for Windows.

inflation faktor) dimana $VIF_t = 1/(1-R_t)^2$. Apabila nilai $VIF \leq 5$ maka dianggap tidak ada kolineritas berganda. Dari nilai VIF nya diketahui juga bahwa terjadi multikol antara variabel ROA dan Rentabilitas dimana masing-masing variabel mempunya besaran VIF 30,13 dan 29,24, sehingga jika VIF lebih dari 5 ($VIF \geq 5$) atau $VIF \geq 10$ (menurut pendapat lain) maka menunjukkan terjadi multikol terhadap kedua variabel tersebut. Sehingga harus dilanjutkan dengan langkah-langkah guna menghilangkan multikolinieritas.

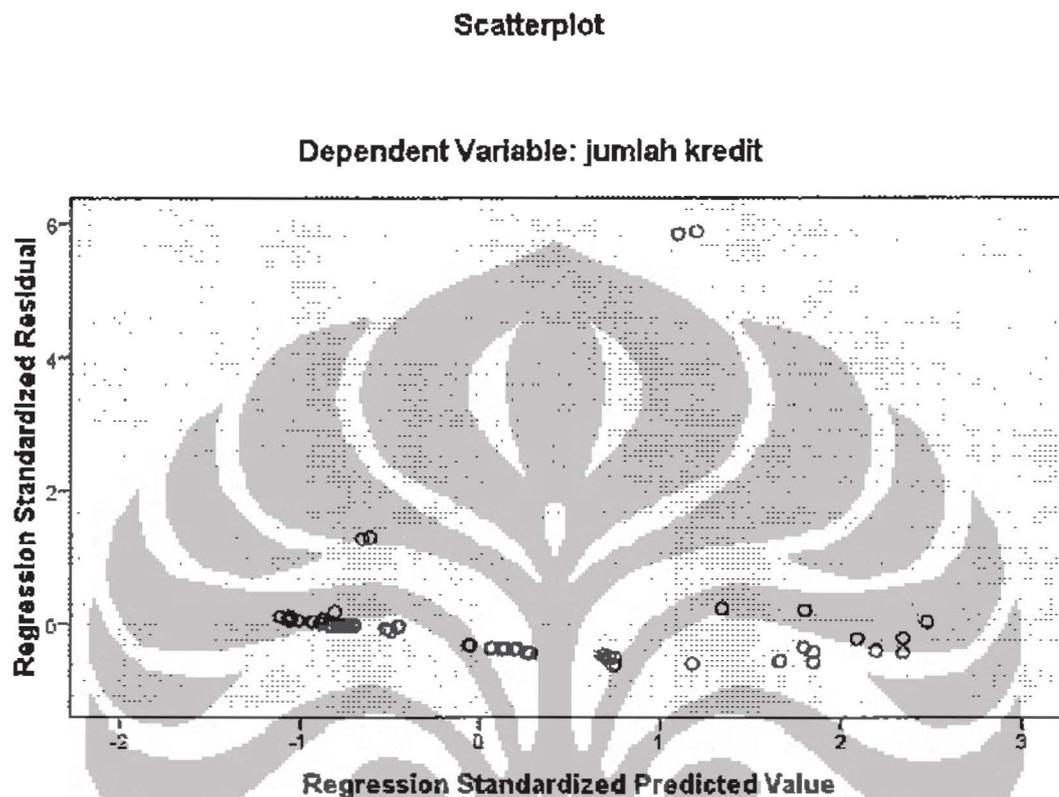
Tabel 4.1 Hasil regresi berganda model awal

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-126603.358	290153.055		-0.436	0.664		
Jumlah koperasi	284.952	140.49	0.355	2.028	0.046	0.358	2.79
ROA	3884.114	390467.821	0.006	0.01	0.992	0.033	30.137
Rentabilitas	-166.434	73398.488	-0.001	-0.002	0.998	0.034	29.244
Jumlah tabungan	0.735	1.556	0.074	0.472	0.638	0.449	2.226
D1	-208699.844	614401.226	-0.069	-0.34	0.735	0.265	3.777
D2	3350.194	411778.141	0.001	0.008	0.994	0.678	1.475
D3	472060.648	356377.763	0.184	1.325	0.189	0.572	1.75
R ² = 0.133				F-stat		1.728	
Durbin-watson = 1.098				Sig		0.114	

Sumber: lampiran 3

Metode scatterplot merupakan salah satu cara untuk mengetahui suatu varian bersifat konstan atau berubah-ubah. Prinsip metode Grafik scatterplot adalah memeriksa pola residual terhadap taksiran Y. Heteroskedastis akan terdeteksi bila plot menunjukkan pola yang sistematis. Gambar 4.1 grafik plot dibawah ini menunjukkan bahwa varians pada model awal ini sebagian plot (titik) berkumpul dibeberapa lokasi atau dapat dikatakan membentuk suatu pola sehingga dapat dikatakan bahwa berapapun Y, nilai residual yang dihasilkannya tidak sama atau berubah-ubah sehingga disebut mengalami masalah heteroskedastis.

Gambar Tabel 4.1 grafik scatterplot untuk model awal

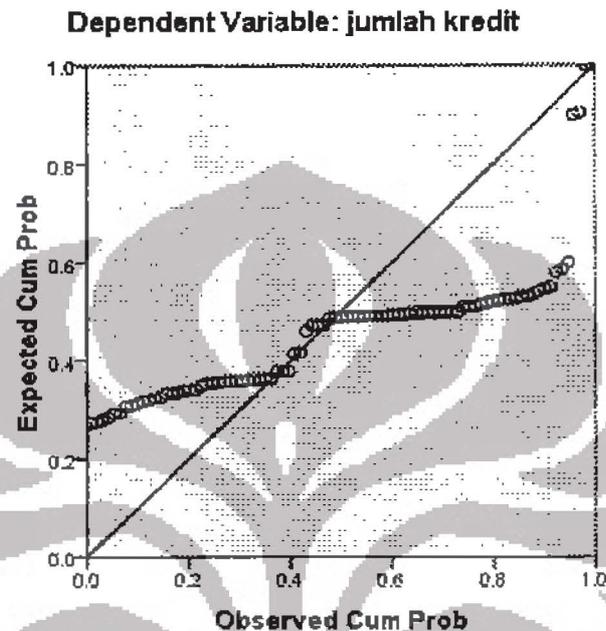


Dikarenakan hasil yang diperoleh sangat tidak memuaskan dimana R^2 hanya 13,3%, hasil uji t menjelaskan banyak variabel yang tidak signifikan, terjadi multikolinieritas dan terjadi heteroskedastisitas pada hasil regresi awal sehingga diperkirakan data yang ada tidak stasioner.

Hal ini diperkuat dengan tabel 4.3 dilihat dari grafik Normal Plot dan terlihat bahwa arah grafik tidak mengikuti garis lurus kenormalan data, sehingga data dapat dikatakan sebagai data yang berdistribusi normal dan ternyata hasil pengolahannyapun menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan mengalami berbagai masalah seperti heteroskedastisitas dan multikol.

Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot model awal

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



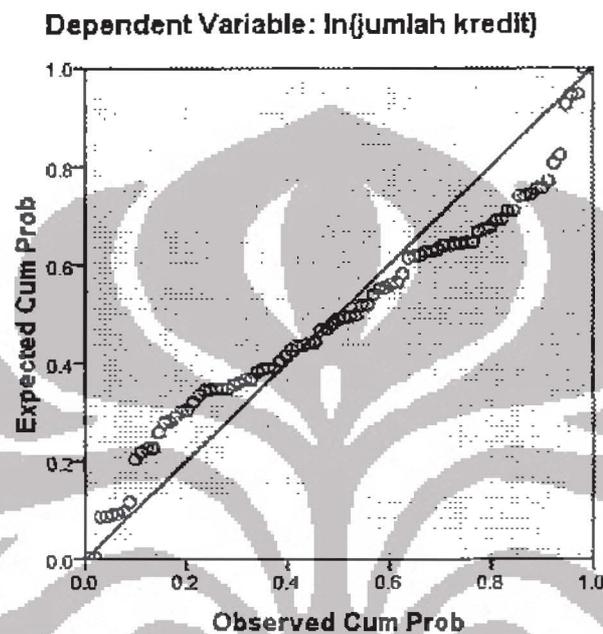
Berdasarkan hasil regresi diatas dimana terjadi heteroskedastisitas, maka dibuatlah transformasi dengan logaritma. Transformasi ini ditujukan untuk memperkecil skala antar variabel bebas. Sehingga dengan makin sempitnya range nilai observasi diharapkan variasi nilai error juga tidak akan berbeda besar antar kelompok observasi. Model yang digunakan sekarang adalah:

$$\text{Ln Kredit} = a_0 + (a_1 \text{LnR_akses} + a_2 \text{LnROA} + a_3 \text{LnRent} + a_4 \text{LnTab}) + (a_5 \text{Dsda} + a_6 \text{Dsdm} + a_7 \text{Diso}) + e \quad (4.2)$$

Model ini kemudian diregressi dengan melihat tingkat kenormalan datanya. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa plot data berbaris mengikuti garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data menjadi normal dan baik setelah dilakukan transformasi logaritma.

Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot setelah variabel di Ln

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sebelum dilakukan uji hipotesis untuk menguji kelayakan model, kembali dilakukan uji signifikansi model berikutnya. Data panel yang sudah ditransformasikan ini akan diregress kembali. Pada tabel 4.5 terlihat bahwa R^2 meningkat menjadi 77,2% yang artinya variabel-variabel bebas yang diuji seperti jumlah koperasi, ROA, Rentabilitas dan tabungan dapat menjelaskan variabel terikatnya yaitu pinjaman yang diberikan sebesar 77,2% dan sisanya diterangkan oleh variabel yang lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

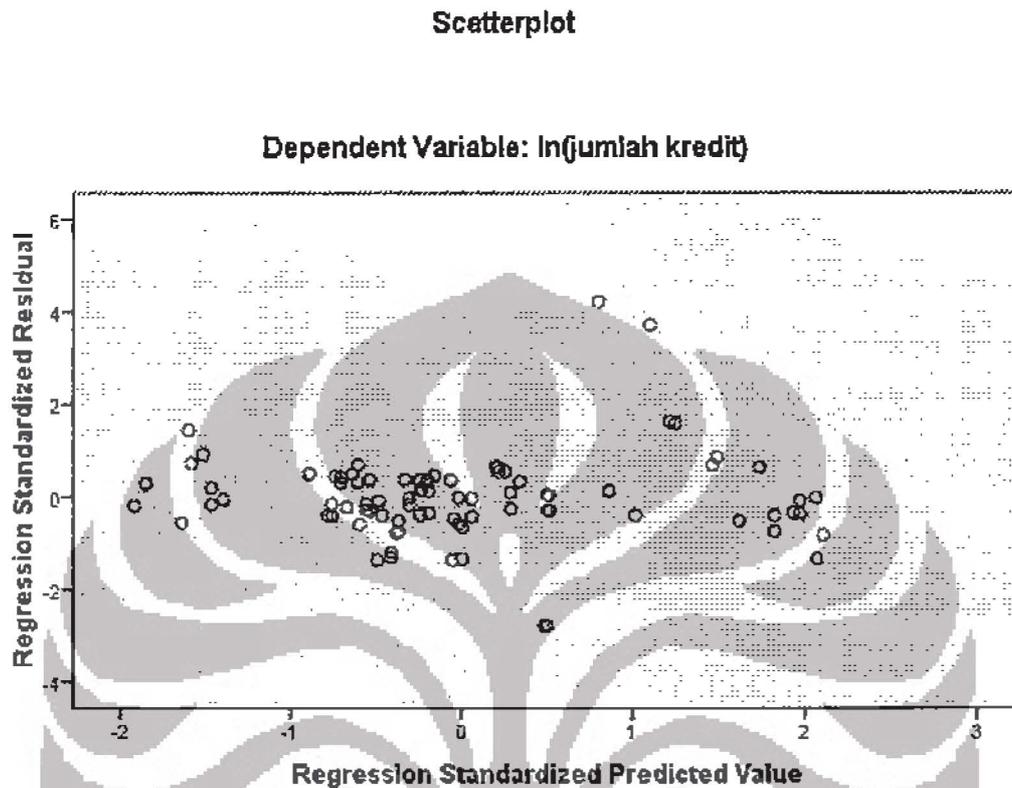
Tabel 4.2 Regresi dengan variabel Ln

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.585	0.925		1.713	0.091		
ln(jumlah koperasi)	0.666	0.194	0.38	3.426	0.001	0.234	4.279
ln(roa)	-0.027	0.145	-0.022	-0.187	0.852	0.207	4.839
ln(rent)	0.083	0.14	0.071	0.593	0.555	0.200	4.999
ln(tab)	0.561	0.112	0.581	5.003	0.000	0.214	4.676
D1	-0.183	0.392	-0.044	-0.468	0.641	0.321	3.116
D2	-0.043	0.286	-0.01	-0.15	0.881	0.693	1.443
D3	0.083	0.244	0.024	0.342	0.733	0.602	1.661
R ² = 0.772				F-stat	38,291		
Durbin-watson = 1.998				Sig	0.0000		

Dari hasil uji t menunjukkan variabel roa, rentabilitas dan dummy propinsi tidak signifikan mempengaruhi faktor pemberian kredit kecuali faktor akses dan tabungan. Uji F menunjukkan hasil yang signifikan dimana berarti variabel bebasnya bersama-sama akan mempengaruhi variabel pemberian kredit. Uji multiko dengan pendekatan nilai VIF-nya diketahui bahwa sudah tidak terjadi multikol antara variabel roa dan rentabilitas dimana masing-masing variabel mempunyai besaran VIF yang kurang dari 5 yaitu sebesar 4.839 dan 4.999 namun dapat dikatakan bahwa kedua variabel ini masing-masing mempunyai nilai VIF yang cukup tinggi. Jika dilihat dari tolerancenya nilai dari variabel-variabel bebasnya mendekati nol artinya berdasarkan nilai TOL variabel-variabel ini dikatakan masih mengandung masalah multikolinieritas, sehingga harus dilanjutkan lagi langkah-langkah menghilangkan multikolinieritas.

Berdasarkan gambar 4.4 grafik plot ini menunjukkan bahwa varians pada model awal ini sebagian plot (titik) berkumpul dibeberapa lokasi namun banyak juga titik yang mewnyebar sehingga dapat dianggap bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk suatu pola sehingga dapat dikatakan bahwa berapapun Y, nilai residual yang dihasilkannya konstan sehingga dikatakan bahwa model ini tidak terjadi masalah heteroskedastis.

Grafik 4.4 grafik scatterplot dengan data yang di Ln



Salah satu cara untuk menghilangkan problem multikolinieritas adalah menghilangkan salah satu variabel independennya yang mempunyai angka kolinieritas tertinggi untuk dijadikan suatu model yang baru. Mengingat nilai yang ditunjukkan oleh kedua nilai TOL variabel yang terkena multikol tidak terlalu jauh nilai besarnya sehingga dibuat dua buah model baru sebagai berikut:

Model 2 (a):

$$\text{Ln Kredit} = \alpha_0 + (\alpha_1 \text{LnR_akses} + \alpha_2 \text{LnRent} + \alpha_3 \text{LnTab}) + (\alpha_4 \text{Dsd} + \alpha_5 \text{Dsdm} + \alpha_6 \text{Diso}) + e \quad (4.3)$$

Model 2 (b):

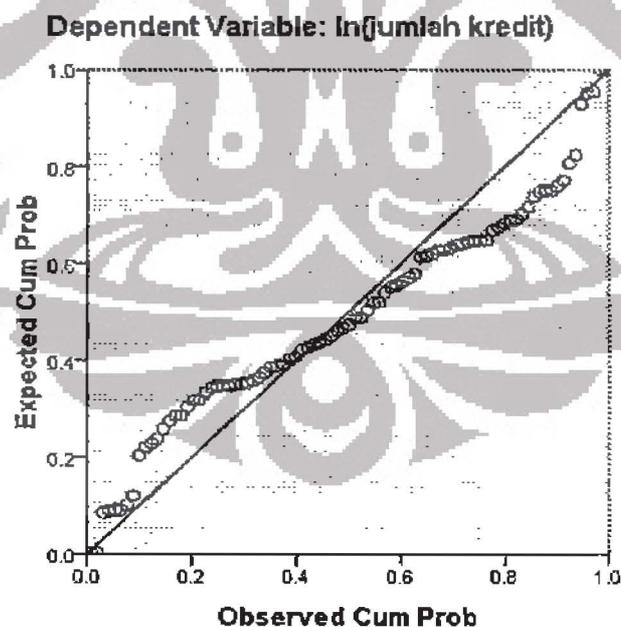
$$\text{Ln Kredit} = a_0 + (a_1 \text{LnR_akses} + a_2 \text{LnROA} + a_3 \text{LnTab}) + (a_4 \text{DsdA} + a_5 \text{DsdM} + a_6 \text{Diso}) + e \quad (4.4)$$

Kemudian kedua model baru ini masing-masing akan dilakukan regresi kembali dengan metode OLS dengan maksud untuk mengetahui bahwa model ini sudah sesuai dengan standar asumsi OLS yaitu BLUE guna memenuhi asumsi model yang baik dengan hasil regresi sebagai berikut:

Model 2 (a) ini kemudian akan diregressi dengan melihat tingkat kenormalan datanya lebih dahulu. Gambar 4.5 menunjukkan bahwa plot data berbaris mengikuti garis diagonal sehingga disebut mempunyai distribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa data adalah normal.

Gambar 4.5 Grafik Normal P-Plot model 2 (a)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Universitas Indonesia

Tabel 4.3 menunjukkan koefisien regresi model 2 (a). Hasil pengujian regresi model 2(a) diperoleh R^2 sebesar 77,2% yang artinya variabel-variabel independen (akses, rentabilitas dan tabungan) dapat menjelaskan variable kredit yang diberikan sebesar 77,2%. Dari hasil uji t diketahui bahwa variabel rentabilitas dan

Tabel 4.3. Hasil regresi berganda model 2 (a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.657	0.839		1.976	0.052		
In(jumlah koperasi)	0.652	0.178	0.372	3.654	0.000	0.274	3.65
In(rent)	0.06	0.067	0.052	0.89	0.376	0.850	1.176
In(tab)	0.566	0.108	0.586	5.214	0.000	0.226	4.433
D1							
D2	-0.174	0.387	-0.042	0.451	0.653	0.326	3.069
D3	-0.044	0.284	-0.01	0.157	0.876	0.694	1.442
D3	0.092	0.238	0.026	0.386	0.700	0.624	1.602
R ² = 0.772			F-stat	45.21			
Durbin-Watson = 1.997			sig	0.000			

Sumber: lampiran

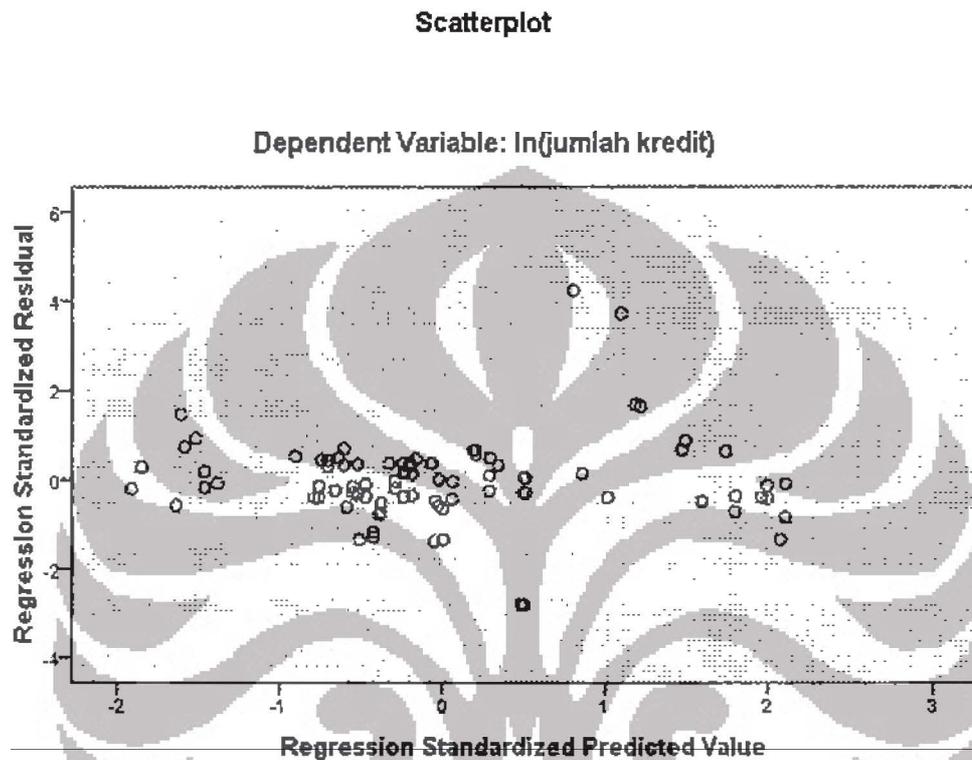
variabel dummy propinsi tidak signifikan, signifikansi hanya terjadi pada faktor akses dan tabungan yang akan mempengaruhi besar pinjaman yang diberikan kepada UKM.

Berdasarkan uji F diketahui bahwa model ini signifikan yang artinya model ini jika dilakukan bersama-sama akan mempengaruhi variable pemberian kredit. Sedangkan untuk variable rent nilai VIF-nya sudah tidak mengalami masalah multikol dan variable yang lain tidak menunjukkan adanya multikolinieritas karena nilai VIF yang diperoleh tidak melampaui nilai 5 dan hanya faktor tabungan yang memiliki nilai mendekati 5, namun secara keseluruhan dianggap model 2(a) ini bebas dari permasalahan multikolinier.

Pada gambar 4.6 grafik scatterplot ini menunjukkan bahwa varians pada model 2 (a) ini sebagian plot (titik) berkumpul di beberapa lokasi namun banyak juga titik yang menyebar sehingga dapat dianggap bahwa titik-titik tersebut tidak membentuk suatu pola sehingga dapat dikatakan bahwa berapapun Y, nilai residual yang

dihasilkannya konstan sehingga dikatakan bahwa model ini tidak terjadi masalah heteroskedastis.

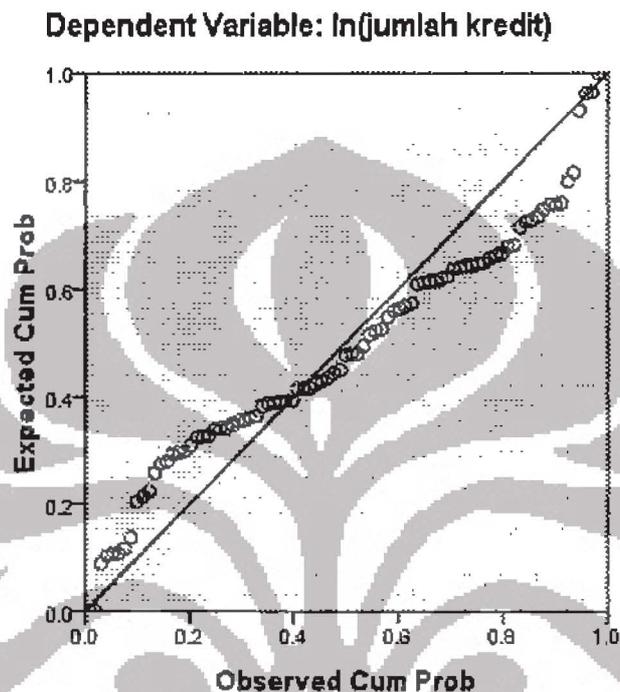
Gambar 4.6 Grafik scatterplot model 2 (a)



Data yang akan digunakan pada model 2 (b) ini akan diregressi perlu dilihat tingkat kenormalan datanya lebih dahulu. Gambar 4.7 menunjukkan bahwa plot data berbaris mengikuti garis diagonal dan penyimpangannya tidak jauh dari garis sehingga dapat dikatakan bahwa data mengikuti distribusi normal dan merupakan data yang baik.

Gambar 4.7 Tabel Normal P-Plot model 2 (b)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil pengujian regresi model 2(b) pada table 4.4 diperoleh R^2 sebesar 77,1% yang artinya variabel-variabel independen (akses, roa dan tabungan) dapat menjelaskan variable pemberian kredit sebesar 77,1%. Dari hasil uji t, hasil yang signifikan diperoleh atas faktor akses dan tabungan yang akan mempengaruhi pemberian kredit kepada UKM dan faktor roa dan dummy propinsi dianggap tidak mempengaruhi pemberian kredit kepada UKM. Namun berdasarkan uji F semua variabel secara bersama-sama akan mempengaruhi pemberian kredit kepada UKM yang ditunjukkan dengan hasil uji F yang signifikan.

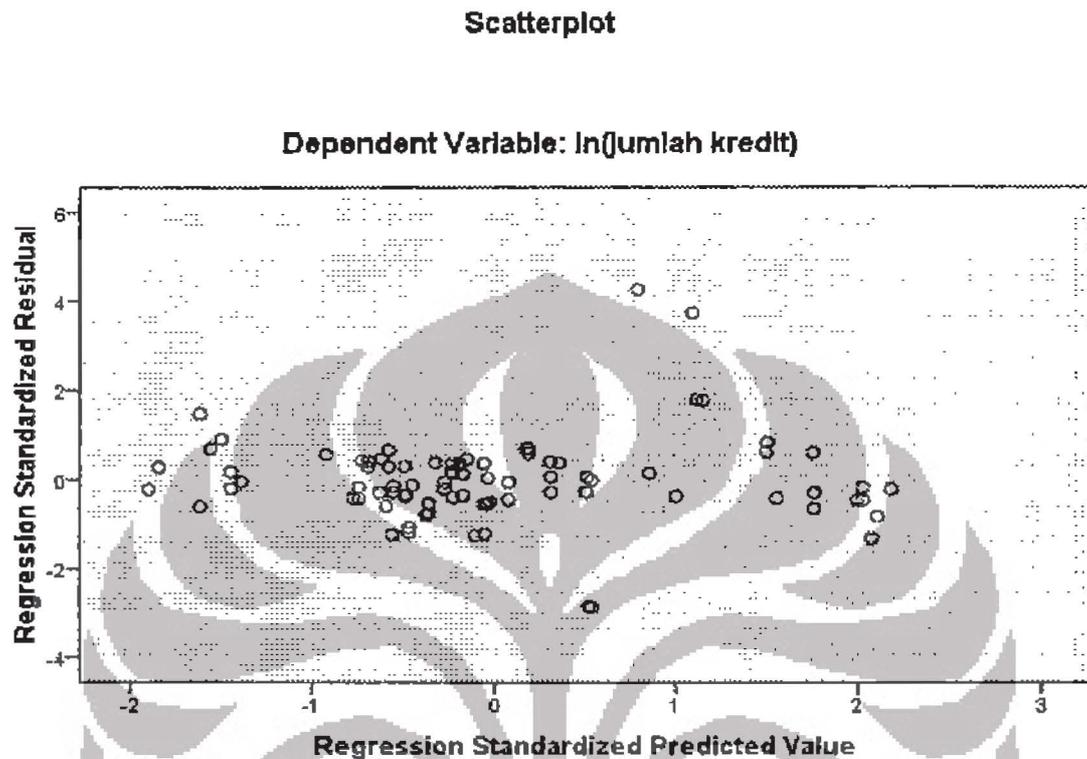
Tabel 4.4 Hasil regresi berganda model 2 (b)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.778	0.863		2.06	0.043		
ln(jumlah koperasi)	0.617	0.176	0.353	3.516	0.001	0.284	3.52
ln(roa)	0.048	0.07	0.039	0.685	0.495	0.878	1.139
ln(tab)	0.58	0.107	0.601	5.423	0.000	0.233	4.291
D1	-0.185	0.39	-0.045	0.474	0.637	0.321	3.116
D2	-0.067	0.282	-0.015	0.238	0.812	0.707	1.414
D3	0.089	0.243	0.025	0.368	0.714	0.603	1.658
R ² = 0.771				F-stat	44.98		
Durbin-Watson = 1.001				Sig	0.000		

Dilihat dari hal multikolnya masing-masing variable tidak menunjukkan adanya multikolineritas ditunjukkan dengan nilai VIF yang diperoleh yang tidak melampaui nilai 5 dan variabel roa sudah tidak mengalami multikol. Hanya variabel tabungan yang mempunyai nilai VIF mendekati 5 dan tetap dianggap model 2 (b) ini bebas dari permasalahan multikolinier.

Prinsip metode Grafik scatterplot adalah memeriksa pola residual terhadap taksiran Y. Metode scatterplot merupakan salah satu cara untuk mengetahui suatu varian bersifat konstan atau berubah-ubah. Heteroskedastis akan terdeteksi bila plot menunjukkan pola yang sistematis. Gambar 4.8 memperlihatkan varians model 2 (b) ini tidak membentuk suatu pola yang sistematis dan random, sehingga dapat dikatakan bahwa berapapun Y, nilai residual yang dihasilkannya adalah sama atau varians konstan untuk semua nilai variabel dependen bersifat homoskedastis.

Gambar 4.8 Sscatterplot model 2 (b)



Tabel 4.5 ikhtisar hasil signifikansi model

Model	R ²	F-test; $\alpha = 0.05$	Sig	kesimpulan
2 (a)	0.772	45.21	0.0000	signifikan
2 (b)	0.771	44.98	0.0000	signifikan

Hasil regresi pada kedua model menunjukkan bahwa dari nilai R² kedua model tersebut (2a dan 2b) memiliki nilai yang tidak jauh berbeda artinya variabel-variabel dependen yang terdapat pada masing-masing model dapat menjelaskan variabel independennya dengan persentase yang sama. Sedangkan untuk hasil F-testnya masing-masing model signifikan dengan nilai F-test yang hampir sama pula. Hasil uji ini menunjukkan bahwa pada model 2(a) dan 2(b) faktor akses, Return on Asset (ROA), rentabilitas dan rasio tabungan bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian pinjaman kepada UKM.

Nilai R^2 pada model 2 (a) sebesar 0,772 yang artinya 77,2% variabel kredit yang diberikan dapat dijelaskan oleh variabel bebas akses, Rentabilitas dan tabungan, serta variabel dummy (D1, D2, D3). Sedangkan nilai R^2 pada model 2 (b) sebesar 0.771 menjelaskan bahwa 77,1% variasi dari kredit yang diberikan dapat dijelaskan oleh variabel bebas akses, ROA dan tabungan, serta variabel dummy (D1, D2, D3).

Tabel 4.6 Iktisar hasil T-test dan signifikansi model regresi

Model	ln akses	ln roa	ln rentabilitas	ln tab	Dummy		
					Dsda	Dsdm	Diso
2 (a)	3.654	X	0.89	5.214	-0.451	-0.157	0.386
sign-t	0.000	X	0.376	0.000	0.653	0.876	0.700
2 (b)	3.516	0.685	X	5.423	-0.474	-0.238	0.368
sign-t	0.001	0.495	X	0.000	0.637	0.812	0.714
kesimpulan	S	TS	TS	S	TS	TS	TS

Keterangan: $\alpha = 0.05$; TS = tidak signifikan;
S = signifikan.

Uji-t bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak. Bila ternyata setelah dihitung $|t| > t_{\alpha/2}$, maka hipotesis nol bahwa $B_j = 0$ ditolak pada tingkat kepercayaan $(1-\alpha)$ 100%. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa B_j *statistically significant*. Uji t dengan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: Hasil uji-t terhadap signifikansi model regresi 2a dan 2b menunjukkan bukti bahwa akses dan tabungan masing-masing mempengaruhi secara signifikan terhadap pemberian kredit kepada UKM pada level signifikansi 5%. Sedangkan roa, rentabilitas dan dummy kelompok propinsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pemberian kredit koperasi kepada UKM.

Hasil uji-t terhadap signifikansi model regresi dari model 2a dan 2b menunjukkan bahwa faktor kelompok propinsi yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya alam dan propinsi yang terisolasi dan propinsi lainnya tidak ada yang signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kelompok

propinsi masing-masing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian kredit oleh koperasi kepada UKM.

Namun pada uji F model 2(a) dan 2(b) yang ditunjukkan oleh tabel 4.5 menunjukkan hasil yang signifikan, artinya faktor kelompok propinsi D1,D2,D3 bersama-sama dengan variabel akses, roa, rentabilitas dan tabungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian kredit koperasi terhadap UKM.

4.3 Evaluasi akses koperasi terhadap Usaha Kecil

4.3.1 Aksesibilitas

Pada kedua model diatas rasio akses berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit koperasi terhadap UKM baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Artinya peningkatan jumlah unit koperasi diberbagai daerah akan mempengaruhi minat masyarakat untuk mengakses koperasi, sehingga diharapkan para UKM ini akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan untuk meningkatkan usahanya.

Akses dalam penelitian ini merefleksikan kemudahan usaha kecil dalam mengakses ke lokasi kantor koperasi, sehingga dengan makin banyaknya jumlah koperasi yang tersebar diberbagai lokasi akan makin mudah bagi pengusaha kecil mendapatkan permodalan. Secara teori dilihat dari dampak akses terhadap koperasi, hasil ini menunjukkan adanya indikasi peningkatan kesejahteraan seiring dengan peningkatan akses dari koperasi seperti yang dijelaskan oleh Gulli (1998).

Menurut Sasono (2007) menilai pertumbuhan anggota koperasi simpan pinjam di Indonesia masih rendah. Hal itu terlihat pada kecilnya tingkat keanggotaan koperasi yang hanya 20% dari 150 juta penduduk dewasa Indonesia. Sasono menjelaskan bahwa rendahnya pertumbuhan anggota koperasi di Indonesia karena koperasi belum berperan sebagai penggerak roda ekonomi nasional. Masyarakat juga belum memandang koperasi sebagai tempat simpan dan pinjam serta mengembangkan UKM. Menurutnya, orang masih mengandalkan perusahaan besar sebagai kesempatan kerja dibanding membuat usaha sendiri yang bisa membuka peluang kerja untuk orang lain atau dengan kata lain minat masyarakat lebih besar untuk menjadi pegawai dan bukan menjadi pengusaha.

Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama pemerintah masih sangat besar.

Selain itu faktor kurangnya sosialisasi koperasi kepada masyarakat ikut menjadi kendala dalam kemudahan mengakses koperasi disertai dengan banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif.

Aksesibilitas akan mempunyai signifikansi yang besar saat bersama-sama dengan variabel roa, rentabilitas dan tabungan, karena rasio akses berpengaruh positif terhadap pemberian kredit koperasi terhadap UKM. Hal ini didukung oleh hasil survey BPS yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari pengusaha-pengusaha yang tidak pernah pinjam uang dari bank mengaku bahwa tidak punya agunan merupakan alasan utama. Pada kenyatannya memang banyak dari para pengusaha tersebut berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu memnuhi persyaratan kolateral dari bank misalnya dalam bentuk rumah dan tanah dengan luas yang cukup.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah dengan peningkatan aksesibilitas usaha kecil terhadap permodalan akan membawa pengaruh yang positif terhadap kontribusi usaha kecil sehingga akhirnya akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Upaya pengembangan koperasi dan LKM adalah: pertama membangun kapasitas lembaga keuangan mikro melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKM dan instansi pemerintah terutama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia, sistem dan prosedur operasi, teknologi informasi, jaringan kerjasama dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, melakukan perluasan jaringan kerja sehingga dapat mengembangkan sayap hingga ketempat yang lebih luas seperti yang dilakukan oleh BRI unit. Keberhasilan BRI tidak lepas dari komitmen manajemen BRI untuk

mengembangkan BRI unit dengan menggunakan pendekatan bisnis komersial dan tidak bergantung pada subsidi pemerintah dan donor.

Ketiga, memberikan perhatian penuh serta mencari jalan keluar terhadap faktor-faktor yang menghambat pengembangan usaha kecil bukan hanya pada keterbatasan sumberdaya finansial karena sifatnya yang mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum dan manajemen yang sebagian masih tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal yang selalu menerapkan prinsip perbankan dalam memutuskan kreditnya tetapi juga bagi kendala lainnya seperti penyediaan bahan baku murah dan pasar. Untuk mengatasi hambatan ini pendekatan yang dilakukan adalah penyediaan jasa keuangan mikro.

Selain itu koperasi dan LKM merupakan lembaga yang mampu memenuhi karakteristik UK yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. LKM mampu memberikan pelayanan kredit dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat dan dengan cara itu pula mampu untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan. Untuk itu pemerintah perlu membuat kebijakan yang mempermudah koperasi dan LKM tersebut mendapat tambahan modal dengan tingkat suku bunga yang ringan.

4.3.2 Return on Asset (ROA)

Pada model diatas variabel roa tidak berpengaruh terhadap pemberian kredit pada UKM secara signifikan baik secara parsial, artinya peningkatan atau penurunan persentase roa tidak mempengaruhi besarnya pemberian kredit koperasi terhadap UKM. Namun secara bersama-sama dikatakan bahwa ROA signifikan terhadap pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika kesehatan koperasi baik maka kelangsungan hidup dari koperasi akan mendorong UKM untuk berkembang.

ROA yang tinggi harus diinterpretasikan secara hati-hati karena hal ini dimungkinkan oleh 2 hal yaitu: 1) laba usaha tinggi karena laba tidak disalurkan lagi dalam bentuk kredit. 2) berkurangnya aset yang dimiliki koperasi atau LKM.

Return on asset merupakan salah satu faktor yang menentukan kesehatan suatu lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro. Jika koperasi atau lembaga keuangan mempunyai ROA yang tinggi artinya lembaga tersebut berhasil mengelola aset yang dimiliki sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari asetnya. Yaron (1994) berpendapat bahwa laba besar yang diperoleh LKM tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator sustainabilitas suatu LKM karena laba yang besar dapat saja diperoleh hanya dalam waktu yang singkat dan tidak bertahan lama. ROA yang baik adalah jika tiap bulan nilainya konstan bahkan meningkat.

Kemungkinan koperasi mempunyai laba yang besar adalah karena non performing loannya kecil dimana hampir semua pinjaman kembali tepat waktu atau karena tingginya tingkat bunga/bagi hasil yang dikenakan pada peminjam. Kebanyakan LKM mengenakan biaya bunga yang tinggi lebih tinggi dari nilai pasar, karena jika tidak demikian LKM tidak akan dapat menutup biaya operasionalnya. Namun hal ini tidak memberatkan masyarakat miskin karena prosesnya lebih cepat dan pengembalian bisa disesuaikan dengan kemampuan peminjam.

4.3.3 Persentase Rentabilitas

Faktor rentabilitas pada model tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap jumlah pemberian kredit kepada UKM secara parsial, artinya peningkatan persentase rentabilitas tidak mempengaruhi penurunan atau kenaikan pemberian kredit kepada UKM. Namun secara bersama-sama dikatakan bahwa faktor Rentabilitas signifikan terhadap besar pinjaman yang diberikan kepada pengusaha kecil, hal ini sesuai dengan teori bahwa jika kesehatan koperasi baik maka kelangsungan hidup dari koperasi akan mendorong UKM untuk berkembang yang artinya koperasi dapat terus memberikan bantuan permodalan dalam rangka pengembangan usaha kecil.

Namun peningkatan rentabilitas harus diinterpretasikan secara hati-hati bahwa jika rentabilitas naik dapat berasal dari 2 alasan: 1) laba usaha tinggi karena banyak tidak disalurkan kembali sebagai kredit atau 2) makin turunnya jumlah modal sendiri dari koperasi atau LKM tersebut.

Rentabilitas adalah kemampuan suatu lembaga keuangan dalam menghasilkan laba melalui modal sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu koperasi yang bisa mengelola modalnya dapat dikatakan sebagai koperasi yang sehat dan efisien. Modal dari koperasi dihimpun dari iuran dan sumbangan yang diberikan oleh anggotanya sehingga modal koperasi cenderung kecil jika tidak mendapat bantuan permodalan dari pemerintah.

Untuk membangun suatu koperasi yang sustainabel maka pihak koperasi harus meningkatkan sumber daya manusianya, terutama dibidang pendidikan dan ketrampilan. Selain itu dapat memperoleh pinjaman dengan bunga ringan dengan cara bekerja sama dengan lembaga keuangan lain atau perbankan. Selain itu pihak koperasi juga harus dapat melihat peluang lain bukan hanya dalam hal simpan pinjam, tetapi misalnya dengan menyediakan bahan baku, penggunaan teknologi yang maju serta penyediaan pasar yang luas untuk anggotanya.

Dalam pengembangan koperasi Ledgerwood (1999) menunjukkan bahwa profitabilitas dan efiseiensi merupakan faktor kunci yang menentukan kemampuan keuangan suatu LKM, hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi sustanabilitas LKM

Pencapaian tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi merupakan prasyarat utama bagi sebuah LKM untuk sustanabel dalam jangka waktu yang panjang. Kerugian pinjaman seringkali menjadi biaya yang terbesar yang harus ditanggung oleh LKM tersebut dan menjadi penyebab utama kebangkrutan dan ketidaklikuiditasannya. Pentingnya indikator kualitas portofolio ini juga ditunjukkan oleh kriteria kesehatan lembaga perbankan yang dibuat oleh bank sentral yang disebut kriteria CAMEL yang memberikan bobot tinggi tiga puluh persen untuk indikator ini (Bank Indonesia, 1997).

4.3.4 Rasio tabungan

Fakor tabungan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pemberian kredit kepada UKM baik secara bersama maupun secara parsial. Artinya peningkatan tabungan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap jumlah kredit

yang akan disalurkan, sehingga makin banyak tabungan yang berhasil dikumpulkan akan meningkatkan jumlah kredit yang akan disalurkan pada UKM.

Kebiasaan menabung sebenarnya dapat dibina dengan baik serta dikembangkan menjadi salah satu sumber pinjaman untuk LKM dalam melayani kebutuhan dari anggotanya. Rasio tabungan yang merupakan banyaknya jumlah uang masyarakat yang disimpan di koperasi dari hasil regresi dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap jumlah besar pemberian kredit kepada UKM.

Aspek permodalan KSP ditentukan oleh jumlah simpanan anggota dan pinjaman yang berasal dari sumber eksternal. Keterbatasan kemampuan anggota dalam menabung, menyebabkan jumlah simpanan di KSP relatif kecil, sehingga memerlukan penguatan permodalan. Untuk itu semangat menabung perlu digiatkan dan perlu peningkatan sumber eksternal melalui dana bergulir pemerintah maupun perbankan (*linkage program*) dengan pinjaman komersial. Sumber dana eksternal dibutuhkan agar modal KSP cukup memadai untuk dapat menutup biaya operasional dan memperluas jangkauan pelayanan pada usaha mikro.

Robinson (1994) melakukan identifikasi terhadap beberapa alasan mengapa uk akan menabung (*saving money*) yaitu untuk kebutuhan konsumsi dan pembelian tahan lama dimasa yang akan datang, untuk persiapan investasi, untuk kegunaan cadangan sosial dan keagamaan (misal pergi haji), tabungan hari tua, cadangan biaya kesehatan dan untukantisipasi kebutuhan *cashflow* yang berlebih pada waktu tertentu. Masyarakat akan memilih lembaga keuangan yang dapat menjamin bahwa uang yang disimpan adalah aman, liquid, dan divisible.

Penabung akan tertarik untuk menyimpan uangnya jika ia mendapatkan:

1. *Convenience*: merupakan bentuk layanan yang memudahkan penabung antara lain seperti ditambahkan jasa-jasa guna mempermudah transaksi keuangan.
2. *Liquidity*: lembaga keuangan harus mampu meningkatkan liquiditas pada saat penabung akan menarik uangnya kembali.
3. *Security*: setiap penabung ingin mendapatkan keamanan dalam arti lembaga keuangan harus mengurangi kemungkinan tidak dibayar

kembali oleh si peminjam agar tidak merugikan si penabung akibat gagal bayar oleh debitor.

Berbagai keterbatasan dalam melayani penabung yang dimiliki koperasi dan LKM menyebabkan rendahnya deposit ratio. Koperasi yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai kantor cabang akan kesulitan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Lembaga keuangan mikro dan koperasi sendiri mempunyai kesulitan:

1. Koperasi dan LKM harus menjalankan fungsinya sebagai *banking for the poor* dimana sumber utama finansialnya bukan berasal dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin namun diperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan pada masyarakat miskin melalui kredit dan bukan menjalankan fungsi intermediasi antar masyarakat miskin.
2. Keberadaan koperasi dan LKM diharapkan mampu melayani usaha kecil yang usahanya kurang bankabel. Jadi prioritas utama yang dilayani LKM adalah usaha kecil yang masih jauh dari kebiasaan menabung karena danya akan banyak terserap untuk pengembangan usaha.

Dalam pengembangan jangka panjang, koperasi harus melakukan perbaikan secara internal dan mengembangkan jaringan secara eksternal sehingga akan mengubah deposit rasio yang berkorelasi negatif menjadi positif terhadap pengentasan kemiskinan. Christensen (1996) melakukan analisis keberadaan sistem BRI unit yang sudah berhasil menggunakan tabungan sebagai sumber pembiayaan dengan menggunakan metode kemandirian dan profitabilitas kelembagaan yang dibagi dalam 3 tahap yaitu: periode subsidi dependen, periode operating self sufficiency dan periode microfinance intermediary.

Fachrudin (2003) dalam penelitiannya tentang "Pengembangan LKM dengan modal BRI unit untuk pemberdayaan masyarakat nelayan" menjelaskan bahwa melalui suatu proses transformasi yang panjang maka tahapan periode dalam

perkembangan kelembagaan kelembagaan BRI unit mampu mewujudkan proses intermediasi yang sesuai dengan mekanisme pasar.

4.3.5 Evaluasi dummy kondisi propinsi

Dummy kriteria propinsi dibagi menjadi 4 dengan tujuan untuk mendapatkan perbedaan yang nyata antar propinsi yang ada di Indonesia dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis yang terisolasi, dan kelompok propinsi lainnya. Selanjutnya dari model 2 (a) dan 2 (b) diatas untuk variabel dummy dapat diketahui bahwa variabel kelompok propinsi tidak berpengaruh pada jumlah pemberian kredit kepada UKM secara signifikan pada saat model digunakan secara keseluruhan dalam melihat jumlah pemberian kredit kepada UKM baik secara parsial maupun bersama-sama.

Namun dimungkinkan juga karena jumlah penduduk yang banyak tanpa diimbangi dengan pertumbuhan perekonomian akan meningkatkan jumlah pengangguran. Hasil penelitian Tambunan (2008) mendapatkan bahwa adanya korelasi yang kuat antara jumlah koperasi aktif dan tingkat pengangguran. Menurut data tersebut, tingkat pengangguran tertinggi adalah di Jawa Barat (22,86%) dan jumlah koperasi aktif dan juga paling banyak ada di propinsi tersebut masing-masing berjumlah 14.211 koperasi aktif dari 20.562 unit koperasi.

Tabel 4.7: Koefisien korelasi parsial

Model	ln akses	ln ROA	ln rent	ln tab	Dummy		
					Dsda	Dsdm	Diso
2 (a)	0.821	-	-0.75	0.855	0.639	-0.142	-0.196
2 (b)	0.821	-0.11	-	0.855	0.639	-0.142	-0.196

Dalam tabel 4.7 diketahui bahwa ln roa, ln rentabilitas dan dummy tidak memiliki kepekaan yang berarti terhadap pinjaman yang diberikan pada UKM. Berdasarkan tabel diatas akses memiliki pengaruh sebesar 82%, dan tabungan 85.5%, kedua variable ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pinjaman

yang dapat diberikan kepada UKM. Sedangkan variable roa dan rentabilitas mempunyai pengaruh kecil bahkan dianggap tidak berpengaruh. Demikian juga dengan ketiga dummy propinsi.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor akses dan tabungan akan menjadi pemicu positif bagi jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada UKM. Indikator pelayanan yang berupa akses kepada lembaga keuangan mikro dalam hal ini menunjukkan semakin banyak jumlah koperasi yang aktif dalam kegiatan usahanya akan dapat mendukung pengusaha kecil dalam hal permodalan yang akhirnya akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Internal performance atau faktor kesehatan koperasi yang harus diperhatikan adalah bahwa tingginya nilai ROA dan rentabilitas harus berasal dari naiknya performa bisnis dari koperasi dan LKM dan bukan berasal dari menurunnya asset dan modal sendiri, sehingga akan menurunkan efektifitas pelayanan dari usaha kecil.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, variabel-variabel ini kemudian dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Model 2 (a):

$$\text{Ln Kredit} = 1,657 + (0,652 \text{ Ln akses} + 0,06 \text{ LnRent} + 0,566 \text{ LnTab}) + (0,174 \text{ Dsda} + 0,044 \text{ Dsdm} + 0,092 \text{ Diso}) + e \quad (4.5)$$

Dari hasil ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut: saat tidak ada akses, rentabilitas rendah, dana tabungan minim, maka kredit yang dapat diberikan kepada pengusaha kecil hanya sebesar 1.657% dari modal yang dimiliki. Dapat diartikan jika makin banyak koperasi yang tidak aktif, laba yang dihasilkan sedikit atau merugi, dan dana tabungan kecil karena likuiditas tinggi atau tidak ada kepercayaan masyarakat pada koperasi maka besarnya kredit yang diberikan adalah 1.66% dari modal anggota yang terkumpul sehingga dapat dikatakan kecil sekali.

Faktor variabel akses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana kredit yang dikucurkan. Variabel akses yang diwakili oleh kenaikan jumlah koperasi aktif yang tersebar diseluruh propinsi meningkat sebanyak 10%, maka penyaluran kredit pada pengusaha kecil akan meningkat sebesar 6,52%. Hal ini mudah dimengerti karena

makin banyak koperasi aktif yang berdiri dan memiliki manajemen yang bagus akan sangat membantu para pengusaha kecil untuk mengakses kebutuhannya. Sehingga jumlah dana yang dikucurkannya juga akan terus meningkat dari tahun ketahun.

Jika rentabilitas koperasi meningkat 10% maka kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat jumlahnya hanya akan meningkat hingga 0.6%. Variabel rentabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit pada masyarakat dikarenakan kemungkinan sisa hasil usaha yang diperoleh sengaja ditahan dan tidak disalurkan kepada pengusaha kecil atau jumlah modalnya yang makin berkurang sehingga seakan-akan sisa hasil usaha yang diperoleh menjadi besar.

Faktor tabungan merupakan variabel yang signifikan terhadap besar kredit yang akan disalurkan pada pengusaha kecil. Saat dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan meningkat 10% maka akan terjadi peningkatan kredit kepada pengusaha kecil sebesar 5.66%. hal ini bisa dimengerti karena sebagian modal koperasi berasal dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun, semakin besar dana yang dihimpun mempunyai arti bahwa koperasi memiliki kepercayaan yang besar dimata masyarakat sehingga mereka tertarik untuk menabung dikoperasi. Apalagi jika koperasi menawarkan berbagai macam bentuk tabungan serta jasa-jasa penunjang dan juga skim-skim dana peminjaman yang disesuaikan dengan kemampuan para nasabahnya.

Model 2 (b):

$$\text{Ln Kredit} = 1.778 + (0.617 \text{ Ln akses} + 0.048 \text{ LnROA} + 0.58 \text{ LnTab}) + (\alpha_4 \text{D} \text{sda} + \alpha_5 \text{D} \text{sdm} + \alpha_6 \text{Diso}) + e \quad (4.6)$$

Dari hasil ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut: saat tidak ada akses, rentabilitas rendah, dana tabungan minim, maka kredit yang dapat diberikan kepada pengusaha kecil hanya sebesar 1.778% dari modal yang dimiliki. Dapat diartikan jika makin banyak koperasi yang tidak aktif, laba yang dihasilkan sedikit atau merugi, dan dana

tabungan kecil karena likuiditas tinggi atau tidak ada kepercayaan masyarakat pada koperasi maka besarnya kredit yang diberikan adalah 1.778% dari modal anggota yang terkumpul sehingga dapat dikatakan kecil sekali.

Faktor variabel akses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana kredit yang dikucurkan. Variabel akses yang diwakili oleh kenaikan jumlah koperasi aktif yang tersebar diseluruh propinsi meningkat sebanyak 10%, maka penyaluran kredit pada pengusaha kecil akan meningkat sebesar 6,17%. Hal ini mudah dimengerti karena makin banyak koperasi aktif yang berdiri dan memiliki manajemen yang bagus akan sangat membantu para pengusaha kecil untuk mengakses kebutuhan modalnya. Sehingga jumlah dana yang dikucurkannya juga akan terus meningkat dari tahun ketahun.

Jika roa koperasi meningkat 10% maka kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat jumlahnya hanya akan meningkat hingga 0.5%. Variabel roa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit pada masyarakat dikarenakan kemungkinan sisa hasil usaha yang diperoleh sengaja ditahan dan tidak disalurkan kepada pengusaha kecil atau jumlah modalnya yang makin berkurang sehingga seakan-akan sisa hasil usaha yang diperoleh menjadi besar.

Faktor tabungan merupakan variabel yang signifikan terhadap besar kredit yang akan disalurkan pada pengusaha kecil. Saat dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan meningkat 10% maka akan terjadi peningkatan kredit kepada pengusaha kecil sebesar 5.8%. Hal ini bisa dimengerti karena sebagian modal koperasi berasal dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun, semakin besar dana yang dihimpun mempunyai arti bahwa koperasi memiliki kepercayaan yang besar dimata masyarakat sehingga mereka tertarik untuk menabung dikoperasi. Apalagi jika koperasi menawarkan berbagai macam bentuk tabungan serta jasa-jasa penunjang dan juga skim-skim dana peminjaman yang disesuaikan dengan kemampuan para nasabahnya.

Berdasarkan interpretasi diatas maka dibuatlah tabel ikhtisar penelitian yang diharapkan dapat menjelaskan secara ringkas semua hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan interpretasinya.

Tabel 4.8 Ikhtisar interpretasi hasil penelitian

Variabel	Model 2 (a)		Model 2 (b)		Interpretasi
	Koef	SE	Koef	SE	
Intercept	1.657	0.839	1.778	0.863	jika tidak ada akses, laba dan tabungan koperasi, maka besar pinjaman yang diberikan berkisar 1,6% dari modal yang tersedia.
ln akses	0.652	0.178	0.617	0.176	setiap kenaikan 10% pada akses akan menaikkan Pinjaman yang diberikan sebesar 6.5%
ln ROA	x	x	0.048	0.07	jika ROA naik 100% artinya pinjaman yang diberikan akan meningkat sebesar 4.8% saja
ln Rent	0.060	0.067	x	x	jika Rentabilitas naik 100% artinya pinjaman yang diberikan akan meningkat sebesar 6% saja
ln tab	0.566	0.108	0.58	0.107	jika jumlah tabungan naik 10% maka besar pinjaman yang diberikan akan meningkat sebesar 5,6%.
Dummy Dsda	0.174	0.387	-0.185	0.39	peningkatan akses dan kesehatan koperasi akan berkontribusi pada propinsi kaya SDA dan akan menaikkan pemberian kredit sebesar 0.174%
Dummy Dsdm	0.044	0.284	-0.067	0.282	peningkatan akses dan kesehatan koperasi akan berkontribusi pada propinsi kaya SDM dan akan menaikkan pemberian kredit sebesar 0.044%
Dummy Disolasi	0.092	0.238	0.089	0.243	peningkatan akses dan kesehatan koperasi akan berkontribusi pada propinsi terisolasi dan akan menaikkan pemberian kredit sebesar 0.092%

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor akses, roa, rentabilitas dan tabungan koperasi terhadap pinjaman yang diberikan pada usaha kecil menengah sebagai berikut:

- 1) Analisis pengaruh secara serentak pada model 2(a) dan 2(b) terhadap akses, return on asset, rentabilitas dan rasio tabungan serta dummy propinsi bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pinjaman yang diberikan pada usaha kecil menengah di Indonesia.
- 2) Variabel yang dominan mempengaruhi pinjaman yang diberikan pada usaha kecil menengah di Indonesia adalah variable akses dan tabungan, semakin mudah lembaga keuangan mikro diakses akan membantu mengatasi masalah UKM terutama dibidang permodalan. Dan semakin banyak dana masyarakat (tabungan) terkumpul di suatu koperasi, maka jumlah kredit yang disalurkan akan meningkat.
- 3) Koperasi merupakan bentuk syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak memberikan seperti keuntungan dibagi sesama anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja kerja, dan memberi bantuan keuangan pada anggotanya. Didalam koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin), pengelolaan yang demokratis, pembagian keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.
- 4) Koperasi syari'ah (syirkah Islam) harus terbebas sama sekali dari unsur riba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dasar koperasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

5.2 Saran

(1) Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akses pengusaha kecil pada Koperasi:

- Meminimalkan jumlah koperasi yang tidak aktif dengan memberikan bimbingan, pelatihan dan pengawasan pada koperasi-koperasi yang ada.
- Mempermudah proses peminjaman, tidak bertele-tele dan pengembalian dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabahnya.
- Mensosialisasikan keberadaan koperasi pada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui keberadaan koperasi di daerah mereka.
- Melakukan perluasan jaringan kerja seperti yang dilakukan BRI unit.

(2) Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesehatan koperasi :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di koperasi.
- Mengadakan audit secara internal berkala supaya peran koperasi dalam meningkatkan roda ekonomi meningkat.
- Koperasi tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah saja, tapi juga harus mampu menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi aktif.

5.2 Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini menggunakan data koperasi konvensional sehingga perlu adanya penelitian yang lebih dalam lagi dengan menggunakan data koperasi syariah dan lembaga mikro syariah lainnya dengan data pada tahun yang lebih muda.

(3) Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menghimpun dana dari masyarakat:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
- Pengelolaan keuangan yang profesional dan transparan, sehingga masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan koperasi

(4) Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesehatan koperasi :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di koperasi.
- Mengadakan audit secara internal berkala supaya peran koperasi dalam meningkatkan roda ekonomi meningkat.
- Koperasi tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah saja, tapi juga harus mampu menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi aktif.

5.2 Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini menggunakan data koperasi konvensional sehingga perlu adanya penelitian yang lebih dalam lagi dengan menggunakan data koperasi syariah dan lembaga mikro syariah lainnya dengan data pada tahun yang lebih muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, 2008; *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, kinerja dan sustainabilitas*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Ahmad, Ziauddin, DR, 1998. *Alquran, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Penerbit Dana Bhakti Primayasa
- Christen, R.B., E. Rhyne & R. Vogel. 1995. *Maximizing the outreach of micro enterprise Finance: The emerging lessons of successful programs*. Focus note no.2 Washington DC: CGAP
- Christen, Robert P. 1998. *Keys to financial sustainability*. In Kimenyi, Mwangi S, Robert C wielwnd & J D von Pischke, editors, *Strategic issues in Microfinance*. Aldershot, England: Ashgate
- Chaves, Rodrigo A & Claudio Gonzales-Vega 1996. *The Design of Successful Rural Financial Intermediaries: Evidence from Indonesia*. World Development, 24(1): 65-78
- CGAP, 2001; *Resources guide to microfinance assessments*, CGAP Focus note No. 22. Washington DC: The Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP)
- Dewan Koperasi Indonesia 2002; *Koperasi untuk Pemberdayaan Usah Kecil dan Mikro*. Dekopin Jakarta.
- Ginanjar, Adhitya, 2003; *Faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan asset LKMS (study kasus P2KR Daerah istimewa Yogyakarta 19997-2002)*. Jakarta, Tesis PSKTTI Universitas Indonesia
- Khotimah Husnul,2004; *Pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi para mustahiq, (study kasus di community Developmentr Cyrcler (CDC) Dompel Dhuafa Republika tahun 2001-2004)*. Jakarta tesis PSKTTI Universitas Indonesia.
- Khanker, Shahidur R, 1998. *Micro Credit Program Evaluation: A critical Review*, Institute of Development Studies Bulletin, 29(4):1-20
- Ledgerwood, Joanna, 1999. *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial perspective*, Washington DC: The world Bank

- Mulyadi, Arief 2005; *Dukungan Lembaga Keuangan Mikro terhadap usaha Mikro dan kecil untuk meningkatkan ketahanan daerah (study kasus pada wilayah kabupaten Garut)*. Tesis Program study kajian strategic ketahanan nasional Universitas Indonesia.
- Nachrowi dan Usman 2006; *Pendekatan Populer dan Praktis EKONOMETRIKA untuk analisis ekonomi dan keuangan*, Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nadjib, M 2006; *Pengaruh BMT terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 91-126
- Robinson, Marguerite (2002) *The Microfinance Revolution, volume 2: Lesson from Indonesia*. The World Bank.
- Sutopo Wahyudi 2004; *Hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro dan kontribusi Usaha Kecil dalam pengentasan Kemiskinan*. Jakarta Tesis Program studi Manajemen Universitas Indonesia
- Snow, Douglas. 1999. Microcredit: an Institutional Development opportunity. *International Journal of economic development*, 1(1):65-79
- Sekaran, Uma 2006; *Research Method for Business*. Edisi Pertama, Jakarta Salemba Empat.
- Saridu, Siti M. 2007; "Pengaruh Kredit Qardhul Hasan terhadap Peningkatan Kinerja Usaha: Studi Kasus Nasabah Qardhul Hasan BMT Bina Dhuafa Beringharjo," Skripsi diajukan kepada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, tidak dipublikasikan.
- Tambunan, Tulus TH 2002; *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: beberapa isu penting*, Jakarta Salemba Empat
- 2008; *Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke depan: Masih Relevankah Koperasi di dalam era modernisasi Ekonomi ?* Pusat Studi Industri dan UKM University of Trisakti.
- Team Dakwatuna (2007), *Koperasi dalam perpektif Islam*, <http://www.dakwatuna.com/2007/hukum-koperasi/>

Todaro, Michael and Smith, Stephen (2004); *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, edisi ke delapan, Penerbit: Erlangga

Widyaningrum, Nurul, 2002, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*, Bandung: Yayasan Akatiga



DATA PERKEMBANGAN USP KOPERASI SELURUH INDONESIA

PER : MARET 2005

NO.	URAIAN	Jumlah USP Kop (Unit)	JUMLAH		MODAL PINJAMAN (Rp. Jl.)	MODAL SENDIRI/TETAP (Rp. Jl.)	MODAL PENYERTAAN (Rp. Jl.)	SIMPANAN DITERIMA (Rp. Jl.)	SHU YANG BELUM DIBAGI (Rp. Jl.)	TOTAL ASSET (Rp. Jl.)	PINJAMAN YG DIBERIKAN (Rp. Jl.)	KETERANGAN
			ANGGOTA (Orang)	NASABAH (Orang)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aceh	1.061	130.582 *)	101.655	24.229,34	28.144,46	159.468,88	12.400,44	279.614,34	73.793,50	153.280,52	
2	Sum-Utara	1.237	84.261	251.125	61.234,00	72.264,00	0,00	20.180,00	12.669,00	166.548,00	115.776,00	
3	Sum-Barat	1.281	40.573	225.607	16.737,10	109.033,13	0,00	24.438,16	1.437,13	161.645,48	13.821,91	
4	Riau	1.010	12.210	153.866	27.615,30	48.776,90	0,00	5.709,20	4.385,50	85.054,70	81.464,40	
5	Jambi	617	77.761 *)	57.342	21.028,40	25.780,80	0,00	8.552,60	3.339,80	37.997,90	35.736,10	
6	Sum-Selatan	596	9.754	122.766	1.706,51	5.664,62	0,00	2.874,73	3.926,61	42.612,53	10.723,20	
7	Bangka Belitung	163	28.630	31.311	1.907,02	4.786,16	0,00	1.063,90	731,07	9.710,67	12.331,27	
8	Bengkulu	441	66.554 *)	114.510	8.378,02	18.205,39	0,00	2.958,07	3.960,05	33.501,55	33.829,77	
9	Lampung	364	53.015	300.767	7.466,00	27.910,00	0,00	4.144,00	3.279,00	42.799,00	21.536,00	
10	Jakarta	3.692	90.123	855.813	275.212,00	517.050,00	0,00	580.960,00	63.535,00	1.178.584,00	489.165,00	
11	Jawa Barat	5.344	72.527	2.275.099	130.804,22	771.350,99	0,00	261.502,43	203.257,61	326.919,35	918.677,28	
12	Banten	1.228	22.359	124.051	19.148,39	121.822,91	0,00	9.084,87	21.273,19	343.433,95	162.343,52	
13	Jawa Tengah	4.875	241.170	1.843.566	245.178,00	268.253,00	0,00	125.491,00	23.465,00	1.157.841,00	495.254,00	
14	Yogyakarta	795	41.352	205.503	15.490,00	35.141,00	0,00	14.581,00	2.130,00	64.797,00	44.177,00	
15	Jawa Timur	5.647	2.921.266 *)	2.466.045	441.780,46	1.620.065,85	0,00	82.767,93	70.423,67	912.651,63	1.078.936,79	
16	Bali	1.007	231.532	246.001	94.840,81	68.883,47	0,00	211.960,23	47.539,53	1.719.382,95	1.634.353,27	
17	NTB	701	66.803	162.606	13.764,33	47.236,10	0,00	7.555,82	4.434,61	72.990,85	65.716,88	
18	NTT	582	6.003	137.219	8.115,80	13.691,86	0,00	4.673,73	3.280,64	33.746,17	25.269,96	
19	Kal-Barat	256	35.118	85.730	13.292,06	13.717,37	170,90	5.855,02	3.914,34	39.551,74	21.863,77	
20	Kal-Tengah	515	31.112	24.940	3.960,60	13.162,14	0,00	2.289,91	1.878,36	21.809,33	15.650,00	
21	Kal-Selatan	490	98.410 *)	64.457	21.147,07	18.792,23	39.898,56	8.413,06	4.036,09	60.374,85	56.105,97	
22	Kal-Timur	599	8.961	71.477	7.784,00	11.403,00	0,00	5.759,00	976,00	26.927,00	20.512,00	
23	Gorontalo	44	8.888	4.839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.762,20	236,56	
24	Sul-Utara	399	33.872 *)	41.539	11.961,39	18.832,06	0,00	5.652,52	4.528,43	33.969,74	31.970,03	
25	Sul-Tengah	343	59.907 *)	29.651	17.078,09	28.564,12	0,00	6.206,28	2.398,55	54.247,07	41.016,71	
26	Sul-Tenggara	509	19.945	70.547	4.038,00	16.349,00	0,00	3.631,00	10.031,00	24.799,00	17.663,00	
27	Sul-Selatan	1.850	395.268 *)	380.088	51.494,00	102.788,00	252,00	25.835,00	38.376,00	218.405,00	7.870.400,00	
28	Maluku	282	1.410	32.975	1.275,00	5.591,00	0,00	449,00	446,00	7.761,00	3.845,00	
29	Maluku Utara	93	6.371	6.458	2.232,94	2.138,70	210,25	679,44	622,24	6.765,95	3.467,42	
30	Papua	475	72.046 *)	17.355	8.474,83	19.460,57	0,00	9.210,02	1.044.804,25	105.682,61	20.538,92	
TOTAL		36.485	4.987.783	10.824.808	1.357.374,67	4.054.858,83	200.000,58	1.454.578,38	1.894.693,01	7.524.063,62	13.495.662,25	

Keterangan :

- Sumber data dari laporan daerah
- Jumlah anggota masing-masing propinsi berdasarkan data hasil pemetaan, kecuali tanda *) berdasarkan laporan daerah

ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SIMPAN PINJAM

Lampiran 1 : Data KSP/USP seluruh Indonesia

KERAGAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
PER : DESEMBER 2004

NO.	PROVINSI/DI	Jumlah KSP/USP (Unit)	JUMLAH		MODAL PINJAMAN (Rp. J.)	MODAL SENDIRI/TETAP (Rp. J.)	MODAL PENYERTAAN (Rp. J.)	SIMPANAN DITERIMA (Rp. J.)	SHU YANG BELUM DIBAGI (Rp. J.)	TOTAL ASSET (Rp. J.)	PINJAMAN YG DIBERIKAN (Rp. J.)	KETERANGAN
			ANGGOTA (Orang)	NASABAH (Orang)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aceh	1.072	147.938	103.092	25.885.32	584.833.60	183.833.31	14.398.71	343.350.47	138.452.29	162.108.48	
2	Sum-Utara	1.284	128.676	257.203	61.586.00	73.035.00	0.00	20.336.00	12.915.00	187.981.00	117.285.00	
3	Sum-Barat	1.300	52.802	227.709	16.831.46	109.888.12	0.00	25.143.10	1.445.45	153.173.92	14.078.17	
4	Riau	1.017	18.545	155.212	28.468.40	49.751.60	0.00	7.224.50	4.485.10	89.133.20	85.821.50	
5	Jambi	640	80.750	73.070	22.791.70	26.778.00	0.00	9.427.70	3.411.70	41.514.60	39.682.50	
6	Sum-Selatan	621	10.998	127.862	2.514.68	6.781.48	0.00	3.478.18	4.041.13	45.253.59	13.923.94	
7	Bangka Belitung	170	35.330	32.688	2.114.65	5.135.10	0.00	1.198.88	800.88	12.431.99	15.968.99	
8	Bengkulu	453	68.497	116.232	9.689.62	18.831.21	0.00	3.159.04	4.029.80	35.709.70	35.289.86	
9	Lampung	400	81.374	311.066	8.155.00	29.845.00	0.00	5.332.00	3.451.00	46.152.00	24.660.00	
10	Jakarta	3.826	96.000	887.126	318.889.00	535.411.00	0.00	611.299.00	64.320.00	1.280.050.00	785.351.00	
11	Jawa Barat	5.545	87.594	2.388.068	136.435.15	790.281.95	0.00	274.410.85	204.941.78	372.321.00	953.953.96	
12	Banten	1.254	30.669	127.635	20.311.55	122.002.64	0.00	9.177.05	21.358.24	345.637.90	164.157.34	
13	Jawa Tengah	4.939	272.948	1.951.789	250.789.00	274.635.00	0.00	210.838.00	24.142.00	1.309.885.00	549.281.00	
14	Yogyakarta	867	57.721	223.226	18.319.00	38.868.00	0.00	17.137.00	2.554.00	74.455.00	53.232.00	
15	Jawa Timur	6.080	3.032.316	2.780.066	529.685.04	1.678.597.72	0.00	150.870.44	87.215.88	1.413.978.92	1.556.269.05	
16	Bali	1.046	269.963	255.020	103.893.67	72.978.01	0.00	222.270.37	48.006.51	1.743.407.47	1.682.947.12	
17	NTB	714	104.991	185.216	14.543.50	48.103.62	0.00	8.269.84	4.518.30	75.436.15	67.895.18	
18	NTT	654	8.609	154.168	11.738.75	42.764.89	0.00	13.224.48	9.933.54	134.748.08	41.948.33	
19	Kal-Barat	288	72.223	135.297	18.234.96	26.902.27	228.07	71.625.25	5.334.30	117.101.46	86.608.74	
20	Kal-Tengah	522	33.859	25.866	4.248.38	13.375.42	0.00	2.428.69	1.892.07	22.433.13	16.248.52	
21	Kal-Selatan	489	123.004	66.933	21.770.00	18.623.76	40.669.77	5.488.77	5.035.87	55.621.20	58.813.65	
22	Kal-Timur	607	10.788	74.609	8.210.00	11.967.00	0.00	5.914.00	1.016.00	27.113.00	21.528.00	
23	Gorontalo	106	16.457	7.900	685.49	1.274.80	0.00	0.00	310.00	634.283.50	555.88	
24	Sul-Utara	473	36.684	65.113	14.822.64	21.639.12	1.276.50	7.447.33	4.983.44	40.216.44	38.669.83	
25	Sul-Tengah	357	82.238	35.237	14.956.59	29.510.58	0.00	8.758.82	1.678.62	52.824.72	37.442.84	
26	Sul-Tenggara	524	21.929	75.763	5.172.00	17.923.00	0.00	3.900.00	10.201.00	27.948.00	24.175.00	
27	Sul-Selatan	1.938	430.991	417.385	61.269.00	153.094.00	252.00	53.905.00	50.364.00	318.641.00	7.958.428.00	
28	Maluku	296	1.523	70.937	2.637.00	6.101.00	0.00	657.00	571.00	9.965.00	6.919.00	
29	Maluku Utara	99	6.462	16.947	2.432.94	2.553.14	210.25	754.59	663.19	9.583.24	5.709.59	
30	Papua	501	74.669	50.026	10.028.08	20.619.08	0.00	10.067.03	1.045.020.72	109.467.87	22.828.65	
	TOTAL	38.062	5.496.748	11.408.459	1.747.196.55	4.828.902.99	208.487.90	1.776.917.50	1.971.991.75	8.904.028.37	14.644.784.42	

Keterangan :

(Lanjutan)

**REKAPITULASI DATA PERKEMBANGAN KSP DAN USP SELURUH INDONESIA
PER : DESEMBER 2003**

Halaman - 3

NO	PROVINSI	JUMLAH KSP/USP (Unit)	JUMLAH ANGG/NABABAH (Orang)	MODAL TETAP (Rp.0)	MODAL PINJAMAN (Rp.0)	TABUNGAN DITERIMA (Rp.0)	DANA YK DAPAT DI PINJAMKAN	PEMBERIAN PINJAMAN (Rp.0)	SISA HASIL USAHA (Rp.0)	PERSEN TASEBHU (%)	TOTAL ASSET (Rp.0)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)	9	10	11	12	13
1	DI Aceh	1.053	176.328	34.499,42	18.047,20	4.323,61	56.870,23	66.066,49	4.122,50	0,27	66.423,12	
2	Sumatera Utara	1.264	257.203	73.035,00	61.596,00	20.336,00	154.967,00	117.285,00	12.915,00	0,83	167.981,00	
3	Sumatera Barat	1.300	227.709	109.888,12	16.831,46	25.143,10	151.862,68	14.076,17	1.445,45	0,09	153.173,92	
4	Riau	1.017	155.212	49.751,60	28.468,40	7.224,50	85.444,50	85.821,50	4.485,10	0,29	88.133,20	
5	Jambi	640	153.820	26.776,00	22.791,70	9.427,70	58.995,40	39.682,50	3.411,70	0,22	41.514,60	
6	Sumatera Selatan	621	127.862	6.781,46	2.514,68	3.476,18	12.772,32	13.923,94	4.041,13	0,26	45.253,59	
7	Bengkulu	453	184.729	18.831,21	9.689,62	3.159,04	31.679,87	35.289,86	4.029,80	0,26	35.709,70	
8	Lampung	400	311.066	29.645,00	8.155,00	5.332,00	43.132,00	24.660,00	3.451,00	0,22	46.152,00	
9	DKI Jakarta	3.826	697.126	535.411,00	318.869,00	611.299,00	1.465.599,00	788.351,00	64.320,00	4,15	1.280.050,00	
10	Jawa Barat	5.545	2.398.068	790.281,95	136.435,15	274.410,65	1.201.127,75	953.953,96	204.941,76	13,21	372.321,00	
11	Jawa Tengah	4.939	1.951.789	274.635,00	250.789,00	210.838,00	736.262,00	549.281,00	24.142,00	1,56	1.309.885,00	
12	DI Yogyakarta	867	223.226	38.868,00	18.319,00	17.137,00	74.324,00	53.232,00	2.554,00	0,16	74.455,00	
13	Jawa Timur	4.388	1.866.515	890.061,90	294.612,80	114.480,30	1.299.155,00	977.164,70	44.011,50	2,84	933.422,00	
14	Bali	1.046	255.020	72.978,01	103.993,67	101.710,06	278.681,74	216.684,35	11.045,85	0,71	269.726,58	
15	Nusa Tenggara Barat	714	185.216	48.103,52	14.543,50	8.269,84	70.916,86	67.895,18	4.519,30	0,29	75.436,15	
16	Nusa Tenggara Timur	654	154.168	42.764,89	11.736,75	13.224,48	67.726,12	41.948,33	9.933,54	0,64	134.748,08	
17	Kalimantan Barat	288	135.297	25.902,27	18.234,96	71.625,25	115.762,48	86.609,74	5.334,30	0,34	117.101,46	
18	Kalimantan Tengah	522	25.866	13.375,42	4.248,36	2.428,69	20.052,47	16.249,52	1.892,07	0,12	22.433,13	
19	Kalimantan Selatan	594	102.110	9.014,00	18.167,00	1.237,00	28.418,00	31.918,00	1.117,00	0,07	29.535,00	
20	Kalimantan Timur	607	74.609	11.967,00	8.210,00	5.914,00	26.091,00	21.529,00	1.016,00	0,07	27.113,00	
21	Sulawesi Utara	473	101.997	21.639,12	14.822,64	7.447,33	43.909,09	38.669,83	4.983,44	0,32	40.216,44	
22	Sulawesi Tengah	357	81.817	29.510,58	14.956,59	6.759,92	51.226,09	37.442,84	1.678,62	0,11	52.924,72	
23	Sulawesi Tenggara	524	75.763	17.923,00	5.172,00	3.900,00	26.995,00	24.175,00	10.201,00	0,66	27.946,00	
24	Sulawesi Selatan	1.925	842.723	123.376,00	59.739,00	42.470,00	225.585,00	756.151,00	52.819,00	3,41	278.404,00	
25	Maluku	296	70.937	6.101,00	2.637,00	657,00	9.395,00	6.919,00	571,00	0,04	9.965,00	
26	Papua	501	92.024	20.619,08	10.028,08	10.067,03	40.714,19	22.828,65	1.045.020,72	67,37	109.467,87	
27	Maluku Utara	99	16.947	2.553,14	2.432,94	754,59	5.740,67	5.709,59	663,19	0,04	9.583,24	
28	Gorontalo	39	3.061	1.274,80	665,49	-	1.940,29	-	310,00	0,02	-	
29	Banten	1.254	127.635	122.002,64	20.311,55	9.177,05	151.491,24	164.157,34	21.358,24	1,38	345.637,90	
30	Bangka Belitung	170	32.686	5.135,10	2.114,65	1.198,86	8.448,61	15.968,99	800,68	0,05	12.431,99	
	TOTAL	36.376	11.298.529	3.452.705,23	1.499.153,19	1.593.427,19	6.545.285,80	5.273.646,48	1.551.134,89	29,41	6.197.144,69	

Sumber data : Deputi Pembayaan, Kementerian Koperasi dan UKM

(lanjutan)

24

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.364 ^a	.133	.056	1,19445E6	.133	1,728	7	79	.114	1,098

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-126603.358	290153.055		-.436	.664	-704138.568	450931.851					
	jumlah koperasi	284.952	140.490	.355	2,028	.046	5,314	584,591	.310	.222	.213	.358	2,790
	ROA	3884,114	390467,821	.006	.010	.992	-773322,643	781090,872	-.054	.001	.001	.033	30,137
	Rentabilitas	-166,434	73398,488	-.001	-.002	.998	-146262,471	145929,602	-.058	.000	.000	.034	29,244
	jumlah tabungan	.735	1,556	.074	.472	.638	-2,363	3,833	.216	.053	.049	.449	2,226
	D1	-208699,844	614401,226	-.069	-.340	.735	-1,432E6	1014235,207	.189	-.038	-.036	.265	3,777
	D2	3350,194	411778,141	.001	.008	.994	-816273,692	822974,081	-.132	.001	.001	.678	1,475
	D3	472060,648	356377,763	.184	1,325	.189	-237291,545	1181412,840	.110	.147	.139	.572	1,750

Lampiran 2: Hasil regresi model awal

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.879 ^a	.772	.752	.83894	.772	38.291	7	79	.000	.998

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.585	.925		1.713	.091	-.256	3.427					
	ln(jumlah koperasi)	.666	.194	.380	3.426	.001	.279	1.053	.821	.360	.184	.234	4.279
	ln(roa)	-.027	.145	-.022	-.187	.852	-.316	.262	-.011	-.021	-.010	.207	4.839
	ln(rent)	.083	.140	.071	.593	.555	-.195	.361	-.075	.067	.032	.200	4.999
	ln(tab)	.561	.112	.581	5.003	.000	.338	.784	.855	.491	.269	.214	4.676
	D1	-.183	.392	-.044	-.468	.641	-.964	.597	.639	-.053	-.025	.321	3.116
	D2	-.043	.286	-.010	-.150	.881	-.612	.526	-.142	-.017	-.008	.693	1.443
	D3	.083	.244	.024	.342	.733	-.402	.569	-.196	.038	.018	.602	1.661

Lampiran 3: Hasil regresi model di ln

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.879 ^a	.772	.755	.83386	.772	45.212	6	80	.000	.997

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.657	.839		1.976	.052	-.012	3.325					
	ln(jumlah koperasi)	.652	.176	.372	3.654	.000	.297	1.007	.821	.378	.195	.274	3.650
	ln(rent)	.060	.067	.052	.890	.376	-.074	.194	-.075	.099	.047	.850	1.176
	ln(tab)	.566	.108	.586	5.214	.000	.350	.781	.855	.504	.278	.226	4.433
	D1	-.174	.387	-.042	-.451	.653	-.944	.595	.639	-.050	-.024	.326	3.089
	D2	-.044	.284	-.010	-.157	.876	-.610	.521	-.142	-.018	-.008	.694	1.442
	D3	.092	.238	.026	.386	.700	-.382	.566	-.196	.043	.021	.624	1.602

Lampiran 4: Hasil regresi model 2(a)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.878 ^a	.771	.754	.83553	.771	44.978	6	80	.000	1.001

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.778	.863		2.060	.043	.061	3.495						
	ln(jumlah koperasi)	.617	.176	.353	3.516	.001	.268	.967	.821	.366	.188	.284	3.520	
	ln(roa)	.048	.070	.039	.685	.495	-.092	.188	-.011	.076	.037	.878	1.139	
	ln(tab)	.580	.107	.601	5.423	.000	.367	.793	.855	.518	.290	.233	4.291	
	D1	-.185	.390	-.045	-.474	.637	-.962	.592	.639	-.053	-.025	.321	3.116	
	D2	-.067	.282	-.015	-.238	.812	-.628	.494	-.142	-.027	-.013	.707	1.414	
	D3	.089	.243	.025	.368	.714	-.394	.572	-.196	.041	.020	.603	1.658	

Lampiran 5: Hasil regresi model 2(b)